



**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN TENTANG  
INSTRUMEN KEUANGAN KESESUAIAN TERHADAP  
STANDAR PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN  
PADA LAPORAN KEUANGAN EMITEN  
SUB SEKTOR PERBANKAN  
PERIODE 2012-2014**

Skripsi

Disusun Oleh:

Rizka Fadilah  
022112167

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**JUNI 2016**

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN TENTANG  
INSTRUMEN KEUANGAN KESESUAIAN TERHADAP  
STANDAR PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN  
PADA LAPORAN KEUANGAN EMITEN  
SUB SEKTOR PERBANKAN  
PERIODE 2012-2014

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Jurusan  
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Jurusan Akuntansi,

(Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA.)

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN TENTANG  
INSTRUMEN KEUANGAN KESESUAIAN TERHADAP  
STANDAR PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN  
PADA LAPORAN KEUANGAN EMITEN  
SUB SEKTOR PERBANKAN  
PERIODE 2012-2014**

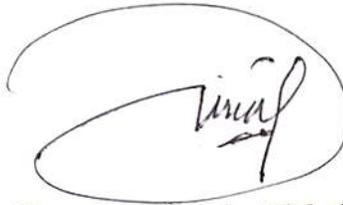
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari : Sabtu, Tanggal : 25 Juni 2016

Rizka Fadilah  
022112167

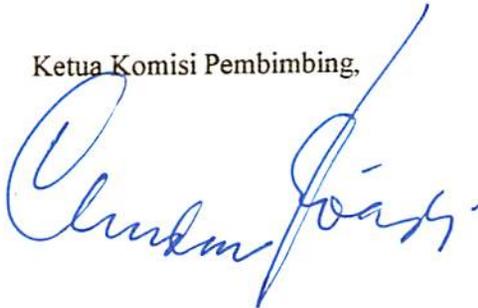
Menyetujui,

Dosen Penilai



(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing,



(Chandra Pribadi, Ak., M.Si., CPSAK., CA., CPA.)

Anggota Komisi Pembimbing,



(Dessy Herlisnawati, M.Si., S.E.)

## ABSTRAK

RIZKA FADILAH, NPM 022112167, Akuntansi, Akuntansi Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Keuangan tentang Instrumen Keuangan Kesesuaian terhadap Standar Penyajian dan Pengungkapan pada Laporan Keuangan Emiten Sub Sektor Perbankan Periode 2012-2014, Dibawah bimbingan: CHANDRA PRIBADI dan DESSY HERLISNAWATI, 2016.

Adanya kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan merupakan hal yang sangat krusial bagi perbankan karena perbankan merupakan emiten yang membutuhkan kepercayaan tinggi dari pihak-pihak yang menggunakan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terlebih karena hampir seluruh komponen dalam laporan posisi keuangan perbankan adalah instrumen keuangan. Instrumen keuangan inilah yang menjadi instrumen penting bagi perbankan dalam seluruh proses bisnis perbankan. Sehingga perbankan dituntut untuk mematuhi secara konsisten ketentuan-ketentuan yang mengatur penyajian dan pengungkapan seluruh instrumen keuangan termasuk pengakuan dan pengukurannya, dalam hal ini PSAK 50, 55 dan 60. Namun, pada praktiknya dalam industri perbankan, terdapat beberapa *impact* yang dirasakan dari pemberlakuannya PSAK mengenai instrumen keuangan tersebut, diantaranya Masalah *Loan Loss Provisioning* yang mengharuskan perbankan memiliki data historis tentang pengalaman kerugian dari setiap jenis kredit bank minimal tiga tahun juga masalah sumber pendapatan bunga bank yang beragam.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan PSAK 50 dan 60 terhadap penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan sub sektor perbankan, sekaligus penerapan PSAK 55 mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. Penyajian ini melingkupi pos-pos aset dan liabilitas keuangan, *impairment asset* dan pos-pos lain pada laporan laba rugi komprehensif juga laporan perubahan ekuitas yang mempunyai relevansi dengan instrumen keuangan, termasuk keandalan dalam menentukan nilai wajar dan metode perhitungan Cadangan Kerugian atas Penurunan Nilai (CKPN). Pengungkapan melingkupi semua informasi yang relevan dengan instrumen keuangan sementara itu, pengakuan melingkupi pengakuan awal dan penghentian pengakuan instrumen keuangan dan pengukuran dalam penelitian berkenaan dengan pengukuran awal dan pengukuran setelah pengakuan awal.

Penelitian mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan dilakukan pada laporan keuangan yang sudah diaudit pada periode 2012 (saat PSAK 55 dan 60 revisi 2010 diterapkan secara efektif) hingga periode 2014. Metode penarikan sampling yang digunakan adalah *purpose sampling* dengan kriteria tertentu atas entitas perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan didapatkan sampel penelitian sebanyak 31 entitas perbankan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis data untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan perbankan.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal penyajian, terdapat beberapa perbedaan dalam kategorisasi aset keuangan namun untuk seluruh pos yang berkaitan dengan instrumen keuangan telah disajikan secara konsisten dalam laporan keuangan perbankan. Dalam hal pengungkapan, terdapat perbedaan kelengkapan informasi menyangkut instrumen keuangan yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, pengukuran dan pengakuan memiliki keseragaman dalam kepatuhan terhadap PSAK 55.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan instrumen keuangan emiten perbankan yang terdaftar di BEI telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tentang penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan.



## KATA PENGANTAR

Jutaan kalimat Hamdalah yang penulis lantunkan dalam setiap langkah hanya dihaturkan kepada Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Yang Maha Esa, Yang Maha Segalanya, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Yang berkat Rahmat dan Rahim-Nya lah, segala perkara dapat terselesaikan, termasuk penyelesaian skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengambil judul, “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan tentang Instrumen Keuangan Kesesuaian terhadap Standar Penyajian dan Pengungkapan pada Laporan Keuangan Emiten Sub Sektor Perbankan Periode 2012-2014”.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan informasi, data, dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini, karena penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak maka skripsi ini akan mengalami perpanjangan waktu dalam penyelesaiannya. Maka dari itu, penulis mengucapkan *Jazakumullahu Khairan Katsiron* kepada:

1. Dr. Bibin Rubini, M.Pd dan Prof. Anna Permanasari, M.Si., yang telah mendukung penulis baik moril maupun materil;
2. Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor;
3. Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor;
4. Ellyn Octavianty, MM., SE., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Eknomi Universitas Pakuan, Bogor;
5. Chandra Pribadi., Ak., M.Si., CPSAK., CPA., selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Dessy Herlisnawati, S.E., M.Si., selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah bersedia penuh meluangkan waktunya;
6. Agung Fajar Ilmiyono, S.E., selaku Koordinator Seminar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan;
7. Para Dosen, Staff Tata Usaha dan Staff Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor;
8. Umi, Ibu yang terbaik, tercantik, terindah, tershalihah, terlembut dan tersegalanya juga Ayah yang perhatiannya tersembunyi tapi nampak, terima kasih selalu menjadi tempat pelabuhan hati, penyemangat moral dan materil demi kesuksesan penulis. Serta Kakak dan Adik-adik, Faridah, Erma dan Yola yang selalu menghibur dan meyakinkan *that everything's gonna be okay*;
9. Nur Syamsi Rajab, S.E., yang selalu menjadi penyempurna dan penyemangat perjalanan hidup penulis;

10. Teman-teman terhebat sepanjang masa, DETROIT dan GOZLAG SASINO yang selalu menjadi inspirasi bagi penulis, mudah-mudahan persahabatan kita menuntun kita selalu dalam kebaikan;
11. Teman-teman Jurusan Akuntansi terutama kelas E angkatan 2012 yang tidak bisa dicantumkan satu-persatu, terima kasih atas segala bentuk dukungannya.

Penulis menyadari bahwa begitu banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan terbuka demi keberhasilan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Aamiin

Bogor, Juni 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	7
1.2.1. Perumusan Masalah.....	7
1.2.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1. Maksud Penelitian.....	7
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Standar Umum Akuntansi Keuangan tentang Pengakuan dan Pengukuran.....	9
2.1.1. Aset dan Liabilitas.....	9
2.1.2. Relevan.....	11
2.1.3. Keandalan.....	11
2.2. Standar Umum Akuntansi Keuangan tentang Penyajian dan Pengungkapan.....	11
2.2.1. Lengkap.....	11
2.2.2. Mudah Dipahami.....	12
2.3. Standar Akuntansi Keuangan tentang Instrumen Keuangan .	12
2.3.1. Umum.....	12
2.3.2. Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan.....	13
2.3.3. Penyajian dan Pengungkapan Instrumen Keuangan ..	19
2.4. Entitas Perbankan.....	24
2.4.1. Pengertian Sub Sektor Perbankan.....	24
2.4.2. Sistem, Fungsi dan Tujuan Entitas Perbankan.....	24
2.4.3. Produk Pelayanan Entitas Perbankan.....	26
2.4.4. Surat Berharga dalam Entitas Perbankan.....	28
2.5. Instrumen Keuangan pada Entitas Perbankan.....	32
2.5.1. Aset Keuangan.....	32
2.5.2. Liabilitas Keuangan.....	33
2.5.3. Pengakuan dan Pengukuran.....	34
2.5.4. Penyajian dan Pengungkapan.....	35
2.5.5. Laporan Keuangan Perbankan.....	35
2.5.6. Risiko Instrumen Keuangan dalam Perbankan.....	36
2.6. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	38
2.6.1. Penelitian Sebelumnya.....	38

	2.6.2. Kerangka Pemikiran .....	39
	2.7. Hipotesis Penelitian.....	40
<b>BAB III</b>	<b>OBJEK DAN METODE PENELITIAN</b>	
	3.1. Jenis Penelitian.....	41
	3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian .....	41
	3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	41
	3.4. Operasionalisasi Variabel.....	42
	3.5. Metode Penarikan Sampel.....	42
	3.6. Metode Pengumpulan Data.....	44
	3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data .....	45
<b>BAB VI</b>	<b>METODELOGI DAN HASIL PENELITIAN</b>	
	4.1. Gambaran Umum Entitas Perbankan .....	48
	4.1.1. Pernyataan Kepatuhan PSAK.....	49
	4.1.2. Instrumen Keuangan Sub Sektor Perbankan.....	50
	4.1.2.1 Aset Keuangan Perbankan .....	52
	4.1.2.2 Liabilitas Keuangan Perbankan.....	64
	4.2. Analisis Penyajian Instrumen Keuangan .....	69
	4.2.1. Analisis Penyajian dalam Karakteristik Relevan .....	69
	4.2.1.1. Aset Keuangan .....	70
	4.2.1.2. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai .....	76
	4.2.1.3. Liabilitas Keuangan .....	79
	4.2.2. Analisis Penyajian dalam Karakteristik Keandalan ...	82
	4.2.2.1. Cadangan Penurunan Nilai.....	82
	4.2.2.2. Penentuan Nilai Wajar .....	82
	4.3. Analisis Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan...	83
	4.3.1. Pengakuan Instrumen Keuangan.....	83
	4.3.1.1. Pengakuan Awal.....	83
	4.3.1.2. Penghentian Pengakuan .....	84
	4.3.2. Pengukuran Instrumen Keuangan .....	84
	4.3.2.1. Pengukuran Awal.....	84
	4.3.2.2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal.....	85
	4.4. Analisis Pengungkapan Instrumen Keuangan.....	86
	4.4.1. Pengungkapan Kebijakan Instrumen Keuangan .....	86
	4.4.2. Pengungkapan Manajemen Risiko .....	87
	4.5. Pembahasan.....	88
	4.5.1. Kesesuaian dengan Tujuan.....	88
	4.5.2. Penelitian Terdahulu .....	89
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	5.1. Kesimpulan .....	91
	5.2. Saran.....	93

**JADWAL PENELITIAN**  
**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Ikhtisar Perbedaan PSAK 55 .....	14
Tabel 2 : Pengukuran Instrumen Keuangan Setelah Pengukuran Awal .....	17
Tabel 3 : Perbedaan PSAK 48 revisi 2009 dan 2013.....	19
Tabel 4 : Persyaratan Penyajian Instrumen Keuangan .....	20
Tabel 5 : Pengungkapan Instrumen Keuangan atas Posisi dan Kinerja Keuangan .....	22
Tabel 6 : Contoh Aset Keuangan Entitas Perbankan (Parsial) .....	33
Tabel 7 : Contoh Liabilitas Keuangan Entitas Perbankan (Parsial).....	34
Tabel 8 : Operasionalisasi Variabel .....	42
Tabel 9 : Kriteria Pemilihan Sampel.....	43
Tabel 10 : Daftar Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI hingga 31 Desember 2014 .....	44
Tabel 11 : Analisis Penyajian Instrumen Keuangan Perbankan .....	46
Tabel 12 : Analisis Pengungkapan Instrumen Keuangan Perbankan .....	47
Tabel 13 : Peraturan Regulator yang Berkaitan dengan Instrumen Keuangan Perbankan .....	49
Tabel 14 : Klasifikasi Instrumen Keuangan Entitas Perbankan .....	51
Tabel 15 : Komponen Kas dalam Entitas Perbankan Periode 2012-2014.....	52
Tabel 16 : Perbedaan Klasifikasi Kas Sebagai Aset Keuangan Periode 2012-2014.....	53
Tabel 17 : Penyajian Komponen Pos Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Periode 2012-2014 .....	56
Tabel 18 : Klasifikasi Efek-Efek pada Entitas Perbankan Periode 2012-2014	57
Tabel 19 : Komponen Efek-Efek Berdasarkan Kategori yang Disajikan Entitas Perbankan Periode 2012-2014 .....	58
Tabel 20 : Jumlah Entitas Perbankan yang Menyajikan Pos Wesel Ekspor Periode 2012-2014.....	58
Tabel 21 : Klasifikasi Pos Obligasi Pemerintah dalam Entitas Perbankan Periode 2012-2014.....	59
Tabel 22 : Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos Efek-efek yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali Periode 2012-2014 .....	60
Tabel 23 : Penyajian Komponen Pos Tagihan Derivatif pada Entitas Perbankan Periode 2012-2014 .....	61
Tabel 24 : Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos Tagihan Akseptasi Periode 2012-2014 .....	63
Tabel 25 : Klasifikasi Penyertaan Saham pada Entitas Perbankan Periode 2012-2014 .....	63
Tabel 26 : Komponen Pos Simpanan dari Bank Lain pada Entitas Perbankan Periode 2012-2014 .....	65
Tabel 27 : Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos Pinjaman yang Diterima Periode 2012-2014.....	66
Tabel 28 : Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali Periode 2012-2014.....	66
Tabel 29 : Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos Liabilitas Derivatif Periode 2012-2014 .....	67

Tabel 30 :	Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos Liabilitas Akseptasi Periode 2012-2014 .....	68
Tabel 31 :	Komponen Efek-Efek yang Diterbitkan yang Dimiliki Entitas. Perbankan Periode 2012-2014 .....	68
Tabel 32 :	Jumlah Entitas yang Menyajikan Pinjaman Subordinasi Periode 2012-2014 .....	69
Tabel 33 :	Jumlah Entitas Perbankan yang Mengungkapkan Aset Keuangan Berdasarkan Jenisnya Periode 2012-2014 .....	70
Tabel 34 :	Jumlah Entitas yang Menyajikan Pendapatan terkait dengan <i>Trading Securities</i> Pada Laporan Keuangan Perbankan.....	71
Tabel 35 :	Jumlah Entitas yang Menyajikan Keuntungan/Kerugian terkait dengan <i>FVTPL</i> Pada Laporan Keuangan Perbankan .....	72
Tabel 36 :	Jumlah Entitas yang Menyajikan Pendapatan Bunga terkait dengan <i>FVTPL</i> Pada Laporan Keuangan Perbankan .....	73
Tabel 37 :	Jumlah Entitas yang Menyajikan Pendapatan Bunga terkait dengan <i>HTM</i> Pada Laporan Keuangan Perbankan .....	73
Tabel 38 :	Jumlah Entitas yang Menyajikan Pendapatan Bunga terkait dengan <i>L/R</i> Pada Laporan Keuangan Perbankan.....	74
Tabel 39 :	Jumlah Entitas yang Menyajikan Keuntungan/Kerugian terkait dengan <i>AFS</i> Pada Laporan Keuangan Perbankan.....	75
Tabel 40 :	Jumlah Entitas yang Menyajikan Laba/Rugi Belum Direalisasi terkait dengan <i>AFS</i> Pada Laporan Keuangan Perbankan.....	75
Tabel 41 :	Jumlah Entitas Perbankan yang Mengungkapkan <i>Impairment Asset</i> berdasarkan jenisnya Periode 2012-2014 .....	77
Tabel 42 :	Proporsi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Total Aset Keuangan pada Entitas Perbankan Periode 2012-2014 .....	78
Tabel 43 :	Beban dan Pemulihan Kerugian Penurunan Nilai dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Entitas Perbankan .....	79
Tabel 44 :	Jumlah Entitas yang Memiliki Liabilitas Keuangan Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi Periode 2012-2014.....	80
Tabel 45 :	Jumlah Entitas yang Memiliki Liabilitas Keuangan Pada Biaya Perolehan Diamortisasi Periode 2012-2014.....	81
Tabel 46 :	Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos Beban Bunga terkait dengan Liabilitas Pada Biaya Perolehan Diamortisasi .....	81
Tabel 47 :	Pengungkapan Instrumen Keuangan pada Entitas Perbankan Periode 2012-2014 .....	86

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 : Tabungan dan Investasi Diperkirakan akan Menjadi Pasar Konsumen Terbesar Tahun 2030 .....	3
Gambar 2 : Pengukuran Instrumen Keuangan pada Pengukuran Awal.....	16
Gambar 3 : Hierarki Penentuan Nilai Wajar Berdasarkan PSAK 68.....	23
Gambar 4 : Pergerakan Persentase Pinjaman yang Diberikan terhadap Aset Entitas Perbankan pada Tanggal 31 Desember 2012-2014.....	62

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan pada 31 Emiten Sub Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014
- Lampiran 2 : Aset Keuangan dalam Komponen Kas pada Emiten Sub Sektor Perbankan Tahun 2012-2014
- Lampiran 3 : Klasifikasi Kas Sebagai Aset Keuangan pada Emiten Sub Sektor Perbankan Tahun 2012-2014
- Lampiran 4 : Jumlah Kategori Aset Keuangan yang Disajikan Emiten Sub Sektor Perbankan 2012-2014
- Lampiran 5 : Jumlah Kategori Liabilitas Keuangan yang Disajikan Emiten Sub Sektor Perbankan 2012-2014
- Lampiran 6 : *Impairment Assets* yang Disajikan pada Laporan Keuangan Emiten Sub Sektor Perbankan 2012-2014
- Lampiran 7 : Aset lain-lain dalam Kategori Pinjaman yang Diberikan pada Laporan Keuangan Entitas Perbankan Periode 2012-2014
- Lampiran 8 : Liabilitas lain-lain dalam Kategori Biaya Perolehan Diamortisasi pada Laporan Keuangan Entitas Perbankan Periode 2012-2014
- Lampiran 9 : Pengukuran Aset Keuangan Setelah Pengakuan Awal Entitas Perbankan Periode 2012-2014
- Lampiran 10: Pengukuran Liabilitas Keuangan Setelah Pengakuan Awal Entitas Perbankan Periode 2012-2014

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan output yang sangat penting dan salah satu media utama yang dapat digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak luar. Laporan keuangan juga sekaligus merekam peristiwa kejadian bisnis dalam bentuk unit moneter yang menjadi pertimbangan *stakeholders* dalam mengambil keputusan bisnis. Pertimbangan ini dilakukan dengan melihat dan menganalisis laporan keuangan perusahaan, termasuk dalam hal pengungkapan dan penyajian informasi.

Pengungkapan dan penyajian informasi merupakan suatu upaya fundamental untuk menyediakan informasi mengenai laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan. Dalam pengungkapan dan penyajian informasi tersebut dibutuhkan sebuah aturan atau standar. Standar ini digunakan agar laporan keuangan antar perusahaan memiliki keseragaman dalam hal penyajian, pengakuan, pengukuran serta pengungkapan atas pos-pos tertentu di dalam laporan keuangan.

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan produk dari regulator terpercaya yaitu IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan akuntabilitas publik. Standar ini berlaku atas penyajian, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pos-pos tertentu untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat difahami, relevan, *faithfulness representation*, lengkap dan dapat dibandingkan. Standar-standar dalam PSAK kini telah disesuaikan melalui adopsi dengan standar-standar yang berlaku diseluruh dunia sebagai reaksi atas adanya tuntutan untuk menyelaraskan dan menyeragamkan persepsi akuntansi di setiap negara.

Dengan pengadopsian IFRS (*International Financial Reporting Standards*) dinilai merupakan jawaban atas permasalahan terhadap transparansi serta kredibilitas pelaporan keuangan, sehingga dapat lebih ditingkatkan. Dengan semakin majunya dunia perekonomian serta perbankan nasional, tentu saja menuntut Indonesia untuk mengikuti perkembangan standar-standar akuntansi internasional sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dari akuntansi itu sendiri.

Semua entitas tanpa terkecuali memiliki aset dan liabilitas keuangan. Untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan misalnya perbankan, aset dan liabilitas keuangan (dikenal dengan instrumen keuangan) merupakan komponen terbesar laporan posisi keuangan (Dwi Martani, 2012, 166), sehingga perubahan besar pada PSAK instrumen keuangan sangat dirasakan oleh entitas yang bergerak di bidang industri keuangan ini.

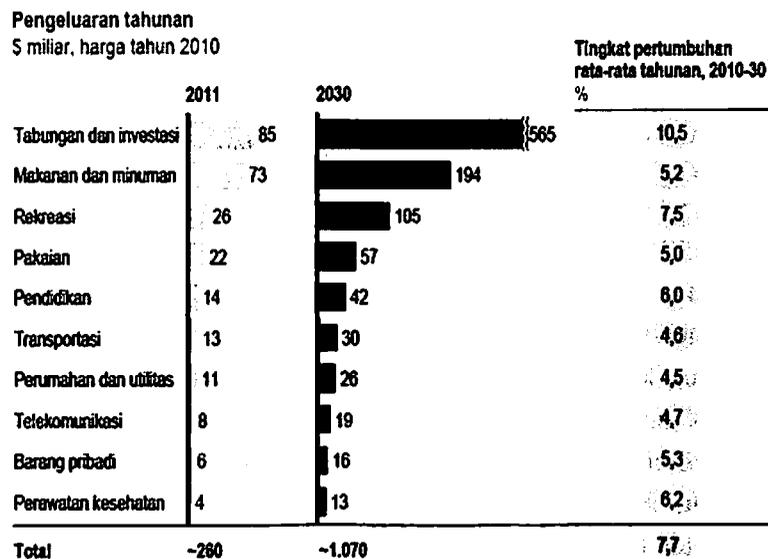
Dunia perbankan sebagai fasilitator kegiatan untuk tabungan dan investasi merupakan salah satu sub sektor dari sektor keuangan yang memiliki peranan teramat

penting bagi kemajuan ekonomi di Indonesia, karena baik secara langsung ataupun tidak langsung, entitas perbankan menyediakan berbagai macam sarana bagi pembiayaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari pembangunan nasional. Perbankan juga dapat digunakan sebagai indikator kualitatif dan kuantitatif terhadap kondisi perekonomian suatu negara karena ketepatannya terhadap motif spekulasi pada mayoritas masyarakat yang menghimpun dananya melalui perbankan.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar karena hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang dunia tidak akan dapat lepas dari eksistensi perbankan, baik ketika menjalankan aktivitas keuangan, perorangan maupun lembaga, sosial ataupun perusahaan.

Perbankan mengalami perkembangan serta akselerasi dari waktu ke waktu, menyelaraskan adaptasi terhadap fenomena globalisasi. Kini karena tingkat urgensitasnya perbankan memiliki regulasi yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah baik melalui OJK maupun Bank Indonesia.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh MGI (*Mc Kinsey Global Institute*) pada tahun 2011 memperkirakan bahwa sub sektor untuk tabungan dan investasi di Indonesia akan menjadi pasar konsumen yang terbesar di tahun 2030 dengan sektor retail dibawahnya, sub sektor tabungan dan investasi diperkirakan memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan 10,5% setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga 2030 mendatang, diikuti dengan tingkat pertumbuhan tahunan 5,2% pada sektor makanan dan minuman. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa sektor perbankan akan semakin berkembang di Indonesia.



Gambar 1  
Tabungan dan Investasi Diperkirakan akan Menjadi Pasar  
Konsumen Terbesar Tahun 2030

Sumber data: CSI Indonesia survey 2011; Biro Pusat Statistik  
Indonesia; Analisis *McKinsey Global Institute*

Perkembangan ini menimbulkan transaksi-transaksi yang ada dalam dunia perbankan semakin beragam. Adanya perkembangan ini juga meningkatkan kompleksitas transaksi-transaksi yang ada, sehingga memerlukan transparansi. Transparansi ini diperlukan guna menjaga kepercayaan para pemegang kepentingan baik eksternal maupun internal agar dunia perbankan semakin dapat meningkatkan eksistensinya untuk memberikan kontribusi positif dalam perekonomian negara.

Hal ini sejalan dengan perkembangan terkini dari standar akuntansi keuangan Indonesia yang mengkonvergensi standar dunia sebagai acuannya. Persoalan yang penting untuk perlu digarisbawahi dalam dunia perbankan adalah saat Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengadopsi standar-standar yang mengatur tentang bagaimana perlakuan dalam masalah penyajian, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan instrumen keuangan, karena pada dasarnya mayoritas akun-akun di dalam laporan keuangan entitas perbankan merupakan instrumen keuangan yang harus diperlakukan sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan regulator bersangkutan.

Standar mengenai instrumen keuangan diatur sejak tahun 1998, saat itu terdapat instrumen keuangan yaitu PSAK 9 Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Lancar, PSAK 50 Sekuritas, PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang, PSAK 21 Akuntansi Ekuitas, PSAK 31 Akuntansi Perbankan, PSAK 50 Akuntansi Investasi, PSAK 51 Akuntansi Koasi Organisasi, PSAK 55 Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktifitas

Lindung Nilai, dan PSAK 54 Akuntansi Restrukturisasi Hutang Piutang Bermasalah. Namun kemudian DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) IAI mengeluarkan PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) serta mengemas 9 PSAK sebelumnya menjadi 2 paket PSAK yang padu dan menyeluruh. Standar ini merupakan standar yang mengatur secara rinci bagaimana seharusnya instrumen keuangan disajikan, diungkapkan, diakui, dan diukur di dalam laporan keuangan.

PSAK 50 dan 55 tersebut mengacu pada IAS 32 dan 39 yang kemudian diterapkan di Indonesia dan batas implementasi kedua PSAK tersebut adalah 1 Januari 2009. Namun, karena banyak terdapat bank dan lembaga keuangan lainnya yang belum mampu untuk menerapkannya, maka pada tanggal 30 Desember 2008 DSAK IAI mengeluarkan surat pengumuman No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008 mengenai penundaan penerapan PSAK 50 dan 55 menjadi untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010.

Tidak berhenti disana, DSAK IAI kemudian merevisi kembali kedua PSAK tersebut menjadi 3 PSAK pada tahun 2010, yaitu PSAK 50 tentang penyajian instrumen keuangan, PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran, serta standar baru yang memisahkan pengungkapan dari PSAK 50 yaitu PSAK 60 tentang pengungkapan dan berlaku efektif 1 Januari 2012, standar-standar tersebut mengacu pada IFRS (*International Financial Reporting Standards*) yang merevisi standar instrumen keuangan pada tahun 2009 yaitu IAS (*International Accounting Standards*) 32, IAS 39 dan IFRS 7.

Perbedaan PSAK 50 revisi 2006 dengan 2010 selain pemisahan pengungkapan instrumen keuangan juga terdapat persyaratan penyajian untuk *puttable instrument* (instrumen dengan opsi jual), kewajiban untuk menyerahkan bagian aset neto secara pro rata pada saat likuidasi dan reklasifikasi dari liabilitas keuangan ke instrumen ekuitas demikian sebaliknya. Sedangkan PSAK 60 yang diadopsi dari IFRS 7 versi 2009 ini mengatur mengenai pengungkapan informasi instrumen keuangan agar pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan termasuk diantaranya pengungkapan kebijakan akuntansi, akuntansi lindung nilai, nilai wajar serta pengungkapan jenis dan tingkat resiko yang ditimbulkan dari transaksi instrumen keuangan juga bagaimana entitas mengelola resiko tersebut.

Beralih pada tiga tahun setelahnya, DSAK IAI kembali merevisi PSAK 50 dan 60 mengeluarkan *exposure draft* pada tahun 2013 serta PSAK 55. Perbedaan dengan revisi sebelumnya diantaranya perbedaan definisi nilai wajar dari dampak perubahan PSAK 68, persyaratan pengungkapan saling hapus, pengalihan aset keuangan. PSAK revisi terbaru tersebut berlaku efektif per 1 Januari 2015 tanpa menawarkan opsi penerapan dini.

Hal yang sangat krusial dari PSAK instrumen keuangan bagi perbankan adalah karena hampir seluruh item dalam laporan keuangan perbankan merupakan

instrumen keuangan (kecuali untuk aset tetap), baik pada sisi debet yaitu simpanan (deposit atau *receivable*) dan sisi kreditnya yaitu *loan* (pinjaman). Maka dari itu sangat penting bagi entitas perbankan untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan secara menyeluruh terhadap instrumen keuangan yang dimilikinya. Sebagai mana diketahui bahwa penyajian, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan merupakan “siklus yang tersiklus” dalam laporan keuangan yang menyajikan instrumen keuangan di dalamnya.

Dapat dianalogikan saja, untuk aset keuangan yang mengalami *impairment* sebagai dampak dari pengukuran berdasarkan nilai wajar akan berpengaruh pada besarnya laba. Nilai *impairment* ini didapatkan ketika terdapat indikasi penurunan nilai pasar pada aset bersangkutan, kemudian mengukur nilai terpulihkan aset. Jika nilai terpulihkan tersebut lebih rendah dari nilai tercatat aset maka perusahaan harus menyesuaikan nilai aset bersangkutan dan mengakui adanya kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai ini akan berdampak pada besarnya laba sehingga akan menurunkan laba yang dilaporkan oleh perusahaan perbankan di dalam laporan keuangannya. Berdasarkan hal inilah maka pengungkapan informasi instrumen keuangan sangatlah penting.

Namun, pada praktiknya dalam industri perbankan, terdapat beberapa *impact* yang dirasakan dari pemberlakuannya PSAK mengenai instrumen keuangan tersebut, diantaranya :

#### 1. Masalah *Loan Loss Provisioning* (LLP)

LLP atau penyisihan kerugian kredit merupakan cadangan kerugian atas portfolio kredit dan pendanaannya yang mengalami penurunan nilai ekonomi, dimana nilai ekonomi dan pendanaan dapat berfluktuatif disebabkan karena adanya perubahan pada kualitas kredit yaitu masalah *willingness to pay* dan *ability to pay*. Sejak berlakunya PSAK 50 revisi pertama, konsep yang digunakan dalam menentukan besarnya LLP beralih dari *expectation loss* menjadi *incurred loss*, karena konsep terdahulu memudahkan bank melakukan *window dressing* dalam laporan keuangannya. Dengan menggunakan konsep terkini, bank dituntut untuk menentukan LLP dengan menggunakan data historis kerugian kredit yang sudah terjadi sehingga laporan keuangan perbankan mencerminkan keadaan yang sebenarnya (*faithfulness representation*). Hal inilah yang dikeluhkan bank dalam penentuan LLP karena keharusan bank untuk memiliki data historis tentang pengalaman kerugian dari setiap jenis kredit bank minimal tiga tahun.

#### 2. Masalah sumber pendapatan bunga bank

Dengan adanya penerapan Standar Akuntansi Keuangan mengenai instrumen keuangan, bagi industri perbankan dapat mengurangi sumber pendapatan bunga bank, karena :

- a) Bunga dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bunga, karena reklasifikasi bunga SBI ini

berdampak pada bank yang banyak menempatkan dananya di luar kredit dengan ciri rasio pinjaman terhadap dana (LDR-nya) yang relatif kecil.

- b) Pendapatan provisi dan komisi kredit kini menjadi pengurang nilai kredit guna menghitung pendapatan bunga efektif.
- c) Kredit sebagai aset bank digolongkan sebagai "*Loan and Receivables*" yang mana valuasinya adalah dengan cara biaya diamortisasi, hal ini membawa konsekuensi bahwa nilai kredit (aset bank) akan mempengaruhi proyeksi *cashflow* dari aset tersebut, sehingga kredit yang dikenakan bunga dibawah bunga pasar akan terdiskon menjadi lebih kecil dari harga perolehannya (kredit yang dicairkan).

Sebagai sub sektor yang berpengaruh dalam perekonomian Indonesia, baik dalam hal stabilitas keuangan, pengendalian inflasi, sistem pembayaran, serta otoritas moneter, mendorong entitas perbankan untuk semakin meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangannya. Pentingnya pelaporan keuangannya perbankan terutama untuk penyajian serta pengungkapan instrumen keuangan yang merupakan pondasi fundamental transaksi. Pondasi terpentingnya, bahwa seluruh jenis instrumen keuangan perbankanlah yang meramaikan eksistensi dunia perbankan dari waktu ke waktu.

Selain berpegang pada PSAK, entitas perbankan juga harus menerapkan Peraturan No.VIII G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 pada tanggal 25 Juni 2012, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) untuk bank konvensional serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) untuk bank yang menjalankan praktik keuangan secara syariah. Namun belum ada pembaharuan terhadap PAPI yang sesuai dengan PSAK 50 dan 60 revisi 2010. PAPI dikeluarkan pada tahun 2008 sebelum disetujuinya PSAK mengenai instrumen keuangan yang terbaru tahun 2010.

Perbankan dituntut untuk memberikan informasi penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan pada laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Perbankan juga ditantang untuk mengatasi berbagai masalah terhadap dampak yang muncul dari penerapan standar instrumen keuangan tersebut sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan komprehensif bagi pihak yang berkepentingan dan mencerminkan optimal kinerja perbankan secara utuh.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap emiten perbankan di Indonesia dengan judul "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan tentang Instrumen Keuangan Kesesuaian Terhadap Standar Penyajian dan Pengungkapan Pada Laporan Keuangan Emiten Sub Sektor Perbankan Periode 2012-2014".

## **1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah**

### **1.2.1. Perumusan Masalah**

Penelitian dan penulisan skripsi ini dikembangkan dari permasalahan sebagai berikut: Perbankan sebagai “*highly regulated industry*” harus menyajikan informasi instrumen keuangan sesuai dengan peraturan regulator bersangkutan dan semua entitas tanpa terkecuali memiliki aset dan liabilitas keuangan. Untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, misalnya perbankan, aset dan liabilitas keuangan (dikenal dengan instrumen keuangan) merupakan komponen terbesar laporan posisi keuangan (Dwi Martani,166).

### **1.2.2. Identifikasi Masalah**

Pada bagian identifikasi masalah ini akan dibahas tentang masalah apa saja yang timbul dan batasan penelitian bagi penulis. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, untuk membatasi permasalahan, penulis akan meneliti mengenai penerapan standar akuntansi instrumen keuangan penyajian dan pengungkapan pada emiten sub sektor perbankan, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan emiten perbankan yang terdaftar di BEI telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan ?
2. Apakah penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan emiten perbankan yang terdaftar di BEI telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tentang penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan ?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai kepatuhan kesesuaian penyajian dan pengungkapan serta pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan pada laporan keuangan entitas sub sektor perbankan di Indonesia berdasarkan PSAK 50, 60 (revisi 2010) dan 55 (revisi 2011) untuk laporan keuangan periode 2012-2014.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan emiten perbankan yang terdaftar di BEI sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan,
2. Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan emiten perbankan di BEI yang terdaftar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tentang penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan hasil dari penelitian yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis; dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, kecintaan terhadap dunia akuntansi dan mengembangkan ilmu yang dimiliki dalam bidang akuntansi agar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi wajah pendidikan akuntansi Indonesia di masa depan.
2. Bagi Instansi Perbankan; melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada entitas perbankan dalam mengukur kesiapan perusahaan untuk menyajikan dan mengungkapkan transaksi instrumen keuangannya sesuai dengan standar yang telah diterbitkan oleh DSAK IAI yaitu PSAK 50 dan PSAK 60, sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan atau perubahan yang dianggap perlu, demi tercapainya output informasi yang relevan, andal dan *faithfulness representation*.
3. Bagi Organisasi Profesi; hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan manajemen perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diadopsi dari IFRS oleh organisasi profesi yang berkepentingan seperti IAI, DSAK dan organisasi lainnya dalam rangka menyukseskan program konvergensi IFRS sehingga laporan keuangan Indonesia dapat bertaraf dan memiliki daya banding internasional.
4. Bagi Akademis; dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna sebagai bahan acuan perbandingan dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang sama dalam penelitian yaitu mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan tentang instrumen keuangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Standar Umum Akuntansi Keuangan tentang Pengakuan dan Pengukuran**

Standar umum akuntansi keuangan tentang pengakuan dan pengukuran merupakan salah satu ruang lingkup pembahasan yang terdapat pada KDPPLK (Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan) yang mengadopsi langsung *conceptual framework* IAS serta digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum.

##### **a. Pengakuan**

Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dengan kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantulkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui di dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan (KDPPLK,2012,16).

##### **b. Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu (KDPPLK,2012,19).

#### **2.1.1. Aset dan Liabilitas**

##### **a. Aset**

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Aset diakui dalam neraca jika: (1). Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya dimasa depan diperoleh entitas atau (2). Aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (KDPPLK,2012,20). Sedangkan untuk dasar pengukuran aset yang berbeda dalam derajat dan kombinasi dalam laporan keuangan diantaranya :

1. Biaya historis, yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
2. Biaya kini, yaitu aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang.
3. Nilai realisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*).
4. Nilai sekarang, yaitu aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.

## b. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban (liabilitas) adalah bahwa perusahaan mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan.

Namun, kewajiban juga timbul dari praktek bisnis yang lazim, kebiasaan dan keinginan untuk memelihara hubungan bisnis yang baik atau bertindak dengan cara yang adil. Jika misalnya sebagai suatu kebijakan, perusahaan memutuskan untuk menarik kembali produknya yang cacat meskipun masa garansi sebenarnya telah lewat, jumlah yang diharapkan akan dibayarkan tersebut merupakan kewajiban (KDPPLK,2012,13).

Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa (1). Pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan (2). Jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal (KDPPL,2012,21). Dalam praktek, kewajiban menurut kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak (misalnya, kewajiban atas pesanan persediaan yang belum diterima) pada umumnya tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan.

Namun demikian, kewajiban semacam itu dapat memenuhi definisi kewajiban dan dalam keadaan tertentu kriteria pengakuan terpenuhi, maka kewajiban tersebut dapat dianggap memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini, pengakuan kewajiban mengakibatkan pengakuan aset atau beban yang bersangkutan.

Sedangkan dalam pengukuran kewajiban, terdapat dasar yang berbeda seperti halnya perbedaan pengukuran pada aset diantaranya :

1. Biaya historis, yaitu kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau dalam keadaan tertentu, dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.
2. Biaya kini, yaitu kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang.
3. Nilai realisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*) bahwa kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.
4. Nilai sekarang (*present value*) yaitu kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

### 2.1.2. Relevan

FASB (Financial Accounting Standard Board) mendefinisikan kata relevan sebagai “membuat suatu perbedaan” dengan kata lain sebuah informasi akuntansi haruslah mampu membuat perbedaan dalam mengambil keputusan. Relevan merupakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berkaitan dengan kegunaan informasi dalam pengambilan keputusan. Relevan adalah mampu membuat keputusan yang berbeda dengan membantu pengguna (user) untuk membentuk prediksi tentang kejadian masa lalu (*past*), sekarang (*present*), dan yang akan datang (*future*) atau untuk memperkuat dan memprediksi ekspektasi (SFAC No.2). Karakteristik relevan memiliki beberapa komponen penting, diantaranya :

- 1) *Predictive value*, yaitu informasi berguna untuk memprediksi
- 2) *Feedback value*, yaitu berhubungan dengan memperkuat atau memperbaiki ekspektasi sebelumnya oleh para pembuat keputusan, hal ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban.

Peran informasi dalam peramalan dan penegasan berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika dapat meramalkan kemampuan entitas dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan.

Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan terhadap prediksi masa lalu. Nilai wajar memiliki relevansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai harga perolehan/*historical cost* dalam membantu mengambil keputusan ekonomi bagi para investor.

### 2.1.3. Keandalan

Menurut Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan, agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithfulness representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut (KDPPLK,2012,7).

## 2.2. Standar Umum Akuntansi Keuangan tentang Penyajian dan Pengungkapan

Laporan keuangan harus menggambarkan atau menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas. Penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai akan menghasilkan laporan keuangan yang wajar dan pengungkapan yang lengkap.

### 2.2.1. Lengkap

Agar dapat diandalkan informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan mempertimbangkan biaya penyusunan. Kesengajaan untuk

tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi (KDPPLK,2012,21).

### 2.2.2. Mudah Dipahami

Penyajian laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi (Dwi Martani,2012,37). Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (KDPPLK,2012,20).

### 2.3. Standar Akuntansi Keuangan tentang Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan mengenai instrumen keuangan mencakup diantaranya : PSAK 50: Penyajian Instrumen Keuangan, PSAK 55: Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan, PSAK 60: Pengungkapan Instrumen Keuangan, PSAK 48: Penurunan Nilai Aset dan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.

#### 2.3.1. Umum

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain (PSAK 50,2010,6). Berikut adalah standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan :

1. PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian adopsi dari IAS 32 *Financial Instrument: Presentation*
2. PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran adopsi dari IAS 39 *Financial Instrument: Recognition and Valuation*
3. PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan adopsi dari IFRS 7 *Financial Instrument: Disclosure*

Konvergensi PSAK dengan IFRS menyebabkan semua standar yang berkaitan dengan instrumen keuangan dicabut dan diganti dengan tiga standar diatas. Beberapa standar terkait instrumen keuangan yang dicabut diantaranya :

1. PSAK 41 Akuntansi Waran
2. PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang
3. PSAK 54 Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah
4. PSAK 30 Akuntansi Perbankan
5. PSAK 42 Akuntansi Perusahaan Efek
6. PSAK 49 Akuntansi Reksa Dana

Dwi Martani (2012,165) mengatakan bahwa pencabutan tersebut menyebabkan tidak ada pengaturan untuk industri tertentu. Karena standar lebih menekankan pada substansi transaksi dan komponen yang dilaporkan bukan pada jenis industri entitas. Pengaturan akuntansi yang ada dalam standar lama diubah mengikuti aturan dalam PSAK baru.

Standar akuntansi berdasarkan IFRS banyak menggunakan dasar penilaian nilai wajar dimana hal ini berdampak besar dalam penerapan akuntansi instrumen keuangan dalam praktik, penilaian dalam menggunakan nilai wajar diatur dalam

PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar, sedangkan untuk penurunan nilai aset yang terjadi dalam aset keuangan diatur dalam PSAK 48 : Penurunan Nilai Aset.

### 2.3.2. Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menerbitkan PSAK 55 mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. PSAK 55 ini telah mengalami 3 kali revisi, yaitu tahun 2006, 2011 dan 2013. Revisi tahun 2006 sejalan dengan IAS 39 *Financial Instrument: Recognition and Measurement*, kemudian sejalan dengan IASB mengeluarkan IFRS 9 pada tahun 2011 untuk menggantikan IAS 39. Beberapa bagian IFRS tersebut telah selesai didiskusikan namun ada beberapa bagian yang belum dibahas sehingga IFRS tersebut belum berlaku secara keseluruhan. DSAK menerbitkan PSAK 55 (revisi 2011) dengan mendasarkan pada perubahan IFRS 9 yang telah selesai dibahas. Beberapa perubahan juga dibahas dalam revisi ini yang mendasarkan pada IFRS 9 diantaranya klasifikasi aset keuangan, reklasifikasi aset keuangan dan metode penghitungan penurunan nilai aset keuangan.

Revisi PSAK ini berdampak besar terhadap perusahaan perbankan karena sangat erat hubungannya dengan instrumen keuangan. Selain itu, salah satu yang terkena dampak dari PSAK 55 revisi 2011 ini ialah penurunan nilai (*impairment*) dan tidak tertagihnya aset keuangan. Secara umum perubahan yang terjadi pada PSAK 55 diantaranya :

Tabel 1.  
Ikhtisar Perbedaan PSAK 55

Perihal	PSAK 55 (revisi 2013)	PSAK 55 (revisi 2011)	PSAK 55 (revisi 2006)
Pengungkapan atas pengukuran atas nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan	Pengungkapan atas pengukuran nilai wajar sesuai PSAK 68 : Pengukuran Nilai Wajar	Tidak diatur	Tidak diatur
Tanggal pencatatan instrumen keuangan saat nilai wajar pada saat pengakuan berbeda dengan harga transaksi (sesuai paragraf 43A).	Entitas mencatat instrumen keuangan pada tanggal sebagai berikut : pada tanggal pengukuran (a). Yang disyaratkan oleh paragraf 43 jika nilai wajar dapat dibuktikan dengan adanya harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis. Pada tanggal setelah (b). Pengakuan awal, entitas harus mengakui bahwa selisih yang ditangguhkan sebagai keuntungan atau kerugian hanya sebatas pada selisih yang timbul dari perubahan faktor (termasuk waktu) yang diperhitungkan pelaku pasar ketika menilai aset atau liabilitas.	Tidak diatur	Tidak diatur

Sumber data : PSAK 55 Revisi 2013 dan 2011

#### A. Klasifikasi Aset Keuangan

PSAK 55 revisi 2011 mengklasifikasikan aset keuangan menjadi empat kategori yaitu :

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/*Fair Value To Profit or Loss (FVTPL)*.

FVTPL adalah aset keuangan yang dimaksudkan untuk dijual kembali dalam waktu dekat, dimaksudkan untuk diperdagangkan, dalam ketentuan standar lama menyebut kelompok ini sebagai *trading securities* atau surat berharga diperdagangkan.

FVTPL umumnya berbentuk investasi dalam surat berharga baik saham, obligasi, maupun instrumen keuangan jangka pendek lainnya

termasuk bentuk *derivative* seperti opsi, namun *derivative* yang ditetapkan untuk lindung nilai dan efektif tidak masuk dalam kategori ini. Menurut PSAK 55 (revisi 2011) aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika memenuhi salah satu kondisi berikut:

- a. Diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Diperoleh atau dimiliki untuk dijual atau dibeli dalam waktu dekat; merupakan bagian dari portfolio instrumen keuangan; merupakan derivatif yang bukan instrumen lindung nilai.
- b. Pada saat pengakuan awal telah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Entitas menggunakan penetapan ini jika ketika melakukannya akan menghasilkan informasi yang lebih relevan.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.

## 2. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo/*Held To Maturity* (HTM)

HTM/*Held To Maturity* adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. HTM pada saat pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Setelah pengakuan awal investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan nilai yang ada.

## 3. Pinjaman yang Diberikan atau Piutang/*Loan and Receivable* (L/R)

Pinjaman yang diberikan adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran yang telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi pasar aktif, kecuali yang termasuk dalam tiga kategori aset keuangan yang lain. Pada saat pengakuan awal, L/R diakui pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai, bunga diakui dengan suku bunga efektif, terkecuali untuk piutang jangka pendek dimana pengakuan bunganya tidak material.

## 4. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/*Available For Sale* (AFS)

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL, HTM dan L/R. Jika tidak termasuk dalam tiga kategori aset keuangan sebelumnya maka akan diklasifikasikan sebagai AFS.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian pada perubahan nilai wajarnya dilaporkan pada komponen terpisah pada ekuitas sampai pada saat aset keuangan tersebut diselesaikan dan akumulasi keuntungan dan kerugian tersebut diakui pada laporan laba rugi.

## B. Liabilitas Keuangan

PSAK 55 revisi 2011 mengklasifikasikan liabilitas keuangan menjadi dua kategori yaitu :

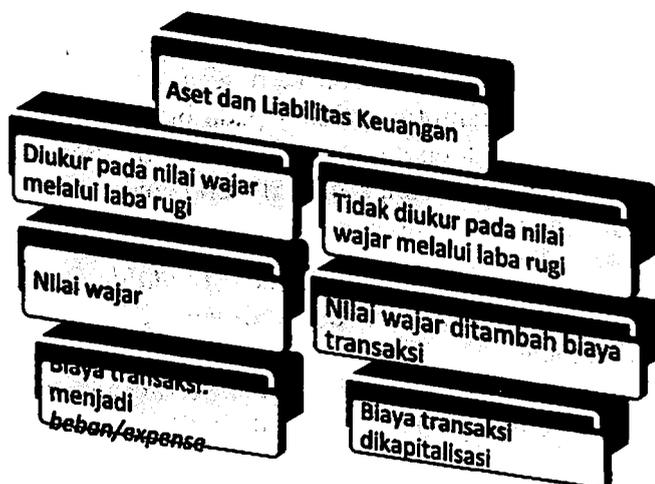
1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi  
Yaitu liabilitas keuangan baik yang dimiliki untuk diperdagangkan (misalnya dibeli kembali dalam waktu dekat pada masa mendatang) atau ditetapkan pada saat pengakuan telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, misalnya seperti liabilitas derivatif dan liabilitas diperdagangkan lainnya.
2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi  
Semua liabilitas lainnya selain daripada liabilitas yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi seperti utang usaha, utang wesel, dan efek utang yang diterbitkan.

## C. Pengakuan Instrumen Keuangan

Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Jika menurut definisi instrumen keuangan, maka saat kontrak tersebut mengindikasikan adanya suatu aliran manfaat ekonomi diterima atau diserahkan di masa mendatang dan diukur dengan andal, maka kontrak tersebut akan dicatat sebagai aset atau liabilitas keuangan (PSAK 55,2011,16).

## D. Pengukuran Instrumen Keuangan

Pengukuran aset dan liabilitas keuangan dibagi menjadi dua yaitu pengukuran pada saat pengakuan awal dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pengukuran menggunakan dasar nilai wajar, namun saat dasar nilai wajar tidak dapat diperoleh maka dapat menggunakan nilai perolehan atau nilai tercatat (PSAK 55,2011,29).



Gambar 2.

Pengukuran Instrumen Keuangan pada Pengukuran Awal

PSAK 55 revisi 2011 mendefinisikan biaya transaksi (*transaction costs*) sebagai biaya-biaya tambahan, seperti biaya pendaftaran; komisi lain yang

ditetapkan; biaya yang dibayarkan kepada penasehat hukum, akuntan, dan penasehat profesional lainnya; biaya percetakan; materai; fee atau komisi yang dibayarkan kepada agen penjual; konsultan; perantara efek dan pedagang efek; pungutan wajib yang dilakukan oleh pihak regulator dan bursa efek; pajak dan bea yang dikenakan. Biaya transaksi ini tidak mencakup premium dan diskonto utang; biaya pendanaan; biaya penyimpanan, dan biaya administrasi internal.

Setelah pengakuan awal, instrumen keuangan akan diukur dengan berbagai cara sesuai dengan jenisnya. Definisi dan klasifikasi masing-masing instrumen keuangan sangatlah penting untuk diperhatikan karena klasifikasi yang berbeda memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda.

Tabel 2.  
Pengukuran Instrumen Keuangan Setelah Pengukuran Awal

Klasifikasi	Penilaian	Biaya Transaksi	Perubahan Nilai Wajar	Bunga dan Dividen	Penurunan Nilai
FVTPL	Nilai wajar	Dibebankan	Laba atau rugi	Laba atau rugi	Otomatis ( <i>by default</i> )
HTM	Biaya Diamortisasi	Dikapitalisasi	-	Laba rugi	Laba rugi
L/R	Biaya Diamortisasi	Dikapitalisasi	-	Laba rugi	Laba rugi
AFS: Utang	Nilai wajar	Dikapitalisasi	Pendapatan komprehensif lain	Laba rugi	Laba rugi
AFS: Ekuitas	Nilai wajar	Dikapitalisasi	Pendapatan komprehensif lain	Laba rugi	Laba rugi
AFS: Ekuitas (tidak dapat diukur dengan andal)	Harga Perolehan	Dikapitalisasi	-	Laba rugi	Laba rugi

Sumber data : diolah penulis

Pada saat kontrak berakhir, aset keuangan tidak lagi diakui dalam laporan posisi keuangan. Namun entitas dapat mentransfer aset keuangan pada pihak lain sebelum kontrak berakhir. Standar menjelaskan entitas menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika :

1. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

## 2. Entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan

Pada saat terjadi transfer aset keuangan, penghentian pengakuan terjadi jika entitas telah mentransfer hak untuk menerima arus kas serta secara substansi telah memindahkan semua resiko dan *reward* kepada pihak lain. Entitas akan menghentikan pengakuan jika tidak lagi menahan resiko dan *reward* serta tidak memiliki pengendalian terhadap aset keuangan tersebut. Jika kriteria penghapusbukuan (*derecognition*) terpenuhi maka aset keuangan dihapus dari pencatatan entitas.

### E. Penurunan Nilai

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal (PSAK 55 Revisi 2011).

Kerugian penurunan nilai terjadi pada saat kelompok aset keuangan diturunkan nilainya. Jika terjadi bukti objektif dari penurunan nilai tersebut akibat dari satu atau lebih peristiwa setelah pengakuan awal dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada arus kas masa depan maka perusahaan sudah mengalami penurunan nilai pada kelompok aset keuangannya. Pada dasarnya penurunan nilai suatu perusahaan sulit diidentifikasi dan jika terjadi merupakan dampak dari kombinasi beberapa peristiwa.

Menurut PSAK 55 paragraf 66 terdapat 6 peristiwa yang menyebabkan penurunan nilai terjadi :

- a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam.
- b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga.
- c) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut.
- d) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.
- e) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- f) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud. Termasuk memburuknya status pembayaran pihak peminjam dan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Peristiwa-peristiwa diatas adalah bukti objektif yang dapat menyebabkan penurunan nilai suatu lembaga perbankan. Jika salah satu dari penyebab penurunan nilai sudah terpenuhi, maka perusahaan sudah melakukan perhitungan penurunan nilai. Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti penurunan nilai dengan cara individual dan kolektif. Penurunan nilai diatur dalam PSAK 68 revisi 2009 yang diadopsi dari IAS 36 *impairment of assets* dan berlaku efektif pada 2 Januari 2011,

kemudian pada tahun 2013, PSAK 68 mengalami revisi dan efektif per 1 Januari 2015.

Tabel 3.  
Perbedaan PSAK 48 revisi 2009 dan 2013

Perihal	PSAK 48 (2013)	PSAK 48 (2009)
Pengukuran nilai wajar dikurangi biaya pelepasan	Pengukuran nilai wajar dikurangi biaya pelepasan mengacu pada hierarki nilai wajar dalam PSAK 68	Memberikan pengaturan mengenai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.
Pengungkapan	<p>Memberikan tambahan persyaratan pengungkapan untuk setiap aset individual atau unit penghasil kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas) dan apakah jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas) merupakan nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakainya; dan</li> <li>• Jika jumlah terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, entitas mengungkapkan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Tingkat hierarki nilai wajar sesuai dengan PSAK 68</li> <li>(ii) Teknik penilaian (level 2 dan 3); dan</li> <li>(iii) Setiap asumsi utama yang mendasari manajemen untuk menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. (level 2 dan 3).</li> </ol> </li> </ul>	Memberikan persyaratan pengungkapan untuk setiap rugi penurunan nilai material yang diakui atau dibalik selama periode aset individual (termasuk <i>goodwill</i> dan unit penghasil kas)

Sumber data : PSAK 48 revisi 2013

### 2.3.3. Penyajian dan Pengungkapan Instrumen Keuangan

Standar Penyajian dan Pengungkapan Instrumen Keuangan diatur dalam PSAK 50 dan 60. Perbedaan PSAK 50 revisi 2006 dengan 2010 selain pemisahan pengungkapan instrumen keuangan juga terdapat persyaratan penyajian untuk

*puttable instrument* (instrumen dengan opsi jual), kewajiban untuk menyerahkan bagian aset neto secara pro rata pada saat likuidasi dan reklasifikasi dari liabilitas keuangan ke instrumen ekuitas, demikian sebaliknya. Sedangkan PSAK 60 yang diadopsi dari IFRS 7 versi 2009 ini mengatur mengenai pengungkapan informasi instrumen keuangan agar pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan termasuk diantaranya pengungkapan kebijakan akuntansi, akuntansi lindung nilai, nilai wajar serta pengungkapan jenis dan tingkat resiko yang ditimbulkan dari transaksi instrumen keuangan juga bagaimana entitas mengelola resiko tersebut.

#### A. Penyajian Instrumen Keuangan

Tujuan dari penerbitan PSAK 50 ini adalah untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Penyajian instrumen keuangan yang diatur di dalam PSAK 50 revisi 2010 diantaranya :

Tabel 4.  
Persyaratan Penyajian Instrumen Keuangan

Perihal	Uraian
Penyajian Instrumen Keuangan	1. Penyajian kategori instrumen dan komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan atau instrumen ekuitas
	2. Penyajian instrumen yang mempunyai fitur opsi jual ( <i>puttable instrument</i> )
	3. Penyajian instrumen serta komponennya yang mensyaratkan suatu kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian aset neto entitas secara pro rata pada saat likuidasi
	4. Ketentuan penyelesaian kontijensi
	5. Penyajian reklasifikasi instrumen keuangan
	6. Penyajian instrumen keuangan majemuk
	7. Penyajian saham treasury
	8. Penyajian bunga, dividen, kerugian dan keuntungan yang berkaitan dengan instrumen keuangan
	9. Penyajian saling hapus antar aset keuangan dan liabilitas keuangan

Sumber data : diolah penulis

Berdasarkan paragraph 7 PSAK 50 menyatakan bahwa suatu instrumen dikategorikan sebagai instrumen ekuitas, jika dan hanya jika kedua kondisi berikut ini terpenuhi :

A. Instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual:

1. Untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau

2. Untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit.
- B. Jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut merupakan :
1. Nonderivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
  2. Derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas.

Untuk tujuan ini, *rights*, opsi atau waran untuk memperoleh suatu jumlah yang tetap instrumen ekuitas yang dimiliki entitas untuk jumlah yang tetap dari berbagai mata uang adalah instrumen ekuitas jika entitas menawarkan *rights*, opsi atau waran prorata terhadap semua pemilik yang ada saat ini pada kategori yang sama pada instrumen ekuitas nonderivatif yang dimiliki. Sedangkan, aset keuangan dengan kategori :

1. Kas (baik dalam bentuk kas di dalam perusahaan dalam bentuk tunai maupun disimpan di bank);
2. Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain (bentuk investasi dalam saham yang akan dijual dalam jangka waktu dekat);
3. Hak Kontraktual,
  - a) Untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain;
  - b) Untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung;
4. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan :
  - a) Nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima sejumlah yang bervariasi dari instrumen yang diterbitkan entitas; atau
  - b) Derivatif yang akan mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas (tidak termasuk *puttable instrument*).

Liabilitas keuangan terdiri dari kategori :

1. Liabilitas kontraktual;
  - a) Untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain
  - b) Untuk mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi tidak menguntungkan entitas.
2. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan :
  - a) Nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah yang bervariasi dari instrumen yang diterbitkan entitas; atau
  - b) Derivatif yang akan mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan kas dalam jumlah tertentu atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas.

## B. Pengungkapan Instrumen Keuangan

PSAK 60 diterbitkan dengan tujuan adalah mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi :

- (a) Signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan entitas; dan
- (b) Jenis dan besarnya risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut.

Tabel 5.

### Pengungkapan Instrumen Keuangan atas Posisi dan Kinerja Keuangan

Pengungkapan dalam Laporan Posisi Keuangan	Pengungkapan dalam Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	Pengungkapan Lain
Kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan	Keuntungan dan kerugian neto atas semua klasifikasi instrumen keuangan	Kebijakan akuntansi
Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Total penghasilan bunga dan total bunga yang dihitung dengan suku bunga efektif	Akuntansi lindung nilai
Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Penghasilan dan beban imbalan yang timbul dari FVPL	Nilai wajar
Reklasifikasi	Penghasilan bunga dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai yang diakruai	Jenis dan tingkat resiko
Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan	Jumlah kerugian penurunan nilai untuk setiap kelas aset keuangan	
Agunan		
Akun penyisihan kerugian kredit		
Instrumen majemuk dengan beberapa derivatif melekat		
Gagal bayar dari pelanggan		

Sumber data : diolah penulis

## C. Penentuan Nilai Wajar

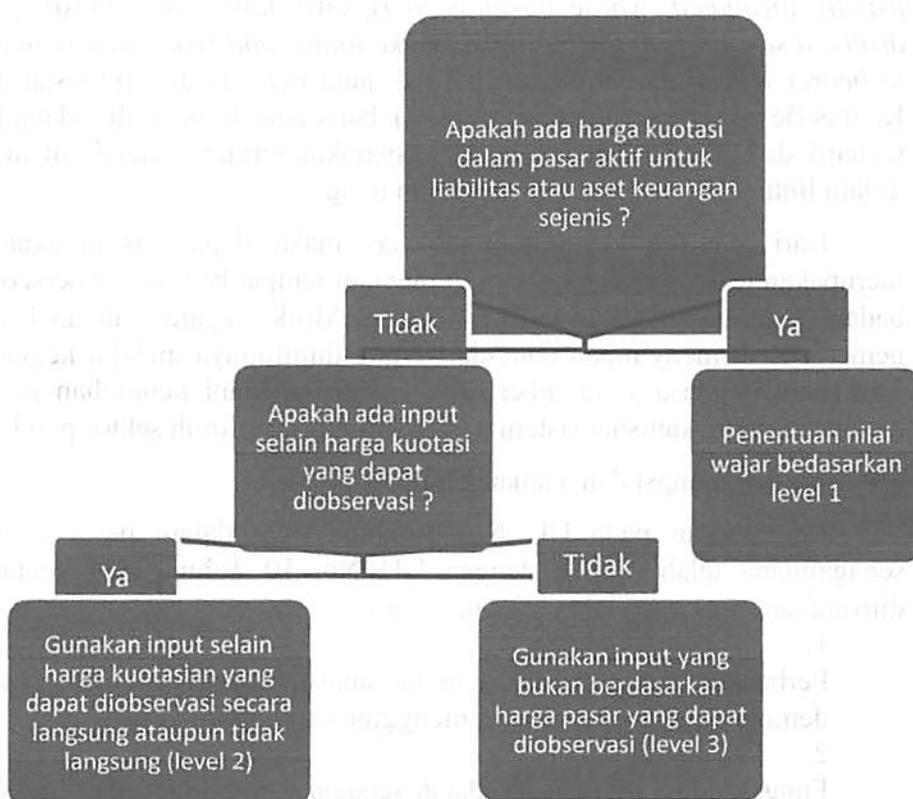
Berdasarkan PSAK 60 revisi 2010 mensyaratkan bahwa setiap entitas perlu melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen keuangan yang dimilikinya berdasarkan hierarki berikut ini :

1. Level 1: Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk instrumen yang serupa. Untuk aset keuangan yang dimiliki, nilai wajar yang digunakan adalah *bid price* (harga penawaran). Sedangkan untuk kewajiban keuangan yang dimiliki, nilai wajar yang

digunakan adalah *ask price* (harga permintaan). Jika instrumen keuangan tersebut tidak memiliki harga kuotasi pasar aktif, maka digunakan teknik penilaian dalam menentukan nilai wajarnya.

2. Level 2: Teknik penilaian yang berdasarkan input yang dapat diobservasi termasuk dalam kategori ini adalah instrumen yang dinilai menggunakan harga kuotasi pada pasar aktif untuk instrumen serupa; harga kuotasi untuk instrumen serupa pada pasar yang dianggap kurang aktif atau teknik penilaian dimana semua input yang signifikan didapatkan secara langsung atau tidak langsung dari data pasar yang diobservasi.

3. Level 3: Teknik penilaian menggunakan input yang tidak dapat diobservasi. Termasuk dalam kategori ini adalah semua instrumen dimana input untuk teknik penilaian yang digunakan tidak berdasarkan pada data yang dapat diobservasi dan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi memiliki dampak yang signifikan terhadap penilaian instrumen. Termasuk dalam kategori ini adalah instrumen yang dinilai berdasarkan harga kuotasi untuk instrumen serupa dimana penyesuaian atau asumsi yang tidak dapat diobservasi secara signifikan diperlukan untuk menggambarkan perbedaan antara instrumen-instrumen yang ada.



Gambar 3.  
Hierarki Penentuan Nilai Wajar berdasarkan PSAK 68

## 2.4. Entitas Perbankan

### 2.4.1. Pengertian Sub Sektor Perbankan

Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, jikapun ada perbedaannya hanya akan tampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut. Dibawah ini akan dikemukakan beberapa definisi bank oleh beberapa ahli sebagai berikut :

Bank sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, manapun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran dan tempat uang giral (Verryn Stuart,2010,54).

Menurut A.Abdurrahman (2001,59) dalam Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan mendefinisikan bank sebagai suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Dalam Black's Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai "*An institution, usually incopated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes*". Tidak jauh berbeda dari rumusan diatas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, Badan-Badan Usaha Milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya melalui kegiatan perkreditan serta berbagai jasa yang diberikan dengan melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian.

### 2.4.2. Sistem, Fungsi dan Tujuan Entitas Perbankan

Berdasarkan pada UU No. 7 tahun 1992 dalam pasal 2, 3 dan 4 yang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan asas, fungsi dan tujuan, yaitu :

#### 1. Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

#### 2. Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

#### 3. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Adapun, menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam bukunya memahami bisnis bank, menyatakan bahwa fungsi umum perbankan terdiri atas :

## 1. Fungsi Umum

### A. Penghimpun dana

Secara garis besar, dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari :

- a) Masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk simpanan, berupa tabungan, deposito dan giro;
- b) Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan *call money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam);
- c) Pemilik modal yang berupa setoran awal pendirian maupun pengembangan modal.

### B. Penyalur dana

Dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank, kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap dan sebagainya.

### C. Pelayanan jasa keuangan

Dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu lintas pembayaran uang”, bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti pengiriman uang/*transfer*, inkaso, penagihan surat berharga/*collection*, cek wisata, kartu kredit, kartu debit, transaksi tunai dan layanan perbankan lainnya. Dengan melaksanakan fungsi ini, diharapkan bank dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, selain memperoleh sumber pendapatan berupa komisi, bunga atau bagi hasil.

## 2. Fungsi Khusus

Fungsi khusus dalam dunia perbankan berkaitan dengan fungsi bank sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agen of service*.

### A. *Agent of trust*

Yaitu lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*) baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Dalam fungsi ini, harus dibangun kepercayaan yang bergerak ke dua arah, yaitu dari dan ke masyarakat.

### B. *Agent of development*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan bank berupa menghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor rill. Kegiatan bank tersebut antara lain memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa, mengingat kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

### C. *Agent of services*

Yaitu lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat, seperti pengiriman uang/*transfer*, inkaso, penagihan usaha surat berharga/*collection* dan pelayanan lainnya.

### 2.4.3. Produk Pelayanan Entitas Perbankan

Selain pokok dari entitas perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Hermansyah (2010,32), pokok bahasan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan diantaranya :

#### 1. Pengiriman uang (*transfer*)

Pengiriman uang (*transfer*) adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga atau perorangan) di tempat lain baik dalam negeri ataupun luar negeri. *Transfer* dapat dilakukan baik melalui *mail transfer*, *telegrafic transfer*, wesel tunjuk atau dengan cek dan *electronic funds transfer system* melalui ATM (M.Djurnhana,2010,56).

#### 2. Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran (ekspektasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, kuitansi, surat aksep (*promissory notes*), surat undian, *money order*, kupon, dividen dan nota-nota tagihan lainnya.

#### 3. Kliring

Menurut Kamus Perbankan Indonesia, kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Tujuan pokok diadakannya kliring adalah untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral dan merupakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank.

Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-bank di suatu wilayah kliring yang disebut kliring lokal. Wilayah kliring adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan itu, untuk wilayah-wilayah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia, maka penyelenggara kliring diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Tentu bank yang ditunjuk sebagai penyelenggara kliring harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksanaan, ruangan kantor dan peralatan komunikasi.

#### 4. Bank Garansi

Kata garansi berasal dari bahasa Belanda *garantie* yang berarti jaminan. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, dalam arti bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima

jaminan dalam rangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa bank garansi adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Dalam arti bahwa, bank menjamin nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban apabila nasabah yang bersangkutan di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Bank garansi diberikan oleh bank kepada nasabah untuk tujuan membantu nasabah yang akan melakukan suatu transaksi tertentu yang tidak membutuhkan kredit dari bank.

#### 5. *Save Deposit Box* (Kotak Pengaman Simpanan)

Kotak pengaman simpanan atau *safe deposit box* adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan boks dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dalam jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci boks pengaman tersebut.

#### 6. *Credit card* (kartu kredit)

*Credit card* adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (*cash advance*) (Suryohadibroto, 2009, 98).

#### 7. Perdagangan Valuta Asing (valas)

Menurut Thomas Suyatno, transaksi dalam perdagangan valuta asing terdiri dari :

- a) Transaksi tunai (*spot*), yaitu transaksi jual beli valuta asing yang penyerahan masing-masing valuta yang diperjualbelikan tersebut umumnya dilaksanakan setelah dua hari kerja berikutnya dari saat transaksi terjadi.
- b) Transaksi tunggak (*forward*) adalah transaksi yang dilakukan antara suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan penyerahan batas waktu (*maturity date*) nya dilaksanakan pada suatu waktu yang akan datang.
- c) Transaksi barter (*swap*) adalah kombinasi dari membeli dan menjual mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak, yaitu pembelian dan penjualan suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang dilakukan secara bersamaan/simultan dengan batas waktu yang berbeda.

#### 8. Kustodian

Menurut ketentuan Undang-undang pasar modal, merumuskan bahwa kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal tersebut bahwa yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek atau bank umum

yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Bank umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam disebut bank kustodian.

#### 9. *Letter of Credit* (L/C) dalam Transaksi Perdagangan dalam Negeri dan Luar Negeri

Mengenai *letter of credit* terdapat beberapa istilah yang digunakan, antara lain *crediet brief* (bahasa Belanda), *letter de credit* (bahasa Perancis), *accreditief* (Bahasa Jerman), dan dalam praktik istilah yang paling lazim digunakan adalah l/c atau *letter of credit*.

*Letter of credit* adalah suatu instrumen pembayaran perbankan yang sangat penting yang digunakan sebagai sarana untuk memudahkan penyelesaian utang piutang. (Amir M.S,2009,56)

Dari pendapat diatas, maka pada dasarnya *letter of credit* adalah suatu instrumen perbankan yang berbentuk suatu surat (kontrak antara importir dan eksportir) yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa tersebut dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut.

#### 2.4.4. Surat Berharga dalam Entitas Perbankan

H.M.N. Purwosutjipto (2012,66) berpendapat bahwa surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak, dan mudah diperjualbelikan. Surat-surat berharga (*negotiable instrument*) adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat pembayaran yang di dalamnya berisi suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya atau pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan (Munir Fuady,2009,34).

Pengertian lain, surat berharga adalah surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan, atau surat-surat yang bersifat dan memiliki nilai seperti uang tunai dan dapat dialihkan haknya dari satu tangan ke tangan lainnya atau *negotiable* (Widjanarto,2010,44).

Dalam kegiatan perbankan, terutama dalam lalu lintas pembayaran, bank mempunyai peranan yang teramat penting, sesuai dengan tujuan dari perbankan yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Peranan perbankan yang sangat menonjol dalam perdagangan adalah digunakannya berbagai fasilitas jasa perbankan dalam transaksi perdagangan yang menggunakan jasa simpanan giro, seperti wesel, cek, bilyet giro dan promes. Maka dari itu, bank dalam menjalankan lalu lintas pembayaran menerbitkan berbagai jenis surat-surat berharga dan warkat perbankan. Adapun surat-surat berharga dan warkat tersebut diantaranya :

##### 1. Wesel

Surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, ditanggali dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana penerbit memberi

perintah tidak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima atau penggantinya di suatu tempat (H.M.N. Purwosutjipto, 2012,53).

Berdasarkan pengertian tersebut bisa diketahui bahwa suatu surat wesel memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat berharga yang bertanggal dan mencantumkan penerbitannya.
- b. Merupakan perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang.
- c. Pihak-pihak yang terkait adalah penerbit, tersangkut atau tertarik, penerima, pemegang dan endosan.

## 2. Cek

Istilah cek berasal dari kata Inggris, *cheque*, yang berarti mencocokkan. Cek adalah surat perintah pembayaran dari orang yang menandatangani atau nasabah kepada bank untuk membayar kepada orang yang membawa atau orang yang namanya disebut dalam surat cek, atas sejumlah uang yang jumlahnya tercantum dalam cek (Soedarjanto,2011,66).

Definisi lain menyatakan bahwa cek adalah surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik (penerbit) untuk membayar kepada pihak pemegang atau pembawanya, pembayaran mana dilakukan oleh pihak pembayar, yaitu bank dari pihak penerbit atau penarik (Munir Fuady,2009,59).

Bertitik tolak dari pengertian tersebut, Bambang Sunggono (2009,49) mengemukakan bahwa pihak yang terkait dengan cek diantaranya :

- a. Penerbit (*trekker, drawer*), yaitu orang yang mengeluarkan surat cek.
- b. Tersangkut (*betrokkene, drawee*), yaitu bankir yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Pemegang (*nemer, holder*), yaitu orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran dan yang namanya tercantum dalam cek.
- d. Pembawa (*toonder, bearer*), yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek. Adanya pembawa ini sebagai akibat dari klausul atas tujuk (*aan toonder*) yang berlaku bagi cek.

## 3. Bilyet Giro

Bilyet giro adalah surat perintah tidak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya (H.M.N. Purwosutjipto,2012,133).

Berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/HPPB/PbB mengenai bilyet giro yang kemudian diubah sejalan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/KEP/DIR tentang bilyet giro, menyatakan bahwa bilyet giro adalah surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Bilyet giro merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi timbul dalam praktik karena kebutuhan dalam lalu

lintas pembayaran di dalam dunia perbankan. Diterbitkannya suatu bilyet giro atas nama seseorang penerima berarti melakukan suatu pembayaran dari suatu transaksi perdagangan yang sebelumnya telah ada di antara penerbit dan penerima.

Jadi, penerbitan bilyet giro itu adalah karena suatu sebab dan sebab itu adalah adanya transaksi perdagangan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Di dalam transaksi perdagangan tersebut telah disepakati bersama antara para pihak bahwa pembayaran atas transaksi itulah yang harus dibayar dengan cara menerbitkan bilyet giro.

Sebagai alat perintah pemindahbukuan, bilyet giro tidak dapat dilakukan pembayarannya dengan uang tunai. Bilyet giro sebagai alat pembayaran mempunyai dua macam tanggal, yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Sebelum tanggal efektifnya berlaku, bilyet giro sudah dapat diedarkan, tetapi hanya sebagai alat pembayaran kredit saja. Walaupun demikian bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsemen, karena di dalamnya terdapat klausul yang mengatur cara pemindahannya.

Dalam lalu lintas pembayaran dengan bilyet giro pihak penerbit adalah nasabah bank yang mempunyai rekening giro, pihak penerbit adalah nasabah bank yang mempunyai rekening giro, sedangkan pihak tersangkutnya adalah bank di mana penerbit mempunyai rekening giro. Pihak pemegang atau penerbit adalah bank juga, baik bank yang sama maupun yang lain, karena sama-sama nasabah bank, pembayaran pemindahbukuan dengan menggunakan bilyet giro dapat dilakukan.

#### 4. Promes

Istilah promes yang dalam bahasa Belanda disebut *promesse* adalah surat perjanjian dagang yang berisi pengakuan utang dari pihak yang berutang dan bernilai uang sekian sehingga surat promes itu dapat diperdagangkan.

Menurut H.M.N.Purwosutjipto (2012,73) yang dimaksud dengan surat sanggup (promes) adalah surat (akta) yang berisi kesanggupan seorang debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seorang kreditur atau penggantinya.

Berkaitan dengan promes tersebut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan lain dikenal dengan nama promes atas unjuk. Pada dasarnya, promes atas unjuk hanyalah merupakan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang yang harus dibayar kepada pembawa surat promes tersebut.

#### 5. Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang

##### a. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 5 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia. Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden tersebut adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/84/KEP/DIR tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi Rupiah.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/67/KEP/DIR, yang dimaksud dengan SBI adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Sistem diskonto adalah dimana pihak yang memberi Sertifikat Bank Indonesia menerima pembayaran bunganya dimuka/seketika itu, dengan ketentuan bunga yang diterimanya itu akan diperhitungkan pada saat SBI dibayarkan kembali tepat pada tanggal jatuh temponya.

Yang dapat memiliki SBI adalah perorangan atau perusahaan. Untuk memiliki SBI tersebut diperoleh melalui bank atau perusahaan pialang pasar uang, baik dijual melalui pasar perdana maupun pasar sekunder. Adapun bank Indonesia melakukan penjualannya melalui lelang, yang dapat diikuti oleh bank atau pialang. Bank sebagai peserta lelang dapat mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

#### b. SBPU

Surat Berharga Pasar Uang adalah surat-surat berharga jangka pendek yang bisa diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau dengan lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Warkat Surat Berharga Pasar Uang terbagi dalam 2 jenis, yaitu :

1. Surat sanggup (askep) adalah surat berharga, bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan kesanggupan tanpa syarat oleh penerbit untuk membayar (pengakuan utang) kepada pihak pemegang atau pembawanya, pembayaran mana dilakukan pada waktu tertentu oleh pihak penerbit sendiri. Surat sanggup (askep) berupa :
  - a. Surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau lembaga bukan bank untuk membiayai kegiatan tertentu.
  - b. Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank dalam rangka pinjaman antarbank.
2. Surat wesel yang dapat berupa :
  - a. Surat wesel yang ditarik oleh suatu pihak dan askep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarik atau tertarik adalah nasabah bank atau lembaga keuangan bukan bank.
  - b. Surat wesel yang tertarik oleh nasabah bank atau lembaga keuangan bukan bank dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu.

#### 6. *Commercial Paper* (CP)

Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

Dalam pengertian lain dikatakan bahwa *commercial paper* adalah suatu surat berharga berupa pengakuan utang berjangka pendek antara dua sampai dengan dua ratus tujuh puluh hari yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan (sebagai peminjam uang) kepada pihak lain (investor), utang tersebut tanda pemberian jaminan

utang, utang mana diberikan diskon tertentu meskipun ada juga yang diberikan dengan memberikan suatu bunga tertentu (*interest bearing*).

Dalam bukunya, Pengantar Hukum Bisnis, Munir Fuady (2009,43) mengemukakan bahwa karakter yuridis dari suatu *commercial paper* adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan janji untuk membayar utang tanpa syarat.
- b. Merupakan surat berharga yang tergolong ke dalam jenis surat sanggup.
- c. Berjangka waktu pendek dan umumnya diperjualbelikan dalam bentuk diskon, meskipun ada juga yang diberikan dengan memberikan suku bunga tertentu.
- d. Tidak mempunyai jaminan utang dan umumnya dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah memiliki nama dengan peringkat (*rating*) yang bagus.
- e. Merupakan instrumen pasar uang, yang kemudian berkembang menjadi instrumen pasar modal.

## 2.5. Instrumen Keuangan pada Entitas Perbankan

### 2.5.1. Aset Keuangan

Aset keuangan dalam perbankan mengalami penurunan nilai. Berdasarkan PSAK 55 (revisi 2011, paragraf 66) bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian dari pemegang aset tersebut mengenai peristiwa-peristiwa yang merugikan. Pemegang aset memperhatikan peristiwa-peristiwa yang merugikan sebagai berikut :

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggaran kontrak;
- c. Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut; Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- d. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
- e. Tersedianya data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
  - i. Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut (misalnya meningkatnya tunggakan pembayaran atau meningkatnya jumlah pihak peminjam kartu kredit yang mencapai batas kreditnya dan hanya mampu membayar cicilan bulanan minimal); atau
  - ii. Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut (misalnya bertambahnya tingkat pengangguran di area geografis pihak peminjam, turunnya harga *property* untuk kredit properti di wilayah yang relevan, turunnya harga minyak untuk pinjaman yang diberikan kepada produsen minyak, atau memburuknya kondisi industri yang memengaruhi pihak peminjam dalam kelompok tersebut).

Tabel 6.  
Contoh Aset Keuangan Entitas Perbankan (Parsial)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55	Golongan (yang ditentukan bank)	Sub-golongan
1. FVTPL	Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan	Efek-efek
		Obligasi pemerintah
	FVTPL	Investasi pemegang polis
2. L/R	Kas	
	Giro pada Bank Indonesia dan pada bank lain	
	Kredit yang diberikan	
	Aset lain-lain	Tagihan terkait transaksi ATM
		Tagihan kepada pemegang polis
3. HTM	Efek-efek	
	Obligasi Pemerintah	
4. AFS	Efek-efek	
	Obligasi Pemerintah	
	Penyertaan saham	

Sumber data : diolah penulis

### 2.5.2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam perbankan dikategorikan menjadi dua yaitu liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**Tabel 7.**  
**Contoh Liabilitas Keuangan Entitas Perbankan (Parsial)**

Kategori yang didefinisikan oleh PSAk 55 & revisi 2011)	Golongan (ditentukan oleh bank)	Sub-golongan
1. Liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Liabilitas keuangan dalam kelompok diperdagangkan	Liabilitas derivatif-tidak terkait lindung nilai
2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortiasi	Simpanan nasabah	Giro
		Tabungan
	Simpanan dari bank lain	Giro dan tabungan
	Liabilitas lain-lain	Setoran jaminan Utang klaim
	Pinjaman yang diterima	

Sumber data : diolah penulis

### 2.5.3. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan instrumen keuangan dalam entitas perbankan dibagi dalam tiga kondisi yaitu pengakuan dan pengukuran awal, setelah pengakuan awal, serta penghentian pengakuan :

#### 1. Pengakuan dan pengukuran awal

- (i) Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara regular), diakui pada tanggal perdagangan.
- (ii) Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

#### 2. Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

### 3. Penghentian Pengakuan

- (i) Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika hak kontraktual atau arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut sudah berakhir atau entitas telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut.
- (ii) Pinjaman yang diberikan dihentikan pengakuannya jika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman.
- (iii) Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan.

#### 2.5.4. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan pada laporan keuangan salah satu entitas perbankan, instrumen keuangan disajikan berdasarkan kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan, diantaranya :

1. Aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (b) pinjaman yang diberikan dan piutang, (c) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan (d) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.
2. Liabilitas keuangan dalam kategori (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Secara ringkas, penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan terdiri dari :

- (1) Aset dan liabilitas keuangan disajikan berdasarkan klasifikasi instrumen keuangan
- (2) Penyajian *impairment asset*
- (3) Penyajian reklasifikasi aset keuangan dan saling hapus
- (4) Pengungkapan reklasifikasi
- (5) Pengungkapan pendapatan dan beban bunga, keuntungan dan kerugian
- (6) Pengungkapan resiko secara kualitatif dan kuantitatif (Laporan keuangan perbankan, 2014, 31).

#### 2.5.5. Laporan keuangan Perbankan

Laporan keuangan perbankan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dasar utama akuntansinya yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan interpretasinya. Yang termasuk ke dalam laporan keuangan menurut Ikatan Bankir Indonesia adalah neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan.

##### 1) Laporan Posisi Keuangan (neraca)

Harus menggambarkan posisi keuangan pada suatu periode tertentu, yakni berupa aset yang dikelola perusahaan dalam operasinya (total aset), berapa bagian aset itu dibiayai dengan dana pihak ketiga (liabilitas atau kewajiban) dan berapa bagian yang dibiayai dengan dana pemilik sendiri (modal).

##### 2) Laporan Laba/Rugi

Perhitungan laba rugi harus menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam periode tertentu. Perubahan posisi keuangan harus menunjukkan semua aspek

penting dari aktivitas pembiayaan dan investasi, tanpa memandang secara langsung apakah transaksi tersebut berpengaruh terhadap kas atau unsur-unsur modal kerja lainnya.

### 3) Catatan atas Laporan Keuangan

Harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laba rugi dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontingensi, serta transaksi-transaksi lainnya dan mengungkapkan semua informasi yang relevan.

### 4) Laporan Perubahan Posisi Keuangan, antara lain :

- a) Perubahan kas dan setara kas, berguna untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan arus kas dan setara kas, serta kebutuhan bank dalam menggunakan arus kas pada setiap aktivitas.
- b) Perubahan Ekuitas, menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan. Informasi ini berguna untuk mengetahui perubahan aset bersih yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham dan jumlah keuntungan atau kerugian yang berasal dari kegiatan bank selama periode bersangkutan.

## 2.5.6. Risiko Instrumen Keuangan dalam Perbankan

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 Perihal Penerapan Manajemen Resiko bagi bank umum sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Bank Umum harus memiliki Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko yang setidaknya memuat :

1. Penerapan manajemen risiko secara umum;
2. Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko, yang mencakup 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko reputasi;
3. Penilaian profil risiko.

Berdasarkan pendapat Ikatan Bankir Indonesia dalam Buku Memahami Bisnis Bank menyatakan bahwa risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Sementara itu, manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Dengan demikian, tahapan pertama yang dilakukan dalam rangka mengelola risiko apapun jenisnya adalah identifikasi risiko, bank akan keliru pula dalam melakukan pengukuran risiko yang telah teridentifikasi.

Contoh : Bank a di Indonesia membeli USD 1 juta obligasi yang diterbitkan oleh bank b dengan tenor 5 tahun dan kupon dengan *floating rate* 6 bulan. Atas posisi yang diambil oleh bank a ini maka dapat diidentifikasi bahwa bank a akan terekspos pada beberapa risiko sebagai berikut:

- A. Risiko kredit karena ada potensi Bank b gagal membayar bunga maupun pokok obligasi

B. Risiko nilai tukar USD terhadap rupiah (IDR)

C. Risiko suku bunga 6 bulan karena ada kemungkinan suku bunga pasar akan menurun pada periode 6 bulan kedepan.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, dapat dikatakan bahwa pada intinya, penerapan manajemen risiko meliputi pengelolaan risiko yang mencakup instrumen keuangan, diantaranya :

#### 1) Risiko Kredit

Risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Contoh: debitur mengambil KPR dari Bank B dengan jangka waktu 25 tahun. Pada tahun pertama sampai tahun keempat, debitur tersebut masih lancar dalam membayar angsuran pokok dan bunga KPR-nya. Pada tahun keenam, debitur di PHK dari perusahaannya. Atas kejadian ini, Bank B berpotensi menghadapi risiko kredit karena debitur tidak memiliki pendapatan lagi untuk membayar angsuran pokok dan bunga kredit pemilikan rumah yang sudah dinikmatinya.

#### 2) Risiko Pasar

Risiko pada neraca (*on-balance sheet*) dan rekening administratif (*off-balance-sheet*), termasuk transaksi *derivative* akibat perubahan neraca secara keseluruhan dari kondisi pasar dan risiko perubahan harga (*option*). Contoh: Bank C memberikan kredit pemilikan rumah dengan suku bunga *fixed* selama 3 tahun kepada debitur yang akan memiliki satu unit rumah, karena inflasi yang cenderung meningkat, diprediksi suku bunga pasar akan mengalami kenaikan dalam kurun waktu 3 tahun kedepan. Dalam hal ini, Bank C berpotensi mengalami risiko suku bunga pada *banking book* karena menerima pendapatan bunga yang lebih rendah dari pendapatan bunga yang seharusnya.

#### 3) Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko akibat tidak kecukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Contoh: Seorang *Relationship Manager* (RM) sebuah bank menyalahgunakan dana nasabah dengan cara memindah bukukan dana nasabah tersebut untuk keuntungan rekening pribadi dan perusahaannya pada bank lain tanpa persetujuan atau perintah transfer dari nasabah pemilik dana. RM tersebut telah menyeret banknya sendiri kepada risiko operasional.

#### 4) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Contoh: sebuah bank banyak memberikan kredit jangka panjang kepada debiturnya dengan sumber dana yang didominasi deposito lembaga 1 tahun dengan struktur neraca *mismatch maturity* seperti itu, bank tersebut berpotensi menghadapi risiko likuiditas.

## 2.6. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.6.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti pada saat ini. Penelitian terdahulu lebih banyak meneliti mengenai instrumen keuangan yang mencakup PSAK 50 dan 55 namun bukan tentang penyajian, pengukuran, pengakuan atau mengungkapkannya, tetapi lebih banyak membahas pengaruhnya pada cadangan kerugian kredit dalam dunia perbankan. Adapun penelitian sebelumnya, mengkaji sebagai berikut :

#### 1. Ekaputri Ciptani (2013)

Meneliti tentang penerapan PSAK 55 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan PSAK 55 (revisi 2011) atas pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai pada PT. BRI (Persero) Tbk. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tersebut, PT. BRI (Persero) Tbk. dapat diketahui bahwa dalam penentuan cadangan kerugian penurunan nilai PT. BRI (Persero) Tbk. masih mengacu pada PSAK 50 (revisi 2006).

Tetapi dalam proses pengakuan dan pengukuran CKPN yang diterapkan PT. BRI (Persero) Tbk. telah sesuai dengan PSAK yang telah menjadi acuan PSAK revisi terbaru yang telah disahkan oleh IAI yaitu PSAK 55 (revisi 2011). Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada PSAK yang digunakan, yaitu PSAK 55 dan variabel yang digunakan sebanyak 2 variabel.

#### 2. Secarian (2012)

Dengan penelitian tentang Evaluasi Penerapan PSAK 55 mengenai Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran pada Penurunan Nilai dan Tidak Tertagihnya Aset Keuangan, Perlakuan Akuntansi dan Nilai Perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PSAK 55 mengenai instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran yang berfokus pada penurunan nilai dan tidak tertagihnya aset keuangan berdasarkan PSAK 55, perlakuan akuntansi dan menghitung nilai perusahaan PT. ABC Ventura dengan metode nilai buku.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. ABC Ventura sudah menerapkan dengan baik standar PSAK 55 yang berfokus pada penurunan nilai, perlakuan akuntansi yang dilakukan perusahaan sudah baik. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada PSAK 55 mengenai instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran pada penurunan nilai. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada perlakuan akuntansi penelitian yang hanya dilakukan pada satu entitas perbankan, jumlah variabel dan PSAK yang digunakan.

#### 3. Emanuela (2012)

Dengan penelitian Analisis Penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) Atas *Impairment* Piutang Pada Perusahaan *Multifinance*. Emanuela melakukan penelitian pada 10 perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada 2009 dan 2010 dengan membandingkan pengungkapan penurunan nilai piutang sebelum dan setelah

PSAK 50 dan 60 direvisi yaitu sebelum 2006 dan setelahnya, penelitiannya atas *impairment* piutang sesuai dengan buku akuntansi keuangan menengah Dwi Martani.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya 2 perusahaan dari 10 perusahaan *mutifinance* yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 dan 2010, yang sangat spesifik mengungkapkan kebijakan akuntansi mengenai instrumen keuangan perusahaan dan *impairment*-nya menurut PSAK 50 dan 55. Perbedaannya terletak pada PSAK yang digunakan, sub sektor entitas dan jumlah variabel.

#### 4. Agustina dan Supatni

Dalam jurnal yang berjudul “Pengungkapan Informasi Aset Keuangan dan *Impairment* nya di Perbankan Menurut PSAK 50 dan 60”. Dalam penelitiannya pada 30 sampel perusahaan perbankan menghasilkan kesimpulan bahwa aset keuangan jenis pinjaman yang diberikan dan piutang (L&R) merupakan aset keuangan terbesar yang dimiliki oleh perbankan di Indonesia, disusul AFS, HTM, dan FVTPL. Secara rata-rata juga ditemukan bahwa tingkat penurunan nilai atas aset keuangan di perbankan relatif rendah, di mana aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS) merupakan aset keuangan yang memiliki penurunan nilai yang paling besar jika dibandingkan dengan total asetnya.

Dari tahun 2010-2012, semakin tinggi tingkat kepatuhan perbankan untuk penerapan PSAK 50 dan 60, dan semakin banyak jumlah perbankan yang mengungkapkan kebijakan instrumen keuangan yang sangat spesifik. Penyajian dan pengungkapan kebijakan instrumen keuangan dalam laporan keuangan perbankan telah selaras dengan PSAK 50 dan 60 (revisi 2010) dari tahun 2010-2012, dibuktikan dengan tidak adanya pengungkapan yang tidak spesifik didalam laporan keuangan mengenai kebijakan instrumen keuangan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan hanya mencakup aset keuangan dan *impairment* aset saja serta periode laporan keuangan yang dijadikan sampel penelitian yaitu tahun 2010 hingga 2012.

#### 2.6.2. Kerangka Pemikiran

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan (Dwi Martani,165). Sejak tahun 1980-an telah terjadi perdebatan dan kritik terhadap standar akuntansi yang mengatur perlakuan terhadap instrumen keuangan pada waktu itu, yang menginginkan pengakuan dan pengungkapan yang lebih banyak akan nilai wajar dari instrumen keuangan (Jones, 1988). Pengukuran instrumen keuangan dengan pendekatan biaya historis dianggap sudah tidak lagi dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya dengan semakin kompleksnya instrumen keuangan (Jones, 1988), dalam hal ini perusahaan perbankan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh MGI (Mc Kinsey Global Institute) pada tahun 2011 memperkirakan bahwa sub sektor untuk tabungan dan investasi di Indonesia akan menjadi pasar konsumen yang terbesar di tahun 2030 setelah sektor retail, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan 10,5% setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga 2030 mendatang. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa sektor perbankan akan semakin berkembang di Indonesia.

Sebagai Negara yang mengadopsi IFRS, Indonesia menyatakan bahwa konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008, namun dalam

perjalanannya ternyata tidak mudah, sampai akhir tahun 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru mencapai 10 standar IFRS dari total 33 standar pada saat itu.

Kesiapan pelaku industri juga menjadi pertanyaan, terutama ketidaksiapan industri keuangan khususnya perbankan dalam mengadopsi standar akuntansi instrumen keuangan PSAK 50 dan 55 membuat banyak pihak meragukannya, terutama setelah adanya PSAK 60 tahun 2010, dan ditahun yang sama PSAK 50 mengalami revisi, kemudian di tahun 2011 PSAK 55 juga direvisi. Tidak berhenti disana pada tahun 2013 PSAK mengenai instrumen keuangan pun kembali direvisi.

Menurut Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menilai bahwa sebanyak 70 persen bank-bank nasional belum siap untuk lebih transparan dengan menerapkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 dan 55. Hal ini disebabkan karena aturan ini akan berpengaruh pada laba rugi dan ekuitas perusahaan. PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) merupakan laporan keuangan yang mengacu standar internasional hasil dari adopsi International Financial Reporting Standard (IFRS).

Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional juga menyatakan, berdasarkan survei Perbanas dari kebijakan dan prosedur, industri perbankan nasional yang telah menerapkan PSAK tentang instrumen keuangan secara rata-rata baru sekitar 30 persen pada tahun 2009. Dari survei yang dilakukan oleh anggota Perbanas yang mewakili hampir 90% industri perbankan di Indonesia hanya 45% dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah menguasai PSAK tersebut sedangkan hanya 30% saja sistem informasi manajemen perbankan atau infrastruktur yang mendukung implementasi PSAK mengenai instrumen keuangan.

Kendala perbankan nasional yang belum siap menerapkan PSAK ini didasarkan oleh aspek-aspek teknis yakni mengenai *mark to market* berdasarkan *bid* dan *ask price* yang sebelumnya berdasarkan *middle rate* (aset bank dan kewajiban bank). Selain itu, yang juga menjadi hambatan adalah aspek teknis pencadangan yang diterapkan BI dan Direktorat Jenderal Pajak berbeda. Namun, walau baru 30 persen perbankan yang menerapkan aturan tersebut, karena PSAK 50 dan 55 sudah menjadi kesepakatan maka tidak ada alasan bagi perbankan nasional untuk mengikuti standar internasional ini. Bahkan menurut Biro Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (BI) sebaiknya Penerapan PSAK 50 dan 55 dilakukan 2013, hal ini dikarenakan pengimplementasiannya sangat rumit dan membingungkan. Namun meski perbankan nasional mengaku banyak yang belum siap, BI tidak akan menunda penerapan PSAK 50 dan 55 pada 1 Januari 2010.

## 2.7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan sementara yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang akan diuji kebenarannya lebih lanjut secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan emiten perbankan yang terdaftar di BEI telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan.
2. Penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan emiten perbankan yang terdaftar di BEI telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tentang penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan.

## **BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian terhadap penerapan standar penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan pada pelaporan keuangan emiten perbankan merupakan penelitian bisnis, dimana penulis melakukan pengumpulan dan analisis data yang sistematis dan obyektif. Berdasarkan karakteristik data penelitian, pengembangan atau pembahasan hasil penelitian, jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Dalam penelitian tersebut penulis akan menyajikan secara kualitatif dan kuantitatif pergerakan serta seberapa besar persentase entitas perbankan menyajikan dan mengungkapkan instrumen keuangannya dalam laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 50 dan 60 dengan menganalisis laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Termasuk seberapa besar persentase entitas perbankan menerapkan PSAK 55 dalam hal pengakuan dan pengukuran setiap instrumen keuangan yang dimiliki.

### **3.2. Objek Penelitian, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

#### **a. Objek Penelitian**

Variabel yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah instrumen keuangan pada entitas perbankan di Indonesia. Untuk memenuhi data yang dibutuhkan maka penulis melakukan penelitian pada entitas perbankan melalui laporan keuangan yang sudah diaudit yang diterbitkan tahun 2012-2014 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Entitas perbankan merupakan badan usaha milik swasta maupun milik negara yang menjalankan kegiatan perbankan di dalam pengawasan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pelaporan keuangan entitas perbankan dalam penelitian ini diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia.

#### **b. Unit Analisis**

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan PSAK 50 dan 60, penulis melakukan penelitian pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa unit analisis dalam penelitian ini adalah *organization*.

#### **c. Lokasi Penelitian**

Penelitian menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan entitas perbankan yang didapatkan dari halaman *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

### **3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Bank Umum di Indonesia meliputi laporan keuangan perbankan yang sudah diaudit tahun 2012-2014 yang di dapatkan dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) serta data aset keuangan perbankan yang diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia tahun 2012.

### 3.4. Operasionalisasi Variabel

Dalam memudahkan proses analisa, maka sebelumnya penulis akan mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam satu tahap kelompok yaitu:

#### 1. Variabel independen (Variabel Bebas/Tidak Terikat)

Variabel independen penelitian ini adalah Standar Penyajian dan Pengungkapan tentang Instrumen Keuangan, yang mencakup PSAK 50 mengenai penyajian instrumen keuangan, PSAK 60 mengenai pengungkapan instrumen keuangan.

Tabel 8.

#### Operasionalisasi Variabel

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan tentang Instrumen Keuangan Kesesuaian Terhadap Standar Penyajian dan Pengungkapan pada Laporan Keuangan Emiten Sub Sektor Perbankan Periode 2012-2014

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Standar Akuntansi Keuangan tentang Instrumen Keuangan pada Emiten Perbankan	1. Standar Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyajikan kelompok aset dan liabilitas berdasarkan konsep pengakuan dan pengukuran pada KDPPLK</li> </ul>	Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, dan Catatan atas Laporan Keuangan	Nominal
	2. Standar <i>Recognition dan Measurement</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan emiten perbankan</li> </ul>	Catatan atas Laporan Keuangan	Nominal
	3. Standar <i>Presentation dan Disclosure</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan emiten perbankan</li> </ul>	Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas	Nominal

### 3.5. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, data penelitian yang utama adalah laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan audit atas perusahaan-perusahaan perbankan baik informasi kualitatif maupun kuantitatifnya.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan perusahaan-perusahaan perbankan yang sudah diaudit dan terdaftar di Bursa Efek

Indonesia dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria: (1) Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014; (2) terdapat laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012-2014; (3) Perbankan telah menerapkan PSAK 50 dan 60 tertera dalam catatan atas laporan keuangannya.

Periode tahun dari laporan keuangan yang diteliti adalah laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014 mengacu pada PSAK 50 dan 60 revisi 2010. Ukuran perusahaan baik itu perolehan laba, eksistensi praktek, maupun banyaknya cabang operasi tidak dijadikan pertimbangan yang berarti untuk pengambilan sampel.

Dari total 41 perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, terdapat 4 perusahaan yang baru mulai IPO pada tahun 2014 yaitu Bank Agris, Bank Dinar Indonesia, Bank Yudha Bhakti, dan Bank National Nobu, maka penulis akan tidak akan memasukkannya ke dalam sampel penelitian.

Selain itu pula terdapat 6 perusahaan yang baru memulai penawaran sahamnya pada tahun 2013 yaitu Bank Ina Perdana, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Maspion Indonesia, Bank Mitraniaga, Bank Mestika Dharma dan Bank Pan Indonesia Syariah, sehingga tidak menyajikan laporan keuangan lengkap di antara tahun 2012-2014 maka penulis tidak akan memasukkannya dalam sampel penelitian.

Tabel 9.  
Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014	41
Perbankan yang tidak menyajikan laporan keuangan tahun 2012-2014	(10)
Perbankan yang belum menerapkan PSAk 50,55 dan 60	0
Total sampel penelitian	31

Sumber data : diolah penulis

Berdasarkan sampel tersebut, maka diharapkan dapat mewakili populasi dari industri keuangan sub sektor perbankan di Indonesia. Terlebih lagi karena sampel merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di BEI dan wajib untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Diantara perusahaan perbankan tersebut yang menjadi sampel bagi penelitian, yaitu :

Tabel 10.  
Daftar Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga 31  
Desember 2014

No.	KODE PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	IPO
1	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk	8 Agustus 2003
2	BABP	Bank MNC Internasional	15 Juli 2002
3	BACA	Bank Capital Indonesia	8 Oktober 2007
4	BAEK	Bank Ekonomi Raharja	8 Januari 2008
5	BBCA	Bank Central Asia	31 Mei 2000
6	BBKP	Bank Bukopin	10 Juli 2006
7	BBNI	Bank Negara Indonesia (PERSERO)	25 November 1996
8	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan	10 Januari 2001
9	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)	10 November 2003
10	BBTN	Bank Tabungan Negara	17 Desember 2009
11	BCIC	Bank Mutiara	25 Juni 1997
12	BDMD	Bank Danamon Indonesia	6 Desember 1989
13	BEKS	Bank Pundi Indonesia	13 Juli 2001
14	BJBR	Bank Jabar Banten	8 Juli 2010
15	BKSW	Bank Kesawan	21 November 2002
16	BMRI	Bank Mandiri (PERSERO)	14 Juli 2003
17	BNBA	Bank Bumi Arta	31 Desember 1999
18	BNGA	Bank CIMB Niaga	29 November 1989
19	BNII	Bank Internasional Indonesia	21 November 1989
20	BNLI	Bank Permata	15 Januari 1990
21	BSIM	Bank Sinar Mas	31 Desember 2010
22	BSWD	Bank Swadesi	1 Mei 2002
23	BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	12 April 2008
24	BVIC	Bank Victoria Internasional	30 Juni 1999
25	INPC	Bank Artha Graha Internasional	29 Agustus 1990
26	MAYA	Bank Mayapada Internasional	29 Agustus 1997
27	MCOR	Bank Windu Kentjana Internasional	3 Juli 2007
28	MEGA	Bank Mega	17 April 2000
29	NISP	Bank NISP OCBC	20 Oktober 1994
30	PNBN	Bank PAN Indonesia	29 Desember 1982
31	SDRA	Bank Himpunan Saudara 1906	15 Desember 2006

Sumber data : diolah penulis

### 3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode prosedur yang digunakan oleh penulis dalam rangka pengumpulan data untuk melengkapi, memenuhi, dan menyusun makalah ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan *website*. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang digunakan sebagai landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam pengambilan data, penulis menggunakan sumber data sekunder yang merupakan data-data yang sudah dipublikasikan pada dan melalui situs-situs *website* entitas perbankan juga Bursa Efek Indonesia. Data tersebut berupa laporan tahunan yang sudah diaudit dengan opini *unqualified* dan informasi lainnya atas perusahaan sampel saat menerapkan PSAK 50 dan 60 revisi 2010.

### **3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif (non statistik), yaitu suatu metode yang menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dengan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia, kemudian disusun, dipelajari, dianalisis lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *data analysis* yaitu dengan melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berhubungan dengan penyajian, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan instrumen keuangannya. Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis komparatif terhadap sampel berupa laporan keuangan perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI.

Analisis dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran mengenai penerapan PSAK 50 dan 60 (revisi 2010) pada perusahaan perbankan dilihat dari segi penyajian dan pengungkapan (termasuk pengakuan dan pengukuran) seluruh instrumen keuangan yang ada.

Penelitian ini menganalisis seberapa besar persentase dari penerapan standar instrumen keuangan mengenai penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan entitas perbankan sesuai dengan PSAK 50 dan 60, sehingga pada setiap perusahaan terdaftar, penulis akan membandingkan kenaikan atau penurunan dari penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan serta bagaimana setiap perusahaan menyajikan instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif.

Dalam pengolahan data, penulis pertama-tama akan mengolah data mentah dalam *Microsoft Excel* (statistik deskriptif) dengan tujuan untuk meringkas data yang diobservasi, mendeskripsikannya lalu menghasilkan kesimpulan yang padu serta mengeksplorasikannya. Penelitian dalam penyajian dilihat dari aspek-aspek persyaratan yang sesuai dengan PSAK 50 yaitu :

Tabel 11.  
**Analisis Penyajian Instrumen Keuangan Perbankan**

Penelitian	Uraian Persyaratan
Penyajian Instrumen Keuangan	1. Penyajian kategori instrumen dan komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan atau instrumen ekuitas
	2. Penyajian instrumen yang mempunyai fitur opsi jual ( <i>puttable instrument</i> )
	3. Ketentuan penyelesaian kontijensi
	4. Penyajian reklasifikasi instrumen keuangan
	5. Penyajian instrumen keuangan majemuk
	6. Penyajian bunga, dividen, kerugian dan keuntungan yang berkaitan dengan instrumen keuangan
	7. Penyajian saling hapus antar aset keuangan dan liabilitas keuangan

Sumber data : diolah penulis

Pada penyajian untuk kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan akan diuraikan dalam bentuk masing-masing akun instrumen keuangan perbankan (lebih lanjut dideskripsikan pada bab IV). Analisis dilanjutkan dengan melihat laporan keuangan masing-masing perusahaan yang menjadi sampel meliputi kebijakan akuntansi serta bagaimana perusahaan menyajikan informasi tambahan atas instrumen keuangan yang ada. Pengungkapan instrumen keuangan yang sesuai dengan PSAK 60 yaitu :

**Tabel 12.**  
**Analisis Pengungkapan Instrumen Keuangan Perbankan**

<p>1. Pengungkapan dalam Laporan Posisi Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan</li> <li>• Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</li> <li>• Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</li> <li>• Reklasifikasi</li> <li>• Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan</li> <li>• Agunan, dan akun penyisihan kerugian kredit</li> </ul>
<p>2. Pengungkapan dalam Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keuntungan dan kerugian neto atas semua klasifikasi instrumen keuangan</li> <li>• Total penghasilan bunga dan total bunga yang dihitung dengan suku bunga efektif</li> <li>• Penghasilan dan beban imbalan yang timbul dari FVPL</li> <li>• Penghasilan bunga dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai yang diakrua</li> <li>• Jumlah kerugian penurunan nilai untuk setiap kelas aset keuangan</li> </ul>
<p>3. Pengungkapan Lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan akuntansi</li> <li>• Akuntansi lindung nilai</li> <li>• Nilai wajar</li> <li>• Jenis dan tingkat resiko</li> </ul>

Sumber data : diolah penulis

Dalam analisis pengakuan dan pengukuran, kesesuaiannya akan diteliti baik dalam pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, serta penghentian pengakuan instrumen keuangan. PSAK mengenai pengakuan dan pengukuran diikuti sertakan dalam penelitian ini karena penyajian, pengakuan, pengukuran dan pengakuan merupakan satu tatanan siklus yang tidak terpisahkan

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Entitas Perbankan

Perbankan merupakan entitas yang konsep dari kegiatannya dapat diketahui dan digambarkan melalui dua cara yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu melalui kegiatan operasinya dan melalui kegiatan finansialnya. Dari kegiatan operasi, misalnya diawali dengan adanya pembelian bahan baku, diproses dengan melibatkan sumber daya kemudian menghasilkan produk yang secara nyata dapat menghasilkan keuntungan. Sama halnya dalam entitas perbankan yang kegiatan-kegiatan pokoknya adalah menghimpun dana masyarakat sebagai bahan baku, kemudian memprosesnya sedemikian rupa menjadi produk dalam bentuk jasa. Termasuk juga kegiatan lainnya yang dengan seluruh aktivitas operasi tersebut menjadikan perbankan sebagai kunci penunjang perekonomian modern.

Kunci penunjang perekonomian ini terlihat dari kelancaran peredaran dan transaksi yang melibatkan uang, kelancaran investasi, kelancaran untuk modal kerja, modal usaha industri dan perdagangan yang ditentukan oleh kelancaran jasa pelayanan perbankan. Penunjang-penunjang kelancaran ini dilakukan bank dengan melakukan aktivitas pelayanan dalam bentuk jasa.

Bahan baku dalam entitas perbankan ini adalah dana, dan produk yang dijualnya adalah dana dan jasa. Produk ini dibakukan melalui pelayanan seperti transfer, perdagangan valas, kliring, penjamin simpanan, investasi, inkaso dan jasa lainnya dengan instrumen-instrumen dalam bentuk wesel, cek, bilyet giro, promes, SBI, SBPU, *Commercial Paper* dan lain sebagainya. Hal ini menggambarkan bahwa proses dalam kegiatan operasi bisnis entitas perbankan sangat sarat dengan instrumen-instrumen yang termasuk ke dalam instrumen keuangan.

Sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas publik dengan kegiatan operasi yang bertumpu pada instrumen keuangan, dan dengan proses bisnis yang bersensivitas tinggi dalam memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan, maka sangat penting bagi perbankan untuk menerapkan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan. Standar akuntansi keuangan ini menjadi harga mati yang tidak bisa diabaikan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perbankan. Selain itu, standar akuntansi yang diatur secara khusus oleh regulator juga harus menjadi pertimbangan penting perbankan.

Salah satu regulator yang harus dipatuhi adalah Bank Indonesia. Perbankan dalam hal ini bank umum, merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang langsung dipengaruhi oleh kebijakan Bank Sentral karena perannya sebagai sarana bagi pelaksanaan kebijakan moneter. Tingginya kepentingan Bank Sentral terhadap perbankan memicu keharusan adanya perbaikan signifikan pada entitas perbankan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat terwujud dari adanya pemenuhan entitas yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik (GCG) melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudent*), akuntabel dan *governance*.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan *governance* melalui laporan keuangan yang didukung oleh pedoman akuntansi yang relevan dan reliabel, perbankan harus menerapkan prinsip-prinsip yang telah dijadikan patokan standar.

Hal ini dapat tercermin dalam sudut pandang kepatuhan terhadap standar akuntansi, dalam hal ini yang berkerucut mengenai instrumen keuangan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut juga dilakukan sebagai cerminan adanya kepastian kepatuhan entitas perbankan terhadap standar juga adanya pengawasan yang dilakukan oleh regulator yang berwenang.

#### 4.1.1. Pernyataan Kepatuhan PSAK

Perbankan dalam hal ikhtisar kebijakan akuntansinya mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan bahwa ada kepatuhan lain yang harus diterapkan mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Selain berpegang pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mencakup PSAK dan ISAK, pada tabel 13 akan memberikan informasi mengenai peraturan lain yang juga diterapkan dalam perbankan.

Tabel 13.  
Peraturan Regulator yang Berkaitan dengan Instrumen Keuangan Perbankan

No.	Lembaga Regulator	Aturan dan Keputusan yang Mengatur Instrumen Keuangan	
		No. Keputusan dan Peraturan	Tentang
1.	Otoritas Jasa Keuangan	VIII.G.7	Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
		POJK.04/2014	Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
2.	Peraturan Bank Indonesia	8/13/PBI/2006	Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
		11/25/PBI/2009	Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
		14/15/PBI/2012	Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (menghitung minimum cadangan kerugian penurunan nilai yang wajib dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia)
		15/15/PBI/2013	Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing
4.	PSAK	PSAK 50 Revisi 2010	Penyajian Instrumen Keuangan
		PSAK 55 Revisi 2011	Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan
		PSAK 60 Revisi 2010	Pengungkapan Instrumen Keuangan

Sumber data : diolah penulis

Hal ini (adanya standar lain) dikarenakan perbankan memiliki otoritas tertentu untuk menaungi setiap kinerja keuangannya baik oleh OJK (sebelumnya Bapepam-LK), Bank Indonesia serta regulator lainnya. Pada Bank Indonesia peraturan terangkum dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia), PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia dan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) untuk perbankan yang menjalankan bisnisnya dengan pondasi syariah. Pada OJK, peraturannya terangkum dalam berbagai keputusan-keputusan dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK dan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan). Peraturan-peraturan tersebut terangkum dalam Tabel 13.

Lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK yaitu Peraturan No.VIII.G.7 yang menjadi pedoman entitas perbankan dalam penyajian dan pengungkapan ini memberikan pedoman mengenai struktur, isi dan persyaratan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang harus disampaikan oleh entitas baik kepada masyarakat maupun Bapepam dan LK. Sementara, hal-hal mengenai struktur, isi dan persyaratan dalam penyajian dan laporan keuangan dan pengungkapan yang tidak diatur dalam peraturan ini, harus mengikuti SAK dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di pasar modal. Peraturan ini berisikan poin-poin yang menjelaskan definisi dan persyaratan rinci seluruh penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Sementara itu POJK pada tabel 13 di dalamnya mengatur mengenai ketentuan poin-poin persyaratan informasi yang harus disajikan didalam laporan tahunan (*annual report*) emiten publik. Poin-poin yang berkaitan diantaranya mengenai ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit dan analisis serta pembahasan manajemen.

Sedangkan untuk peraturan yang terangkum dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia), dalam laporan keuangan entitas perbankan secara umum mengungkapkan empat (4) PBI yang berkaitan secara langsung dengan instrumen keuangan perbankan. Diantaranya peraturan tersebut berpengaruh terhadap besarnya nominal penyajian dalam laporan posisi keuangan atas akun kredit yang diberikan, giro pada Bank Indonesia dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selain itu, peraturan tersebut juga berpengaruh terhadap pengungkapan risiko instrumen keuangan.

#### 4.1.2. Instrumen Keuangan Sub Sektor Perbankan

Instrumen keuangan perbankan tersajikan dalam laporan posisi keuangan entitas perbankan, dimana penyajiannya dibagi kedalam berbagai rekening (pos). Urutan dari instrumen keuangan sudah ditentukan oleh peraturan Bank Sentral maupun Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan tingkat likuiditasnya.

Penelitian instrumen keuangan ini tertuju pada laporan keuangan, bukan pada laporan triwulanan entitas perbankan. Karena laporan keuangan dianggap lebih memberikan informasi kinerja perbankan secara menyeluruh dan lengkap. Laporan keuangan dan triwulanan entitas perbankan memiliki format penyajian yang serupa tetapi lebih lengkap pada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Pada tabel 14 berikut ini mengidentifikasi instrumen keuangan yang dimiliki oleh perbankan dan kategorinya dalam instrumen keuangan.

**Tabel 14.**  
**Klasifikasi Instrumen Keuangan Entitas Perbankan**

Instrumen Keuangan dalam Laporan Keuangan Perbankan	Klasifikasi Instrumen Keuangan
<b>Aset Keuangan</b>	
Kas	Kas
Giro pada Bank Indonesia	Pinjaman yang diberikan
Giro pada Bank Lain	Pinjaman yang diberikan
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	Pinjaman yang diberikan
Efek-efek	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan, dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	Pinjaman yang diberikan
Wesel ekspor	Pinjaman yang diberikan
Tagihan akseptasi	Pinjaman yang diberikan
Tagihan derivatif/Aset yang diperdagangkan	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Kredit yang diberikan	Pinjaman yang diberikan
Obligasi pemerintah	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan, dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual
Penyertaan saham	Tersedia untuk dijual
Bunga yang masih harus diterima dan aset lain-lain	Pinjaman yang diberikan
<b>Liabilitas Keuangan</b>	
Liabilitas segera	Biaya perolehan diamortisasi
Simpanan nasabah (giro, tabungan dan deposito berjangka)	Biaya perolehan diamortisasi
Simpanan dari Bank Lain	Biaya perolehan diamortisasi
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	Biaya perolehan diamortisasi
Liabilitas derivatif/ Liabilitas yang diperdagangkan	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Liabilitas akseptasi	Biaya perolehan diamortisasi
Efek-efek yang diterbitkan	Biaya perolehan diamortisasi
Pinjaman yang diterima	Biaya perolehan diamortisasi
Pinjaman subordinasi	Biaya perolehan diamortisasi
Bunga yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	Biaya perolehan diamortisasi

Sumber data : diolah penulis

Aset keuangan perbankan dikategorikan pada 4 jenis yaitu diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan tersedia untuk dijual. Untuk liabilitas keuangan perbankan mengkategorikan pada 2 (dua) jenis yaitu liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset dan liabilitas

keuangan yang terdapat pada tabel 14 memiliki perbedaan penyajian pada laporan keuangan 31 entitas perbankan (rincian disajikan dalam lampiran 1). Hal ini perlu diteliti agar mengetahui derajat kesesuaian penetapan kategori aset dan liabilitas keuangan melalui komponen-komponen yang ada pada setiap pos. Selain itu juga untuk mengetahui persentase penyajian pos-pos aset dan liabilitas keuangan serta derajat keseragaman atas kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan pada laporan keuangan entitas perbankan.

#### 4.1.2.1. Aset Keuangan

Pada bagian ini, akan memberikan informasi mengenai gambaran umum aset keuangan perbankan. Aset keuangan dalam sampel penelitian pada sembilan puluh tiga laporan keuangan perbankan dimulai pada tahun 2012. Pada tahun 2012 ini adalah saat PSAK mengenai instrumen keuangan diterapkan dan berlaku efektif. Aset keuangan perbankan dari tahun 2012 hingga 2014 disajikan berdasarkan pada akun-akun tertentu, diantaranya:

##### 1. Kas

Kas dalam entitas sampel meliputi uang yang disimpan peti besi dalam bentuk rupiah (termasuk uang dalam mesin ATM) dan mata uang asing. Kas dalam perbankan tidak termasuk *commemorative coin*, emas batangan dan mata uang emas serta valuta asing yang tidak berlaku lagi. Pada tabel 15 diuraikan komponen kas yang dimiliki oleh entitas perbankan.

Tabel 15.  
Komponen Kas dalam Entitas Perbankan Periode 2012-2014

No	Komponen Kas dalam Entitas Perbankan	Jumlah Entitas yang Menyajikan			Jumlah Entitas yang Tidak Menyajikan			Jumlah Entitas yang Diteliti
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	
1.	Kas	31	31	31	-	-	-	31
2.	Giro pada Bank Indonesia	31	31	31	-	-	-	31
3.	Giro pada Bank Lain	31	30	30	-	1	1	31
4.	Sertifikat Bank Indonesia	20	21	16	11	10	15	31
5.	Sertifikat Bank Lain	23	23	24	8	8	7	31
6.	Penempatan pada Bank Indonesia	25	23	25	6	8	6	31
7.	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia	1	2	-	30	29	31	31
8.	Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	-	3	31	31	28	31

Sumber data : Laporan keuangan entitas perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Dari tabel tersebut terlihat pada tahun akhir penelitian (2014) bahwa sebagian besar kas disajikan sebagai: kas (100%), giro pada Bank Indonesia dan bank lain (100%), giro pada bank lain (98%), penempatan pada Bank Indonesia (81%) serta sertifikat Bank Indonesia dan bank lain (53%). Sementara itu, persentase paling sedikit atas FASBI menurut eksplorasi penulis dikarenakan kecenderungan entitas perbankan yang lebih tertarik mengkategorikan FASBI di dalam komponen pos utama Giro pada Bank Indonesia yang termasuk dalam kategori aset keuangan jenis L/R.

Kas dalam bentuk Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) hanya memiliki persentase 9,7% atas 3 entitas perbankan yaitu BRI, BTN dan Bank MEGA. Hal ini dikarenakan SDBI yang merupakan produk baru dari Bank Indonesia baru diterbitkan pada pertengahan tahun 2013. Penerbitan instrumen ini diatur pada PBI No. 15/5/PBI/2013 tentang Operasi Moneter Bank Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2013. SDBI merupakan tambahan instrumen pasar uang yang memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan Sertifikat Bank Indonesia, yaitu hanya dapat diperdagangkan antar entitas bank. Pada laporan keuangan Bank Indonesia, SDBI disajikan pada neraca pada pos SBI sebesar nilai nominal dikurangi diskonto.

Selain itu, dalam 31 sampel entitas perbankan terdapat beberapa perbedaan dalam penentuan klasifikasi kas berdasarkan kategori aset keuangan. Penentuan perbedaan kategori kas ini disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 16.  
Perbedaan Klasifikasi Kas Sebagai Aset Keuangan Periode 2012-2014

Periode Laporan Keuangan	Jumlah Entitas Berdasarkan Klasifikasi Kas			Jumlah Entitas yang Diteliti
	Tersedia untuk Dijual	Pinjaman yang Diberikan	Kas	
2012	5	16	10	31
2013	5	17	9	31
2014	5	18	8	31

Sumber data : CALK entitas perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa lebih dari setengah jumlah entitas sampel mengkategorikan kas sebagai pinjaman yang diberikan. Permasalahannya adalah bahwa lazimnya, kas merupakan aset keuangan yang tidak termasuk dalam kategori baik L/R maupun AFS, karena kas merupakan aset yang paling likuid dan dicatat berdasarkan nilai nominal, bukan dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Adapun berdasarkan eksplorasi penulis, hal ini dikarenakan kebijakan akuntansi memberikan keleluasaan bagi bank untuk menetapkan aset keuangannya ke dalam berbagai kategori pada saat pengakuan awal sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi tertentu. Sesuai dengan pedoman aplikasi pada PSAK 55 paragraf 08 tertulis bahwa standar mengizinkan entitas untuk menetapkan aset dan liabilitas keuangan pada klasifikasi yang mana memberikan informasi yang lebih relevan.

Penetapan kategori kas sebagai pinjaman yang diberikan atau tersedia untuk dijual juga disebabkan oleh komponen kas yang tidak hanya terdiri dari kas seperti

halnya terinci dalam tabel 15. Pada tahun 2014 sebanyak 55% entitas mengkategorikan kas sebagai pinjaman yang diberikan diantaranya adalah bank dengan kode BABP, BACA, BBKP, BBNP, BCIC, BEKS, BJBR, BKSW, BMRI, BNBA, BNII, BSIM, BSWD, BTPN, BVIC, MCOR, NISP dan PNB. Sedangkan sebanyak 16% yang mengkategorikan kas sebagai AFS yaitu entitas BAEK, BBKA, BDMD, BNLI dan MAYA, serta 26% yang tidak mengkategorikan kas ke dalam L/R dan AFS atau sesuai dengan standar yaitu AGRO, BBNI, BBRI, BBTN, BNGA, INPC, MEGA dan SDRA.

## 2. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dipergunakan untuk menampung transaksi antara entitas perbankan dengan Bank Indonesia (selaku Bank Sentral) diantaranya, setoran Giro Wajib Minimum (GWM). Giro pada Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan.

Saldo giro pada Bank Indonesia ini disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GMW) yang jumlahnya sekian persen dari jumlah deposito yang dikuasai entitas perbankan. Besarnya persentase cadangan wajib ini berubah-ubah sepanjang waktu dan disesuaikan dengan perubahan kewajiban moneter Bank Indonesia. Persentase ini dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang "Perubahan atas PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang GMW Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing". Sesuai peraturan tersebut bank harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam rupiah dan mata uang asing masing-masing sebesar 8% dan GMW sekunder sebesar 4% dalam bentuk rupiah dari DPK (Dana Pihak Ketiga). GWM utama berupa simpanan dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia sedangkan GWM sekunder berupa cadangan minimum dalam bentuk SBI, SUN (Surat Utang Negara) atau *Excess Reserve*. Giro pada Bank Indonesia ini akan disajikan sebagai kewajiban pada laporan keuangan Bank Indonesia.

Sedangkan giro pada bank lain merupakan rekening yang menunjukkan jumlah dana yang tersimpan dalam bank lain, dalam hal ini bank yang mempunyai hubungan koresponden. Giro pada bank lain terdiri dari giro dari pihak ketiga dan pihak berelasi masing-masing dana terdiri atas dana dalam bentuk rupiah dan mata uang asing.

Pos utama giro pada Bank Indonesia dengan komponen kas yang didalamnya terdapat giro pada Bank Indonesia memiliki fungsi yang berbeda. Giro pada Bank Indonesia dalam rekening kas digunakan untuk melayani pengambilan tunai para nasabah. Sedangkan rekening utama giro pada Bank Indonesia sebagian merupakan GMW dan sebagian lagi dapat digunakan untuk menjaga perubahan penerimaan dan pemasukan uang melalui transaksi kliring. 100% entitas perbankan yang diteliti telah menyajikan giro pada Bank Indonesia dan bank lain dalam laporan keuangan periode 2012-2014, termasuk cadangan kerugian penurunan nilainya. Seluruh entitas sampel juga telah secara serempak mengklasifikasikan pos ini pada kategori aset keuangan jenis pinjaman yang diterima.

### 3. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk FASBI (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia), *call money*, deposito berjangka, dan lain-lain. Untuk penempatan pada bank lain, pos ini menunjukkan jumlah yang dipinjamkan kepada bank-bank lain dengan perjanjian khusus dan dimaksudkan juga untuk memperoleh penghasilan dan sebagai pendukung likuiditas.

Rekening penempatan pada bank lain ini menunjukkan jumlah yang dipinjamkan kepada bank-bank lain dengan perjanjian khusus dan dengan tujuan memperoleh penghasilan juga sebagai pendukung likuiditas. Pendapatan pada bank lain merupakan pinjaman yang mengandung risiko sehingga entitas perbankan diharuskan untuk membentuk cadangan kerugian untuk menanggulangi piutang yang macet. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang dimiliki oleh 31 entitas perbankan diklasifikasikan sebagai piutang dan pinjaman yang diberikan (*L/R*). Pada tabel 17 memberikan informasi mengenai komponen pos penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang telah disajikan dalam laporan keuangan perbankan. Pos penempatan pada Bank Indonesia memiliki berbagai macam komponen, sehingga dalam satu bank tidak hanya memiliki satu atau dua jenis komponen saja. Dalam satu bank akan menyimpan dana dalam Bank Indonesia dan bank lain dalam bentuk yang beragam, sehingga komponen pos ini yang dimiliki dalam satu bank akan bermacam-macam (tidak hanya pada satu jenis komponen).

Tabel 17.  
Penyajian Komponen Pos Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Periode 2012-2014

No.	Komponen Penempatan pada BI dan Bank Lain	Jumlah Entitas yang Memiliki			Jumlah Entitas yang tidak Memiliki			Jumlah Entitas yang diteliti
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	
	Penempatan pada BI							
1.	<i>Deposit Facility</i>	12	11	10	19	20	21	31
2.	Sertifikat Deposito	-	-	1	31	31	30	31
3.	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)	18	17	16	13	14	15	31
4.	Deposito Berjangka	3	3	2	28	28	29	31
5.	Intervensi Bank Indonesia	1	1	-	30	30	31	31
	Penempatan pada Bank Lain							
1.	<i>Interbank Call Money</i>	24	26	24	7	5	7	31
2.	Deposito Berjangka	18	19	15	13	12	16	31
3.	<i>Fixed Term</i>	2	2	1	29	29	30	31
4.	Setoran Jaminan	1	1	1	30	30	30	31
5.	Sertifikat Deposito	1	1	6	30	30	24	31
6.	Tabungan	4	2	3	27	29	28	31

Sumber data : CALK entitas perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Berdasarkan hasil penelitian, jenis penempatan pada bank lain paling banyak dimiliki entitas perbankan dalam bentuk *inter-bank call money* sebanyak 77% dibandingkan dengan instrumen lainnya. Menurut eksplorasi penulis, hal yang menjadi daya tarik ini karena *inter-bank call money* merupakan instrumen pasar uang antar bank yang merupakan salah satu sarana untuk memenuhi likuiditas bank melalui kegiatan pinjam meminjam antara suatu bank dengan bank-bank lain, sehingga lebih diminati. Sementara dalam jenis penempatan pada Bank Indonesia, didominasi dalam bentuk FASBI atau Fasilitas Simpanan Bank Indonesia yaitu sebanyak 52% dari jumlah entitas sampel.

#### 4. Efek-efek

Efek-efek merupakan surat berharga perbankan yang umumnya terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tagihan treasuri asing, unit penyertaan reksa dana, *Credit-Linked Notes*, serta obligasi dan instrumen utang lainnya yang diperdagangkan baik di pasar uang maupun pasar modal. Efek-efek pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, efek-efek akan dicatat sesuai dengan kategorinya. Efek-efek dapat dikategorikan sebagai *Available For Sale*, *Fair Value Through Profit or Loss*, *Held To Maturity*, maupun *Loan and*

*Receivables* terlihat pada tabel 18. Dalam hal ini terdapat banyak entitas yang dalam pos efek-efeknya sekaligus mengkategorikan dan membaginya ke dalam tiga atau empat jenis kategori aset keuangan.

Tabel 18.  
Klasifikasi Efek-efek pada Entitas Perbankan Periode 2012-2014

No.	Efek-efek	Jumlah Entitas yang Menyajikan			Jumlah Entitas yang Tidak Menyajikan			Jumlah Entitas yang Diteliti
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	
1.	FVTPL	18	13	15	13	18	16	31
2.	HTM	21	22	24	10	9	7	31
3.	L/R	9	7	7	22	24	24	31
4.	AFS	25	26	25	6	5	6	31

Sumber data : Laporan keuangan perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Rata-rata sebanyak 82% entitas lebih tertarik untuk mengkategorikan efek yang dimilikinya sebagai jenis tersedia untuk dijual, hal ini juga terlihat pada tabel 19 dimana komponen efek jenis AFS lebih kompleks dibandingkan dengan kategori lainnya. Kemudian diikuti oleh pengkategorian aset keuangan dalam HTM (72%), FVTPL (49%) dan terakhir L/R (25%). Perbankan tentu lebih tertarik pada AFS dalam menanamkan dananya di pasar uang atau pasar modal agar lebih mudah dicairkan dan mendapatkan penghasilan. Sementara L/R kurang diminati karena perbankan telah memiliki pos utama tersendiri dalam pos pinjaman yang diberikan sebagai investasi jangka panjangnya.

Efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, sedangkan untuk efek-efek yang diperdagangkan (*trading securities*) dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar efek-efek diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Efek-efek yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi komprehensif menggunakan metode suku bunga efektif, laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dalam laba rugi komprehensif. Perubahan nilai wajar lainnya atas efek-efek dalam kategori aset keuangan apapun diakui dalam ekuitas sampai dengan efek-efek tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Tabel 19.  
Komponen Efek-efek Berdasarkan Kategori yang Disajikan Entitas Perbankan  
Periode 2012-2014

No.	Kategori aset Keuangsn	Mayoritas Bentuk Efek yang Disajikan dalam Laporan Keuangan Perbankan
1.	<i>FVTPL</i>	<i>Credit Linked Notes</i> , Efek Beragun Aset, Obligasi Korporasi, Obligasi Pemerintah, Obligasi Ritel, Reksadana, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia
2.	HTM	<i>Credit Linked Notes</i> , Efek Beragun Aset, <i>Medium Term Notes</i> , <i>Negotiable Certificate of Deposits</i> , Obligasi Korporasi, Obligasi Pemerintah, Obligasi Subordinasi, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, Bank Indonesia, SKBDN, Wesel Ekspor, Wesel Tagih
3.	L/R	Promes, SKBDN, Wesel Ekspor, Wesel Taguh
4.	AFS	Efek Beragun Aset, Investasi dalam Saham, <i>Medium Term Notes</i> , Obligasi Korporasi, Obligasi Pemerintah, Obligasi Ritel, Obligasi Subordinasi, Reksadana, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Perbendaharaan Negara, Surat Utang Negara, <i>Zero Coupon Bound</i>

Sumber data : CALK entitas perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

#### 5. Tagihan Wesel Ekspor

Tagihan wesel ekspor adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan secara diskonto dan dijaminan oleh bank lainnya. Pos ini muncul karena terdapat warkat tagihan yang ditarik oleh nasabah/eksportir dari adanya realisasi ekspor. Tagihan wesel ekspor dalam entitas perbankan keseluruhan diakui dalam klasifikasi *Loan and Receivables*.

Terdapat beberapa perbedaan dalam menyajikan akun tagihan wesel ekspor. Beberapa entitas perbankan langsung menyajikan akun tagihan wesel ekspor pada laporan posisi keuangannya, namun adapula yang tagihan wesel ekspornya berada dalam satu akun dengan efek-efek.

Tabel 20.  
Jumlah Entitas Perbankan yang Menyajikan Pos Wesel Ekspor Periode 2012-2014

No.	Pos dalam Laporan Posisi Keuangan	Entitas yang Menyajikan			Entitas yang Tidak Menyajikan			Jumlah Entitas yang Diteliti
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	
1.	Wesel Ekspor	18	17	17	13	14	14	31

Sumber data : Laporan posisi keuangan perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Pada tahun 2012 tagihan wesel ekspor disajikan pada laporan keuangan perbankan sebanyak 58%. Diantaranya sebanyak 16% nya disajikan langsung dalam

laporan posisi keuangan sedangkan 42% nya disajikan sebagai komponen efek-efek dalam catatan atas laporan keuangan.

Pada tahun 2013 dan 2014, wesel ekspor disajikan sebanyak 55% atas entitas perbankan. 13% dari jumlah tersebut menyajikan wesel ekspor secara langsung di dalam laporan posisi keuangan, sedangkan 42% nya disajikan sebagai komponen efek-efek dalam penjelasan tambahan. Pada tahun 2012 hanya entitas AGRO, BBNI, BBRI, BJBR dan BABP yang menyajikan pos ini, sementara tahun 2013 dan 2014 AGRO tidak menyajikan kembali sama hal nya pada BABP di tahun 2014.

## 6. Obligasi Pemerintah

Obligasi pemerintah adalah obligasi (surat utang) yang diterbitkan oleh pemerintah termasuk obligasi rekapitalisasi yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka rekapitalisasi bank umum. Obligasi pemerintah dalam perbankan memiliki sifat yang sama dengan efek-efek. Obligasi pemerintah diukur sesuai dengan kategori aset keuangan. Entitas perbankan mengkategorikan obligasi pemerintah termasuk pada jenis AFS, L/R dan FVTPL terlihat pada tabel berikut :

Tabel 21.

### Klasifikasi Pos Obligasi Pemerintah dalam Entitas Perbankan Periode 2012-2014

No.	Obligasi Pemerintah	Jumlah Entitas yang Mengklasifikasi			Jumlah Entitas yang Tidak Mengklasifikasi			Jumlah Entitas yang Diteliti
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	
1.	FVTPL	5	6	6	26	25	25	31
2.	HTM	5	4	3	26	27	28	31
3.	L/R	-	-	-	31	31	31	31
4.	AFS	8	8	8	23	23	23	31

Sumber data : CALK entitas perbankan 2012-2014(diolah penulis)

Untuk satu pos akun obligasi pemerintah, entitas membaginya kedalam dua atau tiga jenis kategori aset keuangan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa dalam rata-rata entitas lebih banyak yang mengkategorikan jenis obligasi pemerintahnya dalam bentuk *Available For Sale*. Berdasarkan eksplorasi penulis, hal ini dikarenakan perbankan lebih tertarik pada aset keuangan aktif, yaitu yang akan dapat dijual sewaktu-waktu tanpa jatuh tempo. Entitas tersebut diantaranya BBRI, BBTN, BDMD, BMRI, BNGA, MAYA, NISP dan SDRA.

Berdasarkan rata-rata persentase, sebanyak 13% dan 18% entitas telah mengklasifikasikan obligasi pemerintahnya pada kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan FVTPL. Pada dasarnya, pos obligasi pemerintah yang dimiliki ini merupakan obligasi rekapitalisasi. Obligasi rekapitalisasi merupakan obligasi yang diterbitkan pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi bank-bank umum dan bertujuan untuk mengatasi kesulitan permodalan bagi bank. Peserta program rekapitalisasi ini telah diatur dan ditentukan dalam lingkup bank umum, BUMN dan

BPD. Sedangkan untuk obligasi non rekapitulasi, akan disajikan dalam komponen efek-efek oleh perbankan pada kategori aset keuangan yang berbeda.

#### 7. Efek-efek yang dibeli dengan janji Dijual Kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali merupakan pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan yang sajikan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilainya. Selisih antara harga beli dan jualnya akan diakui sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan akan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual dengan menggunakan suku bunga efektif. Efek-efek jenis ini dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan.

Tabel 22.

Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali Periode 2012-2014

Aset Keuangan	Jumlah Entitas yang Menyajikan			Jumlah Entitas yang Tidak Menyajikan			Jumlah Entitas yang Diteliti
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	12	11	13	19	20	18	31

Sumber data : Laporan posisi keuangan perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Tabel 22 memberikan informasi jumlah entitas yang menyajikan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali rata-rata sebanyak 39% selama periode penelitian dari keseluruhan jumlah entitas perbankan yang diteliti.

Pos efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali hanya disajikan dalam entitas BBKA, BBKP, BBNI, BBRI, BDMD, BJBR, BKSW, BMRI, BNGA, BNII, BNLI, BSIM, BTPN, MEGA, NISP dan PNB. Seluruh entitas yang menyajikan akun efek yang dibeli dengan janji dijual kembali mengkategorikannya termasuk dalam aset keuangan jenis *Loan and Receivable* kecuali entitas BJBR.

Pada pengungkapan lain nilai wajar, BJBR mengkategorikan akun efek yang dibeli dengan janji dijual kembalinya pada *Available For Sale* untuk laporan keuangan periode tahun 2012 dan *Held to Maturity* untuk tahun laporan keuangan tahun 2014. Hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan dalam informasi akun bersangkutan bahwa efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau L/R.

#### 8. Tagihan Derivatif

Tagihan derivatif ini adalah transaksi-transaksi instrumen keuangan seperti kontrak berjangka mata uang, swap mata uang asing, swap atas suku bunga juga transaksi spot yang bertujuan untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang dan risiko tingkat bunga. Tagihan derivatif diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, sehingga setiap keuntungan dan

kerugian yang terjadi atas adanya perubahan nilai wajar dari akun ini diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Tabel 23.  
Penyajian Komponen Pos Tagihan Derivatif pada Entitas Perbankan Periode 2012-2014

No.	Tagihan derivatif	Jumlah Entitas yang Memiliki			Jumlah Entitas yang Diteliti
		2012	2013	2014	
1.	Forward Mata Uang Asing	5	4	4	31
2.	Spot Mata Uang Asing	7	6	7	31
3.	Kontrak Tunai Valuta Asing	3	3	3	31
4.	Kontrak Berjangka Valuta Asing	8	8	8	31
5.	Swap Mata Uang Asing	12	10	11	31
6.	Swap Suku Bunga	5	5	5	31
7.	<i>Credit Linked Notes</i>	1	1	1	31
8.	<i>Credit Default Swap</i>	1	-	-	31
9.	<i>Cross Currency Swap</i>	2	2	2	31
10.	Kontrak Opsi Mata Uang Asing	1	1	1	31
11.	<i>Dual Currency Return</i>	1	1	1	31

Sumber data : CALK entitas perbankan 2012-2014(diolah penulis)

Satu entitas perbankan memiliki lebih dari satu komponen tagihan derivatif. Berdasarkan tabel 23 tersebut, dilihat dari jumlah entitas mayoritas memiliki tagihan derivatif dalam bentuk swap mata uang asing. Swap mata uang asing atau *currency swap* ini merupakan suatu kesepakatan pertukaran antara dua pihak atas sejumlah pokok pinjaman dan pembayaran bunganya dalam suatu jenis mata uang oleh satu pihak dengan sejumlah nominal dan pembayaran bunganya dalam satu jenis mata uang lainnya oleh pihak lain.

Berdasarkan eksplorasi, swap mata uang asing bertujuan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan risiko fluktuasi kurs. Tentu swap mata uang asing ini lebih diminati oleh perbankan. Karena keuntungan utama dari transaksi ini adalah dapat bertindak sebagai perantara dalam kegiatan swaps dan mendapatkan *fee* yang berkisar antara 0,25%-1% dari nilai nominal. Tentu hal ini merupakan pendapatan yang menarik dibandingkan dengan pendapatan dari sektor kredit yang berisiko tinggi. Selain itu sifatnya yang luwes dan menjangkau jangka waktu yang lebih panjang menjadi kelebihan swap ini dibanding transaksi derivatif lainnya.

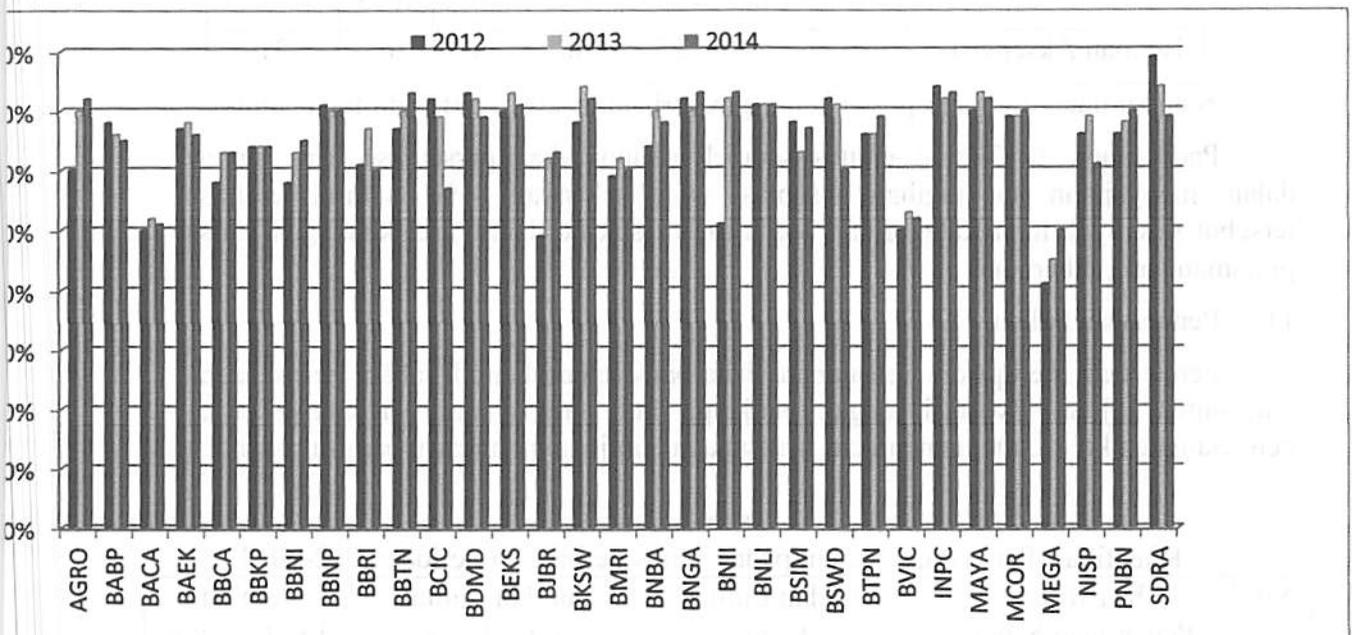
Tagihan derivatif yang termasuk ke dalam instrumen keuangan merupakan derivatif yang tidak terkait dan tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Derivatif akan dicatat sebagai aset oleh entitas apabila memiliki nilai wajar yang

positif dan sebaliknya, akan dicatat sebagai liabilitas (liabilitas/utang derivatif) ketika memiliki nilai wajar yang negatif. Tagihan derivatif tidak tersaji dalam 13 entitas perbankan dalam laporan keuangannya yaitu AGRO, BACA, BBKA, BBTN, BEKS, BJBR, BNBA, BNLI, BTPN, BVIC, MAYA, MCOR dan SDRA.

#### 9. Pinjaman yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan pada kontrak kesepakatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur ini diwajibkan untuk melunasi kredit pada jangka waktu tertentu dengan imbalan bunganya.

Dalam laporan keuangan perbankan, pinjaman yang diberikan merupakan pos yang memberikan proporsi tinggi atas jumlah aset keuangan, hal tersebut karena aktivitas utama perbankan yang banyak memberikan kredit kepada nasabahnya. Berikut ini adalah posisi keuangan yang meliputi total aset, total piutang dan persentase piutang yang dibandingkan dengan total aset pada laporan keuangan perbankan periode 2012-2014:



Gambar 4.

#### Pergerakan Persentase Pinjaman yang Diberikan terhadap Aset Entitas Perbankan pada Tanggal 31 Desember 2012-2014

Dari gambar tersebut terlihat bahwa karena pinjaman yang diberikan memiliki proporsi yang tinggi terhadap aset keuangan maka memiliki proporsi yang besar pula terhadap total aset dalam kisaran rata-rata 67% atas seluruh entitas perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pinjaman yang diberikan sangat berpengaruh terhadap aset perusahaan maka penurunan nilai pada pinjaman yang diberikan pun akan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan aset pada entitas perbankan.

Pinjaman/kredit yang diberikan ini merupakan aset perbankan yang paling sensitif sehingga disajikan secara terpisah menurut terkait atau tidak terkait dengan bank. Hal ini dilakukan sebagai pengawasan kinerja bank dalam prinsip transparansi. Transparansi dalam arti deteksi dini adanya bank yang memberikan kredit untuk

anak perusahaannya sendiri, atau untuk perusahaan lain dalam satu kelompok usaha bank atau dengan pihak-pihak lain yang terafiliasi. Hal ini diterapkan untuk mendeteksi adanya kemungkinan pelanggaran syarat pemberian pinjaman.

#### 10. Tagihan Akseptasi

Tagihan akseptasi diungkapkan dalam klasifikasi *loan and receivable* dan merupakan transaksi *letter of credit (L/C)* dan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang diaksep oleh bank pengaksep (dibahas pada BAB II). Pada tabel 24 disajikan jumlah entitas yang memiliki tagihan akseptasi di dalam laporan posisi keuangannya.

Tabel 24.

Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos Tagihan Akseptasi Periode 2012-2014

Pos Aset Keuangan	Jumlah Entitas yang Menyajikan			Jumlah Entitas yang Tidak Menyajikan			Jumlah Entitas yang Diteliti
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Tagihan Akseptasi	25	25	25	6	6	6	31

Sumber data : Laporan posisi keuangan perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Pada tahun 2012-2014 entitas sampel menunjukkan persentase yang sama dalam menyajikan pos tagihan akseptasi yaitu sebanyak 81%. Seluruh entitas tersebut serempak mengkategorikan pos ini termasuk ke dalam aset keuangan jenis pinjaman yang diberikan.

#### 11. Penyertaan Saham

Penyertaan merupakan penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, ikut serta dalam perusahaan lain, penyelamatan kredit, mengendalikan perusahaan lain juga menguasai pangsa pasar.

Tabel 25.

Klasifikasi Penyertaan Saham pada Entitas Perbankan Periode 2012-2014

No.	Klasifikasi Penyertaan Saham	Jumlah Entitas yang Mengklasifikasi			Jumlah Entitas yang Tidak Mengklasifikasi			Jumlah Entitas yang Diteliti
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	
1.	FVTPL	1	1	1	30	30	30	31
2.	HTM	0	0	0	31	31	31	31
3.	L/R	5	5	5	26	26	26	31
4.	AFS	6	7	7	25	24	24	31

Sumber data : CALK entitas perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Dari tabel 25 entitas yang mengklasifikasikan penyertaan saham sebagai FVTPL adalah BBRI, sebagai L/R diantaranya BBKP, BBNI, BNGA, INPC dan SDRA sedangkan sebagai AFS terdiri dari entitas AGRO, BJBR, BMRI, BNBA, BTPN, BVIC dan PNB. Penyertaan saham tersebut dicatat menggunakan metode

biaya atau *Cost Methode* untuk kepemilikan dibawah 20% dan metode ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai 50%.

Penyertaan saham pada emiten perbankan ini bersifat jangka panjang, berbeda dengan efek-efek yang merupakan investasi jangka pendek seperti investasi pada SBI, *commercial paper* dan lain sebagainya. Investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan saham ini tidak sekedar untuk memperoleh pendapatan namun bisa juga untuk menyisihkan atau membentuk dana khusus dan mengendalikan perusahaan lain yang sahamnya dimiliki oleh perbankan.

## 12. Aset lain-lain

Beberapa entitas mengungkapkan aset lain-lain termasuk dalam kategori *loan and receivable*, hal ini disebabkan karena terdapat komponen dalam aset lain-lain yang dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Entitas yang menyajikan aset lain-lain dalam klasifikasi pinjaman yang diberikan diungkapkan pada lampiran 7.

Sebanyak 16% entitas tidak mengklasifikasikan aset lain-lainnya sebagai aset keuangan, yaitu entitas BAEK, BBKA, BCIC, BNBA, BVIC dan MAYA (lihat lampiran 7), aset lain-lain tidak dikategorikan sebagai aset keuangan karena tidak ada penjelasan yang memadai pada pengungkapan instrumen keuangan. Pengungkapan tersebut tidak dijelaskan dalam pembagian klasifikasi aset keuangan dan dalam pengungkapan lain yang memberikan informasi mengenai nilai tercatat dan nilai wajar aset keuangan yang telah disajikan berdasarkan kategorinya. Sebanyak 84% entitas perbankan mengkategorikan aset lain-lain sebagai aset keuangan yang diperhitungkan.

### 4.1.2.2. Liabilitas Keuangan

Pada bagian ini, akan memberikan informasi mengenai gambaran umum liabilitas keuangan perbankan. Liabilitas keuangan perbankan dari tahun 2012 hingga 2014 disajikan berdasarkan pada akun-akun tertentu, diantaranya :

#### 1. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas yang sifatnya “segera” untuk dibayarkan kepada pihak lain, sehingga apabila ditagih, bank harus segera membayarnya. Liabilitas segera dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Pada entitas perbankan (94% dari jumlah entitas yang diteliti), seluruh liabilitas segera termasuk dalam liabilitas keuangan, kecuali untuk entitas BBKA dan BKSW.

Pada laporan keuangan BBKA item liabilitas segera tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan karena adanya reklasifikasi liabilitas segera yang dilakukan pada tahun 2011. Sedangkan pada entitas BKSW, liabilitas segera disajikan dalam posisi keuangan namun tidak diungkapkan termasuk dalam kategori instrumen keuangan, hal ini dikarenakan pertimbangan manajemen yang tidak mengkategorikannya sebagai liabilitas keuangan. Untuk entitas selain yang sudah disebutkan, telah menyajikan liabilitas segera dalam laporan posisi keuangan dan telah mengungkapkan bahwa liabilitas segera yang dimiliki termasuk dalam komponen liabilitas keuangan.

## 2. Simpanan Nasabah dan Simpanan dari Bank Lain

Simpanan nasabah terdiri dari simpanan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito berjangka. Perbedaan diantara jenis simpanan ini terletak dari cara penarikannya. Untuk giro penarikannya dapat dilakukan kapan saja baik dengan menggunakan cek, ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun dengan pemindahbukuan dengan bilyet giro. Tabungan penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu melalui counter, ATM, ataupun pemindahbukuan dan penarikannya tidak bisa dilaksanakan dengan menggunakan cek. Sedangkan deposito penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara yang menyimpan dengan bank yang bersangkutan. Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Simpanan nasabah pada semua entitas perbankan memberikan jumlah yang besar terhadap proporsi liabilitas keuangan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber dana bank paling besar berasal dari simpanan masyarakat.

Tabel 26.

Komponen Pos Simpanan dari Bank Lain pada Entitas Perbankan Periode 2012-2014

No.	Simpanan dari Bank Lain	Jumlah Entitas yang Memiliki			Jumlah Entitas yang Tidak Memiliki			Jumlah Entitas yang Diteliti
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	
1.	Giro	31	31	31	-	-	-	31
2.	Deposito Berjangka	29	29	29	2	2	2	31
3.	Tabungan	20	19	20	11	12	12	31
4.	Interbank Call Money	18	21	23	13	10	8	31
5.	Deposito On Call	3	4	3	28	27	28	31

Sumber data : CALK entitas perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Simpanan dari bank lain yaitu simpanan dari bank lain baik lokal maupun luar negeri yang dicatat sebagai liabilitas terhadap bank lain. Simpanan dari bank lain ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Perlu diketahui, bahwa satu entitas dapat memiliki lebih dari satu komponen (sebagai contoh: entitas BBRI memiliki simpanan dari bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan dan Interbank Call Money). Berdasarkan pada tabel 26 sebanyak 100% atau seluruh entitas perbankan memiliki dana simpanan dari bank lain dalam bentuk giro mengalahkan komponen simpanan dari bank lain dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, *interbank call money* dan *deposito on call*. Hal ini karena rekening simpanan dari bank lain dalam bentuk giro digunakan sehari-hari dalam proses aktivitas transaksi antar nasabah bank yang berbeda, sehingga penting sifatnya untuk dimiliki oleh perbankan.

### 3. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang diterima. Pos ini dimunculkan karena terkadang bank memerlukan uang tunai yang lebih banyak dan mendesak, maka bank yang bersangkutan dapat meminjam ke bank bank lain maupun pasar uang. Jumlah pinjaman itu dimasukkan dalam rekening pinjaman yang diterima baik valuta rupiah maupun asing.

Tabel 27.

Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos Pinjaman yang Diterima Periode 2012-2014

Liabilitas Keuangan	Jumlah Entitas yang Menyajikan			Jumlah Entitas yang Tidak Menyajikan			Jumlah Entitas yang Diteliti
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Pinjaman yang Diterima	17	18	16	14	13	15	31

Sumber data : Laporan posisi keuangan perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Terdapat 58% perbankan pada tahun 2013 yang memiliki pinjaman yang diterima terbanyak dibandingkan tahun 2012 dan 2013. Pinjaman yang diterima ini diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman yang diterima harus disajikan secara terpisah menurut jenis valutanya. Hal ini diterapkan untuk memudahkan user mengetahui NOP atau *Net Open Position*. NOP adalah selisih antara aset dan kewajiban dalam valuta asing.

### 4. Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan disajikan sebesar jumlah pembelian kembali yang dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar dimuka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan suku bunga efektif.

Tabel 28.

Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali Periode 2012-2014

Liabilitas Keuangan	Jumlah Entitas yang Menyajikan			Jumlah Entitas yang Tidak Menyajikan			Jumlah Entitas yang Diteliti
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	6	8	8	25	23	23	31

Sumber data : Laporan posisi keuangan perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Berdasarkan tabel 28, jumlah entitas yang menyajikan pos ini hanya sebanyak 19% pada tahun 2012 dan meningkat 26% pada tahun 2013 dan 2014. Efek ini merupakan kebalikan dari efek yang dibeli dengan tujuan dijual kembali. Efek ini akan diakui sebagai aset bagi penjual sedangkan janji dibeli kembali diakui sebagai kewajiban. Efek ini menarik bagi perbankan karena dianggap merupakan sumber pembiayaan yang murah. Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali secara bersamaan diakui oleh seluruh entitas sampel sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

#### 5. Liabilitas Derivatif

Komponen dari liabilitas derivatif ini memiliki kesamaan dengan pos tagihan derivatif. Hanya saja derivatif ini menjadi kewajiban ketika terjadi kerugian atas kontrak derivatif. Liabilitas derivatif ini muncul karena adanya selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif. Liabilitas derivatif termasuk ke dalam kelompok jenis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Jumlah entitas perbankan yang melakukan penyajian terhadap pos ini terlihat dalam tabel 29.

Tabel 29.

Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos Liabilitas Derivatif Periode 2012-2014

Liabilitas Keuangan	Jumlah Entitas yang Menyajikan			Jumlah Entitas yang Tidak Menyajikan			Jumlah Entitas yang Diteliti
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Liabilitas Derivatif	18	20	20	13	11	11	31

Sumber data : Laporan posisi keuangan perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Berdasarkan tabel 29 terlihat pada tahun 2012 sebanyak 58% menyajikan liabilitas derivatif dan meningkat persentase penyajiannya pada tahun 2013 menjadi 66% serta pada tahun 2014 stabil dengan persentase yang sama. Dengan kata lain, kerugian bank atas transaksi derivatifnya meningkat sehubungan dengan meningkatnya transaksi derivatif yang terlihat pada jumlah perbankan yang memiliki tagihan derivatif (halaman 60 skripsi ini). Atas instrumen derivatif yang mencerminkan potensi kerugian bagi bank ini, maka akan diakui sebagai kewajiban.

#### 6. Liabilitas Akseptasi

Liabilitas akseptasi merupakan pos yang memiliki definisi yang sama dengan tagihan akseptasi. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Sama halnya dengan liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi juga mencerminkan selisih negatif yang berindikasi pada kerugian atas transaksi akseptasi.

Tabel 30.  
Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos Liabilitas Akseptasi Periode 2012-2014

Liabilitas Keuangan	Jumlah Entitas yang Menyajikan			Jumlah Entitas yang Tidak Menyajikan			Jumlah Entitas yang Diteliti
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Liabilitas Akseptasi	23	24	25	8	7	6	31

Sumber data : Laporan posisi keuangan perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Dari tabel 30 terlihat bahwa jumlah bank yang memiliki liabilitas akseptasi meningkat setiap tahunnya. Entitas yang tidak memiliki liabilitas akseptasi diantaranya entitas yang juga tidak memiliki tagihan akseptasi pada sisi asetnya.

#### 7. Efek-efek yang Diterbitkan

Untuk menambah pemasukan uang, bank biasanya menerbitkan sekuritas atau surat berharga yang dijual melalui pasar uang. Surat berharga ini diantaranya yaitu promes, *Letter of Credit* dan lain sebagainya. Besarnya dana yang diperoleh dari penerbitan surat berharga ini dimasukkan dalam rekening efek-efek yang diterbitkan

Tabel 31.

Komponen Efek-efek Yang Diterbitkan yang Dimiliki Entitas Perbankan Periode 2012-2014

No.	Simpanan dari Bank Lain	Jumlah Entitas yang Memiliki			Jumlah Entitas yang Tidak Memiliki			Jumlah Entitas yang Diteliti
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	
1.	Utang Obligasi	11	15	15	20	17	17	31
2.	<i>Medium Term Notes</i>	4	7	8	27	24	23	31
3.	<i>Negotiable Certificate of Deposits (NCD)</i>	0	0	1	31	31	30	31
4.	<i>Call Money</i>	1	1	0	30	30	31	31
5.	Bunga yang Masih Harus Dibayar	0	1	1	31	30	30	31
6.	Cek Perjalanan	2	2	2	29	29	29	31

Sumber data : CALK entitas perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Penting untuk diketahui, bahwa satu entitas dapat memiliki lebih dari satu komponen (sebagai contoh: entitas BBNi memiliki komponen efek-efek yang diterbitkan dalam bentuk utang obligasi, *medium term notes* dan cek perjalanan). Berdasarkan tabel tersebut, komponen simpanan bank lain pada perbankan paling banyak dimiliki dalam bentuk obligasi. Hal ini dikarenakan dari sisi pembeli (bank lain) banyak yang berminat dan tertarik dengan penerbitan obligasi yang memberikan pendapatan bunga secara rutin dan bunga yang lebih tinggi dibandingkan deposito.

## 8. Pinjaman Subordinasi

Pinjaman subordinasi pada entitas perbankan merupakan pinjaman yang baru akan dibayar setelah obligasi yang memiliki prioritas yang lebih tinggi dilunasi terlebih dahulu. Rekening ini digunakan untuk menampung semua pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain yang hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi semua kewajiban tertentu. Hak tagihnya rekening ini berlaku paling akhir dari semua simpanan dan pinjaman yang diterima dalam hal terjadi likuidasi. Pinjaman subordinasi di akui sebesar biaya perolehan diamortisasi.

Tabel 32.

Jumlah Entitas yang Menyajikan Pinjaman Subordinasi Periode 2012-2014

Liabilitas Keuangan	Jumlah Entitas yang Menyajikan			Jumlah Entitas yang Tidak Menyajikan			Jumlah Entitas yang Diteliti
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Pinjaman Subordinasi	9	8	9	22	23	22	31

Sumber data : Laporan posisi keuangan perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun tahun 2012 dan 2014 sebanyak 29% entitas memiliki pinjaman subordinasi sedangkan tahun 2013 hanya sebanyak 26%. Pada akhir periode penelitian, entitas AGRO, BABP, BACA, BAEK, BBKA, BBNI, BBTN, BCIC, BDMD, BEKS, BJBR, BKSU, BNBA, BSIM, BSWD, BTPN, BVIC, MAYA, NISP, PNB dan SDRA tidak memiliki pinjaman subordinasi hal ini terlihat dari tidak adanya penyajian pada laporan posisi keuangannya.

## 9. Liabilitas Lain-lain

Seperti halnya pada aset lain-lain, liabilitas keuangan pada pos liabilitas lain-lain memiliki keberagaman perbedaan atas laporan keuangan entitas perbankan (disajikan dalam lampiran 8). Hal tersebut dikarenakan terdapat pos-pos komponen dalam liabilitas lain-lain yang termasuk dalam liabilitas keuangan serta diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan adapula yang tidak termasuk liabilitas keuangan. Informasi perbedaan ini didapatkan penulis dari penjelasan klasifikasi instrumen keuangan, namun informasi perbedaan lebih komprehensif didapatkan dari pengungkapan lain berupa perbandingan antara nilai wajar dan nilai tercatat liabilitas keuangan pos liabilitas lain-lain yang memiliki jumlah yang berbeda dari jumlah liabilitas lain-lain pada laporan posisi keuangan.

### 4.2. Analisis Penyajian Instrumen Keuangan

#### 4.2.1. Analisis Penyajian dalam Karakteristik Relevan

Kualitas primer suatu informasi akuntansi ditentukan oleh relevansinya. Relevansi ini dapat diukur melalui maksud penggunaan informasi dalam laporan keuangan. Informasi relevan disini adalah informasi yang menimbulkan perbedaan, maksudnya informasi tersebut dapat memperkuat pengharapan yang ada. Jika pengambil keputusan tidak merasa diperkuat oleh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, maka informasi tersebut bisa dikatakan tidak mengandung relevansi. Namun, jika pengambil keputusan dapat memperhitungkan konsekuensi-

konsekuensi yang akan timbul di kemudian hari, maka informasi tersebut dikatakan relevan.

Berdasarkan intisari dari pengertian diatas, maka penulis mengambil karakteristik umum yang dapat dijadikan patokan yang memenuhi prinsip relevansi yaitu: "Entitas perbankan menyajikan informasi struktur dan besarnya aset keuangan yang dimiliki" dalam laporan-laporan yang ada pada laporan keuangan. Hal ini bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan ketika akan meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereksi terhadap situasi yang merugikan.

Penyajian struktur aset keuangan dimulai dari pos dalam klasifikasi aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan tersedia untuk dijual. Hal ini dianggap perlu untuk mengetahui mengenai bagaimana keterkaitan relevansi pos tersebut dengan pos-pos lain pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas.

#### 4.2.1.1. Aset Keuangan

Berdasarkan dengan penyajian aset keuangan, tabel berikut ini menyajikan jumlah entitas perbankan yang menyajikan aset keuangannya sesuai dengan kategori dalam laporan keuangan (rincian disajikan pada lampiran 4):

Tabel 33.

Jumlah Entitas Perbankan yang Mengungkapkan Aset Keuangan Berdasarkan Jenisnya Periode 2012-2014

Jenis Aset Keuangan	2012		2013		2014	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
FVTPL	26	84%	25	81%	22	71%
HTM	23	74%	24	77%	24	77%
L/R	31	100%	31	100%	31	100%
AFS	26	84%	26	84%	25	81%
Nilai wajar dan biaya perolehan lainnya	5	16%	6	19%	6	19%

Sumber data : CALK entitas perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua entitas perbankan mengungkapkan memiliki semua jenis aset keuangan dalam laporan keuangannya. Hal tersebut dikarenakan perbankan memiliki persyaratan tersendiri dalam menentukan jenis aset keuangannya. Jenis L/R memiliki persentase lengkap dan menyeluruh dikarenakan kegiatan usaha perbankan yang pada umumnya melakukan pemberian kredit, jenis aset keuangan ini dinyatakan dalam akun piutang (kredit/pinjaman yang diterima, piutang pembiayaan konsumen maupun piutang sewa pembiayaan). Jenis L/R entitas perbankan juga mencakup kas, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-

efek, tagihan akseptasi dan aset lain-lain. Aset lain-lain dalam laporan keuangan perbankan memiliki ketentuan masing-masing yang berbeda dalam penetapan termasuk aset keuangan atau non aset keuangan.

Aset keuangan yang dinyatakan dalam tabel sebagai nilai wajar dan biaya perolehan lainnya merupakan aset keuangan milik entitas perbankan yang menjalankan aktivitas usaha berbasis syariah. Aset keuangan ini dinyatakan dalam investasi sukuk yang penyajian, pengakuan, pengukuran dan pengungkapannya diatur dalam PSAK 110.

Diperhatikan dari hasil persentase, FVTPL, HTM dan AFS lebih sedikit bila dibandingkan dengan aset keuangan jenis L/R. Bila dikaitkan dengan jenis kegiatan perbankan dan jenis usahanya, hal ini mengindikasikan bahwa perbankan lebih berfokus dan lebih menyukai aset keuangan jangka menengah dan jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Sementara itu berdasarkan penelitian atas klasifikasi jenis aset keuangan tersebut, diperoleh informasi relevansi diantaranya :

#### 1. Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL)

Berdasarkan informasi yang disajikan pada tabel 33 tahun 2012 aset keuangan jenis FVTPL dimiliki oleh 84% entitas perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Persentase tersebut dihasilkan dari jumlah penyajian pos aset keuangan perbankan yaitu tagihan derivatif, efek yang diperdagangkan, efek-efek dan obligasi pemerintah.

Dalam 3 periode penelitian, FVTPL tidak terlihat pada laporan posisi keuangan entitas BEKS, BTPN, MAYA dan SDRA. Hal ini karena kelima entitas tersebut tidak memiliki pos tagihan derivatif, sedangkan pos efek-efek dan obligasi pemerintah tidak ada bagiannya yang diklasifikasikan sebagai FVTPL pada pengukurannya.

Sementara itu, dalam laporan laba rugi komprehensif, pos yang berkaitan dalam relevansi aset keuangan jenis ini adalah pos keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan yaitu "keuntungan/kerugian dari penjualan instrumen keuangan" dan "keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari kenaikan/penurunan nilai wajar instrumen keuangan".

Tabel 34.

Jumlah Entitas yang Menyajikan Pendapatan terkait dengan *Trading Securities* Pada Laporan Keuangan Perbankan

Jumlah Entitas yang Memiliki Aset Keuangan Diperdagangkan			Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos "Pendapatan bersih dari instrumen yang diperdagangkan"			Persentase Penyajian		
2012	2013	2012	2013	2014	2014	2012	2013	2014
4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%

Sumber data: Laporan laba/rugi komprehensif perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Dari 84% jumlah entitas yang menyajikan pos jenis FVTPL pada laporan posisi keuangan tahun 2012-2014, sebanyak 13% nya memiliki aset keuangan diperdagangkan. Pemenuhan relevansi dalam kategori ini telah dikuti oleh seluruh entitas yang memiliki aset diperdagangkan. Pemenuhan ini terlihat pada tabel 33 dengan adanya penyajian pos “pendapatan bersih dari instrumen yang diperdagangkan” atas 13% jumlah tersebut. Selain itu adanya keseragaman dalam menentukan jenis pendapatan ini, yaitu termasuk pendapatan operasional. Entitas yang memiliki *trading security* pada 3 periode penelitian diantaranya BBKA, BAEK, BBNI dan BNLI.

Pendapatan transaksi perdagangan dalam laporan laba rugi komprehensif entitas perbankan mencerminkan jumlah bersih (*net*). Jumlah bersih ini didapatkan dari hasil pendapatan bunga *trading securities*, keuntungan yang belum direalisasi dari nilai wajar *trading securities* dan keuntungan/kerugian atas penjualan *trading securities*.

Tabel 35.

Jumlah Entitas yang Menyajikan Keuntungan/Kerugian terkait dengan *FVTPL* Pada Laporan Keuangan Perbankan

Jumlah Entitas yang Menyajikan Aset Keuangan FVTPL			Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos “Keuntungan/Kerugian dari penjualan/perubahan nilai Wajar Instrumen Keuangan”			Persentase Penyajian		
2012	2013	2012	2013	2013	2014	2012	2013	2014
22	22	19	22	22	19	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan laba/rugi komprehensif perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Sementara itu pada tahun yang sama, dari 84% jumlah entitas yang menyajikan pos jenis FVTPL, sebanyak 71%nya memiliki aset keuangan yang pada perolehan awalnya diakui sebesar nilai wajar pada laporan laba rugi, efek-efek dan obligasi pemerintah. Seluruh entitas secara serempak telah menyajikan pos keuntungan dan kerugian yang relevan dengan aset keuangan FVTPL dari tahun 2012 hingga 2014.

Selain itu, FVTPL berkaitan juga dengan pos pendapatan bunga. Salah satu unsur penghasil pos pendapatan bunga ini juga berasal dari adanya pendapatan bunga dari aset keuangan berupa efek-efek atau investasi yang termasuk jenis FVTPL.

Tabel 36.

Jumlah Entitas yang Menyajikan Pendapatan Bunga terkait dengan *FVTPL* Pada Laporan Keuangan Perbankan

Jumlah Entitas yang Menyajikan FVTPL			Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos "Pendapatan Bunga" atas FVTPL			Persentase Penyajian		
2012	2013	2012	2013	2013	2014	2012	2013	2014
26	25	22	26	25	22	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan laba rugi komprehensif perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Pada tabel 36, seluruh entitas perbankan yang memiliki aset keuangan jenis FVTPL telah menyajikan pos pendapatan bunga. Informasi ini didapatkan dari penjelasan tambahan di dalam catatan atas laporan keuangan yang merupakan rincian dari pos pendapatan bunga.

## 2. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Dari tabel 33 dapat dilihat pada tahun 2012 bahwa aset keuangan jenis HTM hanya 74% dimiliki perbankan. HTM disajikan dalam bentuk pos efek-efek dan obligasi pemerintah. Entitas yang tidak mengklasifikasikan aset keuangan HTM adalah sebanyak 26% diantaranya entitas AGRO, BACA, BAEK, BEKS, BNII, MAYA, MEGA dan NISP.

HTM berkaitan dengan pos pendapatan bunga. Hal ini dikarenakan penerapan pengakuan HTM yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Amortisasi tersebut terjadi saat adanya pembayaran bunga pertama yang diterima entitas yang menerbitkan efek dan mengamortisasi premi/diskonto.

Tabel 37.

Jumlah Entitas yang Menyajikan Pendapatan Bunga terkait dengan *HTM* Pada Laporan Keuangan Perbankan

Jumlah Entitas yang Menyajikan HTM			Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos "Pendapatan Bunga"			Persentase Penyajian		
2012	2013	2012	2013	2014	2014	2012	2013	2014
23	24	24	23	24	24	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan laba/rugi komprehensif perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Berdasarkan penelitian, pada tahun penelitian 2012 dan 2013, seluruh entitas perbankan (100%) yang menyajikan aset keuangan jenis HTM telah menyajikan pos pendapatan bunga pada laporan laba rugi komprehensifnya. Sementara itu, pada tahun 2013, AGRO tidak mengungkapkan adanya komponen dari pendapatan bunga yang dihasilkan dari efek jenis HTM.

Selain pendapatan bunga, aset keuangan dimiliki untuk dijual akan mengalami penurunan nilai, ketika hal ini terjadi maka kerugian tersebut akan

diakui sebagai pengurang nilai tercatat investasi dan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai “Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai”.

### 3. Piutang dan Pinjaman yang Diberikan (L/R)

Aset jenis L/R yang menyumbang jumlah terbanyak dalam total aset keuangan perbankan ini terdapat dalam semua laporan posisi keuangan perbankan dari periode 2012-2014. Relevansi aset keuangan jenis ini memiliki keterkaitan dengan pos “pendapatan bunga” dalam laporan laba rugi komprehensif.

L/R merupakan aset keuangan yang pada saat pengakuan setelah pengakuan awalnya diakui pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Sehingga pendapatan dari aset keuangan jenis ini akan dilaporkan sebagai pendapatan bunga. Selain itu, dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai akan dilaporkan sebagai pengurang nilai tercatat L/R dan diakui pada laporan laba rugi komprehensif sebagai “Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai”.

Tabel 38.

Jumlah Entitas yang Menyajikan Pendapatan Bunga terkait dengan L/R Pada Laporan Keuangan Perbankan

Jumlah Entitas yang Menyajikan Aset Keuangan L/R			Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos “Pendapatan Bunga”			Persentase Penyajian		
2012	2013	2012	2013	2014	2014	2012	2013	2014
31	31	31	31	31	31	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan laba/rugi komprehensif perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Dari tabel 38 diketahui bahwa sangat riskan bagi perbankan untuk tidak menyajikan komponen pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan pada laporan keuangannya. Seluruh jumlah entitas perbankan tanpa ada pengecualian, telah menyajikan pos pendapatan bunga atas L/R. Hal ini dinyatakan dalam catatan atas laporan keuangan baik pendapatan bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan, Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, *Interbank Call money* dan lainnya.

### 4. Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan jenis *Available For Sale* ini pada entitas perbankan disajikan berdasarkan nilai wajarnya dengan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang berkaitan dengan perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual akan dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain atau OCI (*Other Comprehensive Income*) di dalam laporan laba rugi komprehensif dan akan dimasukkan sebagai bagian dari ekuitas. Jadi pada akhirnya, entitas akan melaporkan dalam laporan posisi keuangan efek tersedia untuk dijual pada nilai wajar, tetapi tidak melaporkan perubahan nilai wajar sebagai bagian dari laba bersih sampai efek tersebut dijual.

Tabel 39.  
Jumlah Entitas yang Menyajikan Keuntungan/Kerugian terkait dengan *AFS* Pada Laporan Keuangan Perbankan

Jumlah Entitas yang Diteliti			Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos "Keuntungan/Kerugian yang Belum Direalisasi atas <i>AFS</i> "			Persentase Penyajian		
2012	2013	2012	2012	2013	2014	2012	2013	2014
26	26	25	26	26	25	100%	100%	100%

Sumber data : Laporan laba rugi komprehensif perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pada tahun 2012 dan 2013 sebanyak 100% entitas perbankan telah menyajikan keuntungan/kerugian yang belum direalisasi atas aset keuangan yang termasuk kategori tersedia untuk dijual secara konsisten dari tahun 2012 hingga 2014.

Aset keuangan kategori tersedia untuk dijual juga memiliki keterkaitan terhadap satu pos di dalam laporan perubahan ekuitas. Pos tersebut adalah "laba/rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual. Pos ini adalah keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dan akan dimasukkan sebagai komponen ekuitas (dalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas) sampai saat keuntungan atau kerugian tersebut direalisasi.

Tabel 40.  
Jumlah Entitas yang Menyajikan Laba/Rugi Belum Direalisasi terkait dengan *AFS* Pada Laporan Keuangan Perbankan

No	Pos dalam Laporan Posisi Keuangan dan Perubahan Ekuitas	Jumlah Entitas yang Menyajikan		
		2012	2013	2014
1	Rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek dalam kelompok <i>AFS</i>	9	22	16
2	Laba yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek dalam kelompok <i>AFS</i>	17	4	9
<b>Total Entitas yang Menyajikan</b>		26	26	25
<b>Entitas yang Tidak Menyajikan</b>		0	0	0
<b>Jumlah Entitas yang Diteliti</b>		26	26	25

Sumber data : Laporan perubahan ekuitas perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Dari tabel 40 dapat terlihat bahwa pada tahun 2012, laba yang belum direalisasi memiliki persentase yang paling tinggi dibandingkan dengan dua tahun setelahnya yaitu sebesar 57%. Sementara itu tahun 2013 dan 2014 terdapat banyak

perbankan yang mengakui adanya kerugian yang belum direalisasi atas aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Jumlah entitas yang tidak menyajikan pos ini dalam laporan perubahan ekuitas maupun pada laporan posisi keuangan bagian ekuitasnya adalah sebesar 0% dari jumlah entitas yang diteliti (yang memiliki aset keuangan jenis AFS). Seluruh entitas telah menyajikan pos-pos yang memiliki relevansi dengan aset keuangan yang dimiliki.

#### 4.2.1.2. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Atas relevansi informasi aset keuangan, penting diteliti mengenai cadangan penurunan nilainya. Cadangan penurunan nilai ini secara langsung sangat berpengaruh terhadap ketepatan nilai aset keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Cadangan penurunan nilai ini ditentukan nilainya oleh manajemen perbankan bila ada bukti objektif bahwa aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Bukti objektif tersebut ditunjukkan dengan adanya peristiwa yang merugikan setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut telah terjadi dan berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal, misalnya adanya kredit yang tidak dapat dilunasi.

#### **Relevansi atas Penyajian CKPN pada Laporan Posisi Keuangan**

Pada laporan posisi keuangan terdapat beberapa entitas yang menyajikan secara langsung akun cadangan kerugian penurunan nilai. Akun cadangan penurunan ini disajikan bawah jenis akun-akun yang mengalami penurunan nilai. Namun, selain itu ada beberapa entitas yang tidak menyajikan cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan sehingga nilai nominal masing-masing akun aset keuangan sudah mencerminkan jumlah yang netto (sudah dikurangi CKPN). Entitas yang tidak menyajikan akun cadangan kerugian penurunan nilai pada neraca, mengungkapkannya lebih lanjut di dalam Catatan atas Laporan Keuangannya pada masing-masing penjelasan akun yang tergolong aset keuangan.

Adapula, entitas yang menyajikan CKPN, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut dan tidak ada identifikasimenegenai jenis *impairment*nya pada per tiap aset keuangan, sehingga *impairment* ini dikelompokkan pada *impairment* yang tidak spesifik pengungkapannya. Tabel berikut ini memperlihatkan jumlah entitas perbankan yang mengungkapkan adanya penurunan nilai pada aset keuangan menurut jenisnya, kemudian dikaitkan dengan jumlah bank yang mengungkapkan memiliki aset keuangan tersebut (secara rinci disajikan pada lampiran 6).

Tabel 41.  
Jumlah Entitas Perbankan yang Mengungkapkan *Impairment Asset* berdasarkan jenisnya Periode 2012-2014

Jenis Aset Keuangan	2012		2013		2014	
	Jumlah	(%)*	Jumlah	(%)*	Jumlah	(%)*
FVTPL	2	7.69%	0	0.00%	1	4.55%
HTM	6	26.09%	7	29.17%	6	24.00%
L/R	31	100.00%	31	100.00%	31	100.00%
AFS	7	25.00%	4	14.29%	2	7.41%

\*Keterangan: Jumlah bank yang mengungkapkan adanya *impairment* atas aset keuangan jenis tersebut/Jumlah perbankan yang mengungkapkan memiliki aset keuangan jenis tersebut (tabel 4.2), contoh FVTPL tahun 2012=2/26 (tabel 33)

Sumber data : CALK entitas perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Pada tabel tersebut, jumlah entitas perbankan yang menyajikan *impairment asset* atas FVTPL sangat rendah dibandingkan dengan 26 aset keuangan jenis FVTPL yang terdapat pada entitas perbankan periode 2012 demikian pula pada periode setelahnya. Hal ini memberikan indikasi langsung bahwa karena aset keuangan jenis FVPTL ini adalah aset yang dimiliki dalam jangka waktu yang singkat (kurang dari 1 tahun) maka terdapat kemungkinan kecil adanya perbedaan antara nilai tercatat dengan nilai terpulihkannya, sehingga banyak aset keuangan jenis FVTPL tidak mengalami penurunan nilai pada akhir periode.

Lalu pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa aset keuangan perbankan yang rendah resiko penurunan nilainya selain FVTPL adalah AFS dan HTM. Pada HTM keadaan ini masuk akal dan dimungkinkan karena karakteristik aset ini adalah dimiliki hingga jatuh tempo, sehingga nilai aset ini lebih ditentukan oleh nilai jatuh temponya bukan ditentukan oleh nilai wajarnya sehingga resiko penurunan nilainya pun tidak terlalu signifikan.

*Loan and Receivables* merupakan jenis aset keuangan yang mengalami cadangan kerugian *impairment* paling banyak bila dibandingkan dengan jenis aset keuangan yang lain. Cadangan kerugian ini secara konsisten diungkapkan dalam laporan keuangan perbankan selama periode 2012-2014. Pada 3 periode tersebut, tidak ada penurunan pengungkapan yang mengindikasikan bahwa cadangan kerugian akan selalu ada terutama dalam cadangan kerugian yang terdapat pada akun kredit yang diberikan, juga mengindikasikan bahwa risiko aset keuangan jenis L/R lebih besar dibandingkan jenis aset keuangan lain. Nominal atas penurunan nilai tersebut disajikan dalam tabel

Tabel 42.  
Proporsi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Total Aset Keuangan pada Entitas Perbankan Periode 2012-2014

Tahun	Jenis Aset Keuangan	Dalam Jutaan (Rp)		
		Total Aset	Impairment	(%)
2012	FVTPL	34,686,693	578	0.002%
	HTM	107,171,077	659,611	0.615%
	L/R	2,828,325,512	58,561,695	2.071%
	AFS	241,456,601	190,941	0.079%
	<b>TOTAL</b>	<b>3,211,639,883</b>	<b>59,412,825</b>	<b>1.850%</b>
2013	FVTPL	85,583,344	0	0.000%
	HTM	126,759,778	2,366,654	1.867%
	L/R	3,263,493,519	67,240,582	2.060%
	AFS	273,932,340	223,461	0.082%
	<b>TOTAL</b>	<b>3,749,768,981</b>	<b>69,830,697</b>	<b>1.862%</b>
2014	FVTPL	27,865,770	517	0.002%
	HTM	151,891,436	663,699	0.437%
	L/R	3,647,770,253	75,317,738	2.065%
	AFS	349,000,119	219,809	0.063%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,176,527,578</b>	<b>76,201,763</b>	<b>1.825%</b>

Sumber data : CALK entitas perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari sisi nominal menafsirkan bahwa besarnya cadangan kerugian penurunan nilai entitas perbankan sangat kecil, perlunya suatu cadangan kerugian penurunan nilai merupakan salah satu pertimbangan yang dilakukan oleh manajemen entitas yang bersangkutan. Di lihat dari sisi trend selama 3 periode, persentase cadangan penurunan nilai mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 risiko penurunan nilai mengalami kenaikan sebesar 0.012%, hal tersebut wajar karena jumlah aset keuangannya pun mengalami kenaikan.

Pada periode setelahnya, di tahun 2014, besarnya cadangan kerugian penurunan nilai mengalami penurunan sebesar 0.037% walaupun jumlah aset keuangannya mengalami kenaikan. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa perbankan di Indonesia mampu mengelola risiko atas aset keuangannya dengan baik, selain kemungkinan adanya kestabilan pada kondisi eksternal perbankan sehingga tidak ada penambahan cadangan penurunan nilai yang berarti.

Dari sisi proporsi cadangan kerugian penurunan nilai terhadap total jenis aset keuangan, dari tabel tersebut terlihat bahwa aset keuangan jenis L/R secara umum merupakan aset keuangan dengan proporsi penurunan nilai atas aset yang tertinggi dalam setiap periode pelaporan kemudian disusul oleh aset keuangan jenis HTM,

AFS dan terakhir FVTPL. Proporsi tertinggi pada L/R ini berbanding lurus dengan risikonya yang dipastikan lebih besar, dibandingkan dengan jenis aset keuangan lainnya. Besarnya resiko L/R disebabkan oleh penilaian L/R menggunakan *fair value* sedangkan HTM menggunakan *amortized cost*.

#### Relevansi atas Penyajian CKPN pada Laporan Laba Rugi Komprehensif

Selain CKPN yang disajikan pada laporan posisi keuangan, kerugian penurunan nilai akan diakui pada laporan laba rugi komprehensif sebagai penambah beban atau pengurang beban (pemulihan atas kerugian penurunan nilai).

Tabel 43.  
Beban dan Pemulihan Kerugian Penurunan Nilai dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Entitas Perbankan

Penyajian dalam Laba Rugi Komprehensif	Beban penyisihan kerugian penurunan nilai			Pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai			Jumlah Entitas yang Diteliti
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	
Jumlah Entitas yang Menyajikan	24	26	30	7	5	1	31

Sumber data : Laporan Laba Rugi Komprehensif Perbankan 2012-2014

Pada tahun 2012, terjadi pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai. Dimana besarnya saldo awal cadangan awal yang disesuaikan dengan penurunan nilai tahun berjalan menunjukkan nilai positif sehingga akan mengurangi beban pada laporan laba rugi komprehensif. Dengan kata lain, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. 29% entitas tersebut yang menyajikan adanya pemulihan pada tahun 2012 ialah BAEK, BCIC, BKSU, BNBA, BSIM, BSWD dan MCOB.

#### 4.2.1.3. Liabilitas Keuangan

Pada liabilitas keuangan, relevansi dari penyajian ditentukan dari kesesuaian penyajian klasifikasi dan penyajian pos-pos lain yang memiliki pengaruh terhadap liabilitas keuangan yang dimiliki. Hal ini perlu diteliti agar informasi mengenai liabilitas keuangan entitas perbankan sudah mencerminkan penerapan standar yang harus dipatuhi.

Liabilitas keuangan perbankan terdiri dari liabilitas dalam kategori liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL) dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Terdapat 2 sub kategori pada kategori liabilitas keuangan FVTPL, yaitu liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awalnya telah ditetapkan oleh entitas perbankan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

### 1. Liabilitas Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Sama halnya dengan aset keuangan FVTPL, Liabilitas dalam kategori ini juga memiliki dua sub-kategori yaitu yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas yang pada saat pengakuan awalnya telah ditetapkan oleh grup untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan akan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau jika merupakan bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek. Dalam hal ini, entitas perbankan mengategorikan instrumen derivatif (kecuali yang ditetapkan sebagai lindung nilai) sebagai liabilitas keuangan diperdagangkan.

Tabel 44.

Jumlah Entitas yang Memiliki Liabilitas Keuangan Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi Periode 2012-2014

No.	Liabilitas Keuangan	Jumlah Entitas yang Memiliki			Jumlah Entitas yang Tidak Memiliki			Jumlah Entitas yang Diteliti
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	
1.	FVTPL	19	19	20	12	12	11	31

Sumber data : Laporan posisi keuangan perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Pada tahun 2012 dan 2013, 61% entitas telah mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori ini dan 39% nya hanya mengklasifikasikan liabilitas keuangannya pada biaya perolehan diamortisasi karena tidak memiliki liabilitas derivatif. Peningkatan relevansi liabilitas keuangan kategori ini dapat ditunjang dengan adanya penyajian atas pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi komprehensif diantaranya: Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari kenaikan/penurunan nilai wajar instrumen keuangan.

### 2. Liabilitas Keuangan yang diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdapat pada mayoritas pos-pos akun liabilitas pada laporan posisi keuangan, diantaranya liabilitas segera, simpanan nasabah (terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka), simpanan dari bank lain, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas akseptasi, beban yang masih harus dibayar, efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, dan liabilitas lain-lain. Liabilitas lain-lain terdiri atas beberapa pos-pos akun yang harus diidentifikasi terlebih dahulu, karena tidak seluruh dari komponen liabilitas lain-lain masuk dalam kategori liabilitas keuangan dan komponen liabilitas keuangan pada liabilitas lain-lain pada 31 entitas perbankan satu sama lain berbeda.

**Tabel 45.**  
**Jumlah Entitas yang Memiliki Liabilitas Keuangan Pada Biaya Perolehan  
Diamortisasi Periode 2012-2014**

No.	Liabilitas Keuangan	Jumlah Entitas yang Menyajikan			Jumlah Entitas yang Tidak Menyajikan			Jumlah Entitas yang Diteliti
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	
1.	Biaya Perolehan Diamortisasi	31	31	31	-	-	-	31

Sumber data : CALK entitas perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Dari tabel tersebut, jumlah liabilitas keuangan kategori biaya perolehan diamortisasi sangat mendominasi jumlah liabilitas keuangan entitas perbankan. Hal ini dikarenakan entitas perbankan lebih tertarik pada utang-utang yang jangka waktunya lama dibandingkan dengan FVTPL yaitu terdiri atas liabilitas keuangan dalam kategori diperdagangkan yang tergolong liabilitas jangka pendek.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi memiliki keterkaitan dengan pos beban bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Sehingga pos ini perlu diteliti untuk mengetahui adanya kekonsistenan penyajian untuk menghasilkan informasi liabilitas keuangan yang lebih relevan. Penyajian pendapatan dan beban bunga sudah sepenuhnya dipatuhi oleh perbankan Indonesia yang keseluruhan disajikan dengan menggunakan metode suku bunga efektif pada perhitungannya. Pada tabel akan disajikan jumlah entitas yang menyajikan dan mengungkapkan bahwa terdapat komponen beban bunga atas liabilitas keuangan kategori biaya perolehan diamortisasi pada pos beban bunga pada laporan laba rugi komprehensif yang telah disajikan secara netto.

**Tabel 46.**  
**Jumlah Entitas yang Menyajikan Pos Beban Bunga terkait dengan Liabilitas  
Pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

No.	Pos Laporan Laba Rugi Komprehensif	Jumlah Entitas yang Menyajikan			Jumlah Entitas yang Tidak Menyajikan			Jumlah Entitas yang Diteliti
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	
1.	Beban Bunga	31	31	31	-	-	-	31

Sumber data : Laporan laba/rugi komprehensif perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh entitas perbankan yang dijadikan sampel penelitian telah menyajikan beban bunga atas liabilitas keuangan yang telah disajikan secara netto dalam laporan laba rugi komprehensif. Beban bunga ini muncul dari adanya perhitungan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif saat adanya perbedaan antara jumlah yang terjual dengan nilai nominal instrumen bersangkutan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang akan mendiskontokan secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang sepanjang

perkiraan umur instrumen tertentu atau jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat, sebagai nilai tercatat neto dari aset atau liabilitas keuangan tersebut. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual instrumen keuangan tersebut termasuk *fee*/biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan instrumen keuangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

#### 4.2.2. Analisis Penyajian dalam Karakteristik Keandalan

Salah satu karakteristik penting dalam suatu penyajian informasi berdasarkan KDPPLK adalah keandalan. Keandalan didasari dengan adanya suatu informasi yang terbebas dari pengertian yang menyesatkan terutama terbebas dari kesalahan-kesalahan yang berdampak pada ketidakwajaran suatu informasi dalam laporan keuangan. Keandalan dari suatu informasi mengenai instrumen keuangan dapat diketahui melalui penerapan metode yang telah diatur dalam standar. Dalam instrumen keuangan, jumlah dari penyajian cadangan kerugian penurunan nilai dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan harus disajikan secara tepat berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

##### 4.2.2.1. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Cadangan kerugian penurunan ini sangat berpengaruh terhadap jumlah aset keuangan perbankan sehingga perbankan dituntut untuk menyajikan jumlah yang terbebas dari kesalahan material dan menyesatkan. Metode atas penentuan CKPN secara khusus diatur untuk aset keuangan.

Entitas pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset keuangan. Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang secara individual mengalami penurunan nilai yang signifikan, dengan menggunakan metode *discounted cash flows*. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai dan aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai, dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif.

##### 4.2.2.2. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, di antara para pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar pada tanggal pengukuran, termasuk didalamnya adalah nilai pasar. Perbankan melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen dalam aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki. Aset dan liabilitas ini dikhususkan atas aset dan liabilitas keuangan yang dikur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diperdagangkan dan tersedia untuk dijual. Perbankan harus melakukan pengukuran nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan langkah yang diterapkan oleh standar agar nilai wajar tersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan.

Perbankan pada awalnya melakukan pengukuran nilai wajar atas harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasi tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service* atau *regulatory agency*) dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Namun, jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, bank menetapkan nilai wajar dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. Sementara itu, untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Berdasarkan penelitian, dalam penentuan nilai wajar instrumen keuangan, entitas perbankan seluruhnya telah menerapkan penentuan nilai wajar yang telah diatur dalam PSAK 68 mengenai penetapan nilai wajar yang berdasarkan pada level pada standar ini. Entitas perbankan seluruhnya telah menyatakan dalam catatan atas laporan keuangannya bahwa telah melakukan pengukuran nilai wajar berdasarkan :

1. Level 1 (harga kuotasi pasar aktif untuk instrumen keuangan sejenis);
2. level 2 (teknik lain dimana semua input yang memiliki efek signifikan dalam pencatatan nilai wajar, dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung);
3. Level 3 (teknik lain dengan menggunakan input yang memiliki efek signifikan dalam pencatatan nilai wajar. Tidak berdasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar

### **4.3. Analisis Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan**

#### **4.3.1. Pengakuan Instrumen Keuangan**

Pada bagian pengakuan ini akan diteliti apakah pengakuan awal dan penghentian pengakuan atas instrumen keuangan telah sesuai dengan standar. Penelitian juga dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan tersebut secara konsisten telah diterapkan pada periode laporan keuangan 2012-2014.

##### **4.3.1.1. Pengakuan Awal**

Diakuinya suatu instrumen keuangan pada laporan keuangan perbankan dilakukan atas pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini menyangkut pengakuan awal pada saat pembelian atau penjualan instrumen keuangan bersangkutan. Pengakuan awal dilandasi dengan adanya kontraktual baik hak maupun kewajiban.

Hak kontraktual ini akan diakui sebagai aset keuangan ketika entitas menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain atau mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas, sehingga jika pada kenyataannya tidak akan menimbulkan *gain*, maka tidak memenuhi suatu kriteria pengakuan aset keuangan. Namun jika setelah aset keuangan diakui namun terjadi *loss* yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, maka kerugian tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Liabilitas keuangan akan diakui jika terdapat kewajiban kontraktual yang mengharuskan entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain dan mempertukarkan aset atau liabilitas keuangannya dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut.

Pada entitas perbankan dalam pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan telah memenuhi kriteria pengakuan tersebut. Pengukuran atas pengakuan aset dan liabilitas keuangan juga telah diakui dalam laporan laba rugi komprehensif

berupa pos keuntungan dan kerugian yang timbul dari pengakuan aset dan liabilitas keuangan.

#### 4.3.1.2. Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan merupakan suatu kejadian atau peristiwa pengeluaran suatu aset atau liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Pada aset keuangan, entitas hanya akan menghentikan pengakuannya jika hak kontraktual atas aset keuangan tersebut berakhir dalam hal ini kontrak yang telah disepakati oleh pihak-pihak terlibat saat pengakuan aset keuangan atau saat entitas mentransfer aset keuangannya kepada entitas lain.

Dalam catatan atas laporan keuangan, untuk penghentian aset keuangan pada entitas perbankan terdapat beberapa perbedaan pengungkapan. Namun mayoritas pada pengungkapannya entitas perbankan telah menentukan bahwa ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangannya berakhir, atau ketika aset keuangannya telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut telah ditransfer maka disanalah pengakuan atas aset keuangan entitas perbankan dihentikan. Hal ini disajikan dalam pengungkapan yang mencakup pada persyaratan penghentian pengakuan, akumulasi selisih antara jumlah tercatat dan pembayaran aset keuangan dan piutang dan keuntungan/ kerugian kumulatif atas penghentian disajikan serta persyaratan penghentian pengakuan atas kredit yang diberikan

Pada penghentian pengungkapan liabilitas keuangan, seluruh entitas perbankan hanya mengungkapkan persyaratan penghentiannya secara tidak spesifik. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pengungkapan penghentian pengakuan pada aset keuangan yang lebih spesifik persyaratannya. Dalam laporan keuangan perbankan, entitas seluruhnya menyatakan bahwa bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika dan hanya jika liabilitas bank telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa tanpa adanya tambahan pengungkapan penghentian pengakuan lain.

#### 4.3.2. Pengukuran Instrumen Keuangan

##### 4.3.2.1. Pengukuran Awal

Pengukuran awal aset keuangan entitas sampel didapatkan dari informasi yang diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan, baik yang disajikan di dalam pengungkapan klasifikasi aset keuangan maupun pada pengungkapan masing-masing akun aset keuangan. Pada entitas perbankan dalam pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan yang termasuk dalam jenis FVTPL diukur sebesar nilai wajarnya sedangkan untuk biaya-biaya transaksinya akan muncul pada pos beban pada laporan laba rugi komprehensif. Untuk aset dan liabilitas keuangan selain jenis FVTPL, dinyatakan sebesar nilai wajar yang dikapitalisasi dengan biaya transaksi. Hal tersebut telah tercantum dalam pengungkapan pengakuan seluruh catatan atas laporan keuangan entitas perbankan.

Sementara itu, pada laporan keuangan entitas perbankan tahun 2012-2014 yang telah diaudit, dalam hal pengukuran liabilitas keuangan telah diungkapkan seluruh entitas. Pengungkapan atas pengukuran liabilitas keuangan ini dinyatakan bahwa setiap liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar kecuali untuk liabilitas keuangan selain diukur pada nilai wajar, maka dikurangkan dengan biaya transaksi.

#### 4.3.2.2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pada pengakuan setelah pengakuan awal, penelitian ini mencoba untuk melihat apakah entitas perbankan telah menerapkan dan sesuai dengan PSAK 55. Pada pengukuran setelah pengakuan awal, entitas mengungkapkannya setelah pengakuan awal instrumen keuangan gambaran informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 9.

Pada lampiran tersebut, terlihat bahwa 31 entitas perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, mengungkapkan pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awalnya sesuai dengan PSAK 55. Hal ini dikarenakan semua entitas perbankan mengungkapkan pengukuran setelah pengakuan awalnya pada catatan atas laporan keuangan meskipun dengan deskripsi yang berbeda. Untuk entitas yang pengukuran pada lampiran diberi tanda penghubung (-), tidak mengungkapkan pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan atas klasifikasi yang bersangkutan karena tidak memiliki/ tidak menyajikan aset keuangan jenis tersebut. Untuk entitas BAEK diberi tanda penghubung dikarenakan entitas tidak mengungkapkan pengukuran setelah pengakuan awal baik dalam klasifikasi aset dan liabilitas keuangan maupun pada pengungkapan pos-pos aset dan liabilitas keuangan.

Sebanyak 38.7% entitas mengungkapkan pengukuran selanjutnya aset keuangan dengan mengklasifikasikan berdasarkan kategori aset keuangan melalui poin pengungkapan “pengukuran setelah pengakuan awal”. Sedangkan sebanyak 42% entitas mengungkapkan pengukuran selanjutnya aset keuangan pada poin pengungkapan “klasifikasi” atas aset keuangan, bukan pada poin seperti entitas yang sudah disebutkan sebelumnya.

Adapun pada 16,1% entitas tidak mengungkapkan melalui poin tersebut, namun dengan hanya menyatakan “pengukuran setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset dan liabilitas keuangan bersangkutan” dan pengungkapannya disajikan dalam pengungkapan melalui masing-masing pos/akun tersendiri. Namun, perbedaan dalam pengungkapan pengukuran setelah pengakuan awal tidak berpengaruh terhadap kepatuhan terhadap PSAK 55.

Terdapat 1 pengecualian atas perbedaan yang terdapat pada 3,2 % entitas atas aset keuangan jenis tersedia untuk dijual dalam bentuk investasi saham. Entitas tidak melakukan pengukuran setelah pengakuan awal berdasarkan nilai wajar melainkan menggunakan biaya perolehan diamortisasi karena investasi saham tersebut terdiri dari efek ekuitas tanpa harga kuota yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan akan diklasifikasikan ke dalam liabilitas pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Pada lampiran 10, disajikan pengukuran setiap liabilitas keuangan yang dimiliki oleh tiap entitas perbankan dan bagaimana pengukurannya yang telah dijelaskan di dalam pengungkapannya, untuk liabilitas keuangan yang diberi tanda penghubung (-) dimaksudkan bahwa entitas bersangkutan tidak memiliki dan tidak mengklasifikasikan jenis liabilitas keuangan tersebut di dalam laporan posisi keuangannya.

#### 4.4. Analisis Pengungkapan Instrumen Keuangan

##### 4.4.1. Pengungkapan Kebijakan Instrumen Keuangan

Berdasarkan pada PSAK 60, entitas yang menerapkan PSAK ini harus mengungkapkan informasi atas instrumen keuangan yang sebelumnya disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laba rugi komprehensif. Berdasarkan pada data laporan keuangan yang telah diteliti, maka kategorisasi pengungkapan instrumen dalam perbankan diantaranya: 1. Klasifikasi berdasarkan kategori instrumen keuangan; 2. Pengakuan awal; 3. Pengukuran setelah pengakuan awal; 4. Penghentian pengakuan; 5. Pengakuan pendapatan dan beban; 6. Reklasifikasi; 7. Saling hapus; 8. Pengukuran biaya diamortisasi; 9. Pengukuran nilai wajar, dan; 10. Cadangan kerugian penurunan nilai.

Tabel 47.

Pengungkapan instrumen keuangan pada laporan keuangan emiten perbankan

KODE ENTITAS	Kategori Penilaian	Jumlah Poin Pengungkapan
BABP	Memadai	9
BAEK	Memadai	8
BBRI, AGRO, BBKA, BBKP, BBNI, BBTN, BDMD, BEKS, BJBR, BKSW, BSIM, MAYA MEGA, MCOR	Lengkap	10
BNBA	Memadai	8
BACA, BBNP, BCIC, BMRI, BNGA, BNII, BSWD, BTPN, BVIC, INPC, NISP, PNBNI, SDRA	Memadai	9
BNLI	Memadai	8

**Poin-poin pengungkapan pada kebijakan akuntansi instrumen keuangan:**

1. Klasifikasi berdasarkan kategori instrumen keuangan; 2. Pengakuan awal;
3. Pengukuran setelah pengakuan awal; 4. Penghentian pengakuan;
5. Pengakuan pendapatan dan beban; 6. Reklasifikasi; 7. Saling hapus;
8. Pengukuran biaya diamortisasi; 9. Pengukuran nilai wajar; 10. Cadangan kerugian penurunan nilai.

**Kategori penilaian pengungkapan:**

1. Lengkap = mengungkapkan penjelasan seluruh poin pengungkapan
2. Memadai = mengungkapkan penjelasan 7-9 poin
3. Kurang = mengungkapkan penjelasan 4-6 poin
4. Sangat Kurang = mengungkapkan penjelasan 0-3 poin

Sumber data: CALK entitas perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Entitas pada tabel 47, telah dikelompokkan berdasarkan kesamaan poin pengungkapan instrumen keuangan. Sebanyak 54,8% entitas perbankan telah menyajikan pengungkapan instrumen keuangan dalam catatan atas laporan keuangannya secara memadai dan sebanyak 45,2% entitas perbankan telah mengungkapkan secara lengkap. Perbedaan ini dikarenakan perbedaan dari KAP yang mengaudit laporan keuangan perbankan.

Penelurusan pengungkapan pada entitas perbankan atas laporan keuangan periode 2012-2014 terlihat pada tabel bahwa terdapat entitas perbankan yang secara lengkap mengungkapkan kebijakan akuntansi mengenai instrumen keuangan. 14 entitas tersebut telah mengungkapkan lebih dari 9 poin pengungkapan dan mayoritas seluruh entitas tersebut di audit oleh KAP *Ernest and Young (EY)*. Menurut eksplorasi penulis berdasarkan pada laporan keuangan entitas yang telah dijadikan sampel, didapatkan kesimpulan bahwa pengungkapan atas instrumen keuangan pada entitas yang diaudit oleh KAP yang telah disebutkan sebelumnya memiliki pengungkapan yang paling lengkap dan lebih spesifik. Selain itu, untuk entitas lainnya telah mengungkapkan kebijakan mengenai instrumen keuangan dengan memadai. Entitas-entitas tersebut mayoritas diaudit oleh KAP seperti *Crowe Howarth, KPMG, PWC, Deloitte, Kreston, Grant Thornton, Morison Internasional* dan *Moore Stephens*.

#### 4.4.2. Pengungkapan Manajemen Risiko

Berdasarkan PSAK 60, entitas harus mengungkapkan risiko-risiko yang berhubungan dengan instrumen keuangan, pengungkapan ini diungkapkan berdasarkan kualitatif dan kuantitatif risiko. Penelitian terhadap 31 entitas perbankan atas laporan keuangan yang telah diaudit periode 2012-2014. Dapat diteliti bahwa sebanyak 22,6% entitas telah mengungkapkan secara terfokus informasi risiko yang timbul dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Risiko tersebut mencakup, tetapi tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas serta empat pilar manajemen resiko. Sedangkan sebanyak 77,4% nya hanya menjelaskan mengenai ketiga risiko tersebut dan bagaimana mengelolanya.

Pada 22,6% entitas yang secara sangat lengkap mengungkapkan manajemen risiko entitas dianggap memberikan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi jenis dan cakupan jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Entitas yang dikelompokkan dalam kategori pengungkapan sangat lengkap juga telah menambahkan pengungkapan mekanisme yang bertumpu pada 4 pilar manajemen risiko, diantaranya : Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi; Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit; Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko; serta Sistem Pengendalian Intern.

#### Risiko Kredit dalam Perbankan

Risiko kredit muncul sebagai akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada perbankan. Hal ini tentu menjadi permasalahan penting bagi perbankan yang memiliki risiko kredit yang sangat tinggi. Penerapan manajemen risiko sangat diperlukan dalam rangka meminimalisir risiko dan mengelolanya secara tepat. Dalam perbankan hal ini direalisasikan melalui pemantauan kualitas kredit dari identifikasi dini pemburukan kredit, pengelolaan *limit* pada batasan eksposur risiko yang dapat diterima untuk individu dan pihak

ketiga, pengelolaan *limit* pada batasan geografis dan pengelolaan *limit* konsentrasi per industri. Penetapan *limit* ini dilakukan melalui penggolongan risiko kredit (*rating*) per individual debitur yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk memperkirakan *potential loss* sebagai risiko akibat ekspansi kredit dan penentuan tindak lanjut.

Entitas perbankan melakukan berbagai perhitungan kualitatif dan kuantitatif terhadap risiko ini melalui penyajian pengungkapan analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit dengan memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya, analisis konsentrasi risiko berdasarkan sektor geografis dan industri, penurunan nilai aset keuangan pada akhir tanggal pelaporan, dan membuat tingkatan aset keuangan berdasarkan kualitasnya dalam *high grade* atau *standard grade*.

### **Risiko Likuiditas dalam Perbankan**

Risiko likuiditas perbankan perlu dikelola agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Untuk mendukung pengelolaan likuiditas, perbankan menetapkan kebijakan manajemen risiko mencakup pada manajemen likuiditas, penetapan strategi pendanaan, sistem peringatan dini, pengakuan dan penetapan limit risiko likuiditas. Pengungkapan atas manajemen risiko likuiditas ini disajikan melalui penyajian analisa aset dan liabilitas sesuai sisa jatuh tempo kontraktual.

### **Risiko Pasar dalam Perbankan**

Risiko pasar muncul sebagai akibat dari adanya pergerakan faktor pasar yang meliputi pada suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki perbankan, baik posisi pada laporan posisi keuangan maupun pada rekening administratif. Risiko pasar yang berkaitan dengan instrumen keuangan perbankan adalah risiko untuk tingkat suku bunga. Instrumen keuangan yang berbasis suku bunga memiliki risiko karena terdapat potensi perubahan suku bunga yang akan berdampak pada arus kas dimasa depan.

Untuk analisis risiko suku bunga, perbankan akan menganalisis mengenai tingkat suku bunga rata-rata per tahun dari setiap instrumen keuangan dan menganalisis mengenai sensitivitas kemungkinan adanya perubahan tingkat suku bunga. Tingkat sensitivitas digunakan untuk menganalisis kemungkinan perubahan suku bunga yang berdampak pada keuntungan dan kerugian portofolio *banking book* sehingga perbankan akan menyajikan tabel perubahan persentase resiko tingkat suku bunga dan dampaknya terhadap laporan laba rugi komprehensif selama periode berjalan. Sensitivitas laporan laba rugi adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi pada periode tersebut apakah akan menambah atau mengurangi laba bersih dengan menggunakan proyeksi yang seluruh variabelnya adalah konstan pada tanggal pelaporan keuangan.

## **4.5. Pembahasan**

### **4.5.1. Kesesuaian Terhadap Tujuan**

Berdasarkan pada tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Keuangan terhadap penyajian instrumen keuangan yang terdapat pada 31 entitas perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diawali dengan

melakukan identifikasi terhadap standar-standar yang dipatuhi perbankan sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan perbankan. Identifikasi ini penting karena mempengaruhi relevansi dan keandalan informasi instrumen keuangan yang disajikan.

Setelah itu, identifikasi dilanjutkan pada aset dan liabilitas keuangan perbankan dalam hal jumlah entitas yang menyajikannya selama periode penelitian dan komponen dari masing-masing aset dan liabilitas tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keseragaman dasar penetapan kategori instrumen keuangan dan mengetahui perbedaan-perbedaan signifikan yang ada.

Penelitian dilanjutkan terhadap penyajian aset dan liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan dan pengaruhnya terhadap pos-pos yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk identifikasi keandalan dari metode-metode yang berkaitan dengan pengukuran instrumen keuangan sehingga akhirnya menghasilkan informasi keuangan. Identifikasi ini *urgent* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan dan kekonsistenan pada penyajian laporan keuangan perbankan diterapkan.

Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Keuangan terhadap pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan yang terdapat pada 31 entitas perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian diawali dengan melakukan identifikasi pengakuan awal dan penghentian pengakuan entitas perbankan serta pengukuran awal dan pengukuran setelah pengukuran awal atas aset dan liabilitas keuangan. Hal ini penting untuk memastikan adanya kepatuhan yang memadai.

Berdasarkan pada tujuan penelitian, selain yang sudah disebutkan, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Keuangan terhadap pengungkapan instrumen keuangan yang terdapat pada 31 entitas perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian diawali dengan melakukan identifikasi terhadap pengungkapan kebijakan instrumen keuangan dan manajemen risiko yang dilakukan perbankan.

#### 4.5.2. Penelitian Terdahulu

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Ekaputri Ciptani, 2013 yang membahas mengenai penerapan PSAK 55 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan PSAK 55 (revisi 2011) atas pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai pada PT. BRI (Persero) Tbk. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, PT. BRI (Persero) Tbk. dapat diketahui bahwa dalam penentuan cadangan kerugian penurunan nilai PT. BRI (Persero) Tbk. masih mengacu pada PSAK 50 (revisi 2006). Tetapi dalam proses pengakuan dan pengukuran CKPN yang diterapkan PT. BRI (Persero) Tbk. telah sesuai dengan PSAK yang telah menjadi acuan PSAK revisi terbaru yang telah disahkan oleh IAI yaitu PSAK 55 (revisi 2011).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Emanuela, 2012 yang membahas mengenai analisis penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) atas *impairment* piutang pada perusahaan *multifinance*. Penelitian ini dilakukan terhadap 10 perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada 2009 dan 2010 dengan membandingkan

pengungkapan penurunan nilai piutang sebelum dan setelah PSAK 50 dan 60 direvisi yaitu sebelum 2006 dan setelahnya, penelitiannya atas *impairment* piutang sesuai dengan buku akuntansi keuangan menengah Dwi Martani. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya 2 perusahaan dari 10 perusahaan *mutifinance* yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 dan 2010, yang sangat spesifik mengungkapkan kebijakan akuntansi mengenai instrumen keuangan perusahaan dan *impairment*-nya menurut PSAK 50 dan 55.

Penelitian ini membahas bagaimana kesesuaian penerapan PSAK 50, 55 dan 60 pada entitas sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atas laporan keuangan periode 2012-2014 dalam hal penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan. Dimulai dari identifikasi terhadap standar-standar yang dipatuhi perbankan, identifikasi kategori dan komponen dari aset dan liabilitas keuangan, penyajian aset dan liabilitas keuangan, penyajian pos-pos yang berhubungan dengan aset dan liabilitas keuangan. Termasuk identifikasi terhadap pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas keuangan. Serta identifikasi dalam pengungkapan instrumen keuangan termasuk risiko-risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan bagaimana risiko-risiko tersebut dikelola juga kesesuaian penyajian dan pengungkapan dengan standar yang berlaku umum dalam hal ini relevan dan keandalan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah memahami isi dari laporan keuangan perbankan.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada laporan keuangan emiten sub sektor perbankan periode 2012-2014, maka penulis melakukan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai penerapan SAK instrumen keuangan dalam hal penyajian, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan di mana hasil pembahasan tersebut penulis simpulkan sebagai berikut :

Aset Keuangan perbankan terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, wesel ekspor, tagihan akseptasi, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, obligasi pemerintah, penyertaan saham dan aset lain-lain termasuk bunga yang masih akan diterima. Sedangkan liabilitas perbankan terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi dan liabilitas lain-lain termasuk beban yang masih harus dibayar. Seluruh emiten perbankan telah melakukan penyajian aset dan liabilitas dengan melakukan klasifikasi berdasarkan kategori aset dan liabilitas keuangan. Pada tahun 2012 sebanyak 100% emiten memiliki aset keuangan jenis L/R, 84% emiten memiliki aset keuangan jenis FVTPL dan AFS juga persentase paling kecil sebanyak 74% emiten menyajikan sebagai HTM. Pada periode selanjutnya yaitu tahun 2013, 100% perbankan secara konsisten menyajikan aset keuangan jenis L/R, 84% emiten memiliki aset keuangan jenis AFS, 81% untuk aset keuangan jenis FVTPL dan persentase terendah atas aset keuangan jenis HTM yaitu sebesar 77%. Beralih pada periode setelahnya yaitu 2014, aset keuangan jenis L/R tetap konsisten disajikan oleh 100% emiten perbankan, 81% atas AFS, 77% atas HTM dan persentase terendah atas aset keuangan jenis FVTPL sebesar 71%. Diperhatikan dari hasil persentase, FVTPL, HTM dan AFS lebih sedikit bila dibandingkan dengan aset keuangan jenis L/R. Bila dikaitkan dengan jenis kegiatan perbankan dan jenis usahanya, hal ini mengindikasikan bahwa perbankan lebih berfokus dan lebih menyukai aset keuangan jangka menengah dan jangka panjang dibandingkan jangka pendek.

Penyajian pos-pos yang berkaitan dengan aset dan liabilitas keuangan emiten sub sektor perbankan diantaranya :

- a. Aset keuangan jenis FVTPL yang memiliki relevansi dengan pos pendapatan bersih dari instrumen yang diperdagangkan dari tahun 2012-2014 telah 100% disajikan oleh entitas perbankan yang memiliki *trading securities*. Selain itu, aset keuangan jenis FVTPL juga memiliki relevansi dengan pos keuntungan/kerugian dari penjualan/perubahan nilai wajar instrumen

keuangan dan pendapatan bunga, sebanyak 100% entitas yang memiliki aset keuangan FVTPL telah menyajikan pos tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif.

- b. Aset keuangan jenis HTM yang memiliki keterkaitan dengan pos pendapatan bunga telah 100% disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif sesuai dengan jumlah entitas yang memiliki aset keuangan jenis HTM pada periode 2012-2014.
- c. Aset keuangan jenis L/R yang memiliki relevansi dengan pos pendapatan bunga, berdasarkan informasi di dalam laporan laba rugi komprehensif dan catatan atas laporan keuangan telah 100% disajikan sesuai dengan jumlah entitas yang memiliki aset keuangan jenis L/R pada periode 2012-2014.
- d. Aset keuangan jenis AFS yang memiliki relevansi dengan pos keuntungan/kerugian yang belum direalisasi telah 100% disajikan di dalam laporan laba rugi pada kelompok pendapatan komprehensif lain sesuai dengan jumlah entitas yang memiliki aset keuangan jenis AFS pada periode 2012-2014. Selain itu, jumlah entitas yang memiliki aset keuangan jenis AFS juga sebanyak 100% telah menyajikan pos laba/rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek dalam kelompok AFS didalam laporan perubahan ekuitasnya.
- e. Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi yang memiliki relevansi dengan pos beban bunga, telah 100% disajikan di dalam laporan laba rugi komprehensif emiten perbankan.

Berdasarkan informasi di dalam catatan atas laporan keuangan, sebanyak 14 entitas perbankan telah secara lengkap mengungkapkan informasi atas instrumen keuangan (10 poin pengungkapan). Dan sebanyak 17 entitas perbankan telah secara memadai mengungkapkan informasi atas instrumen keuangan (8-9 poin pengungkapan). Perbedaan poin pengungkapan dikarenakan auditor yang melakukan audit pada laporan keuangan perbankan. Pengungkapan secara lengkap atas 14 entitas seluruhnya diaudit oleh KAP *Ernest and Young*.

Berdasarkan informasi dalam laporan keuangan, seluruh entitas telah melakukan pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan sesuai dengan PSAK 55, yaitu pada pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangan yang termasuk dalam jenis FVTPL diukur sebesar nilai wajarnya sedangkan untuk biaya-biaya transaksinya akan muncul pada pos beban pada laporan laba rugi komprehensif. Untuk aset dan liabilitas keuangan selain jenis FVTPL, dinyatakan sebesar nilai wajar yang dikapitalisasi dengan biaya transaksi. Selanjutnya setelah pengakuan awal, pengukuran disesuaikan dengan kategori aset dan liabilitas keuangan, seluruh entitas telah melakukan pengukuran sesuai kategori aset dan liabilitas keuangan. Namun pengecualian ditemukan pada 3,2% entitas yang tidak melakukan pengukuran setelah pengakuan awal atas AFS berdasarkan nilai wajar melainkan menggunakan biaya perolehan diamortisasi karena investasi saham tersebut terdiri

dari efek ekuitas tanpa harga kuotasi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan saran, yaitu:

Dalam penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan memang sudah ada keseragaman, namun masih banyak dalam catatan atas laporan keuangan perbankan baik pada pos beban ataupun pendapatan bunga, tidak dijelaskan bagian dari kategori aset dan liabilitas keuangan jenis apa pendapatan dan beban bunga tersebut dihasilkan, maka diperlukan informasi yang rinci untuk memudahkan pengguna laporan keuangan dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu, masih ada entitas yang dalam pengungkapan *impairment asset* nya tidak melakukan pengelompokan berdasarkan aset keuangan jenis apa sehingga harus adanya pengelompokan untuk memudahkan memahami laporan keuangan terutama yang berkaitan dengan instrument keuangan yang merupakan produk inti di dalam emiten sub sektor perbankan.

Dalam hal pengakuan dan pengukuran atas liabilitas keuangan, pengungkapan yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan disajikan dengan singkat, berbeda dengan pengakuan dan pengukuran aset keuangan yang diungkapkan secara menyeluruh dan padu. Untuk itu sebaiknya ada penjelasan yang lebih jelas agar mampu membantu pemakai laporan keuangan memahami liabilitas keuangan perbankan.

### JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan											
		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Pengajuan Judul		*										
2	Studi Pustaka	**	***	**									
3	Pembuatan Makalah		**	***	****	****	****						
4	Seminar					**	***				***		
5	Pengesahan										*		
6	Pengumpulan data							**	**	**			
7	Pengolahan data												
8	Penulisan laporan dan bimbingan						**			*	**	*	
9	Sidang Skripsi												*
10	Penyempurnaan Skripsi												***
11	Pengesahan												****

Keterangan: Tanda (\*) menunjukkan satuan unit waktu (minggu) dalam bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, (2006), *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdullah Thamrin, Tantri Francis, (2012), *Bank dan Lembaga Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Belkaoui, Ahmed Riahi, (2006), *Teori Akuntansi*, Edisi 5, Alih Bahasa: Ali Akbar Yulianto dan Risnawati Dermauli, Salemba Empat, Jakarta.
- Hermansyah, (2012), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Hery, (2011), *Akuntansi*, Gava Media, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2010), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 60 (Revisi 2010) Instrumen Keuangan: Pengungkapan*, IAI, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2010), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (Revisi 2010) Instrumen Keuangan: Penyajian*, IAI, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2011), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (Revisi 2011) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, IAI, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2009), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 48 (Revisi 2009) Penurunan Nilai Aset*, IAI, Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia, (2013), *Memahami Bisnis Bank*, Gramedia, Jakarta.
- Kasmir, (2012), *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, (2012), *Manajemen Perbankan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Martani Dwi, (2012), *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Salemba Empat, Jakarta.

Purba, Jan Horas. (2013). *Metodologi Penelitian. Modul Mata Kuliah Metodologi Penelitian*, Bogor.

Raja, Adri Satriawan, (2012), *Akuntansi Keuangan Versi IFRS*, Penerbit Graha Ilmu, Jakarta.

Silvania Ktut, (2009), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, Jakarta

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (2015), *Buku Pedoman Seminar S1 Ekonomi*, Unpak, Bogor

Tri Wahyuni Ersas, (2012), *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba, Jakarta.

[Http://economy.okezone.com/read/2009/10/22/320/268078/70](http://economy.okezone.com/read/2009/10/22/320/268078/70), Bank Belum Transparan (diakses 23 Oktober 2015).

[Http://ilmuperbankan.blogspot.com/2010/03/pedoman-akuntansi-perbankan-indonesia.html](http://ilmuperbankan.blogspot.com/2010/03/pedoman-akuntansi-perbankan-indonesia.html) (diakses 05 Oktober 2015).

[Http://www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?catid=&id=94](http://www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?catid=&id=94) (diakses 23 Oktober 2015).









Hal 4.

Instrumen Keuangan	INPC			MAYA			MCOR			MEGA			NISP			PNBN			SDRA			TOTAL				
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
<b>Aset Keuangan</b>																										
Kas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
Giro Pada Bank Indonesia	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
Giro pada Bank Lain	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
Efek-efek	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
Investasi Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	12	11	13		
Aset yang Diperdagangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	4	
Wesel Ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	3	
Tagihan Akseptasi	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	25	25	24		
Tagihan Derivatif	-	√	√	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	14	14	14		
Wesel Tagih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
Kredit yang Diberikan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Obligasi Pemerintah	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-	-	√	√	√	10	9	9		
Penyertaan Saham	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	13	14	13	
Pinjaman yang Diberikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
Pendapatan Bunga yang Masih Harus Diterima	√	√	√	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	√	√	√	15	15	14		
Aset Lain-lain	√	√	√	-	-	-	√	√	√	-	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	19	24	25		
<b>Liabilitas Keuangan</b>																										
Liabilitas Segera	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25	28	28





BSIM	√	√	√	-	√	√	-	-	√	√	√	-	√	√	-	-	√	√	√	-	√	√	-	-
BSWD	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-
BTPN	√	√	√	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-
BVIC	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-
INPC	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-
MAYA	√	√	√	-	√	√	-	-	√	√	√	-	√	√	-	-	√	√	√	-	√	√	-	-
MCOR	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-
MEGA	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	√
NISP	√	√	√	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-
PNBN	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-
SDRA	√	√	√	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

Sumber data: Catatan atas laporan keuangan perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Catatan:

1=Kas

2=Giro pada Bank Indonesia

3=Giro pada Bank Lain

4=Sertifikat Bank Indonesia

5=Penempatan pada Bank Indonesia

6=Penempatan pada bank lain

7=Fasilitas Simpanan Bank Indonesia

8=Sertifikat Deposito Bank Indonesia

## Klasifikasi Kas Sebagai Aset Keuangan pada Emiten Sub Sektor Perbankan Tahun 2012-2014

No.	Entitas	2012			2013			2014		
		L/R	AFS	Kas	L/R	AFS	Kas	L/R	AFS	Kas
1	AGRO	-	-	√	-	-	√	-	-	√
2	BABP	√	-	-	√	-	-	√	-	-
3	BACA	√	-	-	√	-	-	√	-	-
4	BAEK	-	√	-	-	√	-	-	√	-
5	BBCA	-	√	-	-	√	-	-	√	-
6	BBKP	√	-	-	√	-	-	√	-	-
7	BBNI	-	-	√	-	-	√	-	-	√
8	BBNP	√	-	-	√	-	-	√	-	-
9	BBRI	-	-	√	-	-	√	-	-	√
10	BBTN	-	-	√	-	-	√	-	-	√
11	BCIC	√	-	-	-	-	√	√	-	-
12	BDMD	-	√	-	-	√	-	-	√	-
13	BEKS	√	-	-	√	-	-	√	-	-
14	BJBR	√	-	-	√	-	-	√	-	-
15	BKSW	-	√	-	√	-	-	√	-	-
16	BMRI	√	-	-	√	-	-	√	-	-

No	Entitas	2012			2013			2014		
		L/R	AFS	Kas	L/R	AFS	Kas	L/R	AFS	Kas
17	BNBA	√	-	-	√	-	-	√	-	-
18	BNGA	-	-	√	-	-	√	-	-	√
19	BNII	-	-	√	√	-	-	√	-	-
20	BNLI	-	√	-	-	√	-	-	√	-
21	BSIM	√	-	-	√	-	-	√	-	-
22	BSWD	√	-	-	√	-	-	√	-	-
23	BTPN	√	-	-	√	-	-	√	-	-
24	BVIC	√	-	-	√	-	-	√	-	-
25	INPC	-	-	√	-	-	√	-	-	√
26	MAYA	-	-	√	-	√	-	-	√	-
27	MCOR	√	-	-	√	-	-	√	-	-
28	MEGA	-	-	√	-	-	√	-	-	√
29	NISP	√	-	-	√	-	-	√	-	-
30	PNBN	√	-	-	√	-	-	√	-	-
31	SDRA	-	-	√	-	-	√	-	-	√
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

Sumber data : Catatan atas laporan keuangan perbankan 2012-2014 (diolah penulis)

Jumlah Kategori Aset Keuangan yang Disajikan Emiten Sub Sektor Perbankan 2012-2014

No	Entitas	Kategori Aset Keuangan			
		Tahun 2012 (dalam jutaan rupiah)			
		FVTPL	HTM	L/R	AFS
1	AGRO	71.925	-	3.827.183	298
2	BABP	810	13.206	6.848.430	377.493
3	BACA	482.659	-	4.205.991	800.241
4	BAEK	705	-	22.841.000	1.936.095
5	BBCA	1.441.725	19.410.549	368.596.438	38.954.030
6	BBKP	4.305	910.085	61.864.629	1.153.316
7	BBNI	2.787.296	7.485.480	270.038.585	38.099.770
8	BBNP	124	209.040	7.837.058	-
9	BBRI	838.578	30.551.380	495.492.940	14.288.890
10	BBTN	475.009	1.984.399	100.598.622	6.023.318
11	BCIC	135.088	1.037.048	14.135.818	35.125
12	BDMD	252.100	488.832	132.687.440	13.253.514
13	BEKS	-	-	6.882.095	203.466
14	BJBR	521.582	3.621.410	53.061.728	11.594.981
15	BKSW	2.639	364.806	4.029.656	44.692
16	BMRI	4.198.560	24.564.212	518.430.895	59.413.901
17	BNBA	-	69.249	3.262.468	10
18	BNGA	2.396.907	2.195.864	174.617.657	9.798.947
19	BNII	1.884.011	-	102.431.038	8.163.881
20	BNLI	197.051	1.974.231	120.913.636	5.244.680
21	BSIM	55.582	795.019	12.631.296	122.319
22	BSWD	821	37.594	2.445.955	-
23	BTPN	-	1.083.078	55.544.488	299.670
24	BVIC	14.830	1.452.109	10.138.638	2.485.488
25	INPC	280.055	3	1.320.953	18.079.552
26	MAYA	-	-	15.259.452	674.113
27	MCOR	383.656	48.787	5.908.486	-
28	MEGA	17.250.257	-	43.661.150	245.492
29	NISP	223.562	-	69.490.567	7.906.007
30	PNBN	786.856	8,874.397	132.323.382	2.168.558
31	SDRA	-	299	6.997.838	88.754
<b>TOTAL</b>		<b>34.686.693</b>	<b>107.171.077</b>	<b>2.828.325.512</b>	<b>241,456,601</b>

No	Entitas	Kategori Aset Keuangan			
		Tahun 2013 (dalam jutaan rupiah)			
		FVTPL	HTM	L/R	AFS
1	AGRO	65.993	425.579	4.430.918	132.711
2	BABP	41.790	1.649	7.473.076	477.657
3	BACA	647.266	-	5.425.079	882.849
4	BAEK	9.090	-	24.634.841	3.670.493
5	BBCA	1,238.564	15.913.947	413.184.803	48.777.533
6	BBKP	22.146	2.003.409	61.316.677	3.996.977
7	BBNI	2,000.204	9.801.054	313.177.289	41.774.235
8	BBNP	-	341.389	9.513.723	-
9	BBRI	1,325.657	30.001.868	566.765.389	16.086.163
10	BBTN	2,793.380	1.960.837	115.708.131	7.832.425
11	BCIC	39.619	1.377.359	13.367.398	166.824
12	BDMD	1,301.305	379.697	158.406.672	15.775.004
13	BEKS	-	383.983	8.004.132	129.601
14	BJBR	57,613.873	9.593.557	58.181.942	24.415
15	BKSW	3.600	341.594	10.454.035	53.087
16	BMRI	4,136.245	25.633.225	604.366.376	67.644.038
17	BNBA	-	190.048	3.698.812	10
18	BNGA	3,453.212	3.611.237	197.963.762	12.944.110
19	BNII	1,248.628	-	122.271.534	12.652.548
20	BNLI	1,571.682	-	150.458.801	8.491.779
21	BSIM	20.028	1.748.668	13.306.065	143.489
22	BSWD	13.629	28.737	3.503.505	-
23	BTPN	-	2.430.223	64.125.067	482.657
24	BVIC	41.805	1.828.928	15.293.788	1.548.743
25	INPC	60.284	482.541	18.596.252	1121.241
26	MAYA	-	-	21.636.984	1.157.875
27	MCOR	458.628	47.630	7.257.672	-
28	MEGA	4,464.074	-	48.228.794	9.768.993
29	NISP	1,692.205	-	79.008.487	15.384.236
30	PNBN	1,320.437	18.232.473	136.294.374	2.586.015
31	SDRA	-	146	7.439.141	226.632
<b>TOTAL</b>		<b>85.583.344</b>	<b>126.759.778</b>	<b>3.263.493.519</b>	<b>273.932.340</b>

No	Entitas	Kategori Aset Keuangan			
		Tahun 2014 (dalam jutaan rupiah)			
		FVTPL	HTM	L/R	AFS
1	AGRO	70.333	54.514	5.656.696	520.555
2	BABP	13.258	5.000	8.721.955	486.239
3	BACA	617118	-	7.121.708	1.288.797
4	BAEK	1.039	-	24.022.620	4.542.818
5	BBCA	1.672.222	11.485.574	439.076.815	80.136.821
6	BBKP	3.007	2.506.798	71.030.011	3.045.144
7	BBNI	3.196.010	12.431.338	337.904.676	40.880.840
8	BBNP	-	508.068	8.834.816	-
9	BBRI	380.451	47637.794	699.279.370	40.705.920
10	BBTN	740.320	2.092.039	128.049.777	10.842.676
11	BCIC	15.201	2.447.580	10.502.017	125.592
12	BDMD	1.164.065	267.904	168.073.613	17.536.256
13	BEKS	-	545.328	7.966.499	79.286
14	BJBR	712.455	6.981.377	65.664.573	27.748
15	BKSW	849	231	20.372.048	232.411
16	BMRI	7.359.357	28.387.721	704.177.450	74.470.669
17	BNBA	-	265.239	4.735.713	10
18	BNGA	1.703.915	5.485.558	198.625.787	15.159.972
19	BNII	264.091	-	128.109.141	10.165.054
20	BNLI	1.905.686	-	159.551.709	13.137.104
21	BSIM	-	2.547.636	15.706.162	77.650
22	BSWD	5.862	318.364	4.773.191	-
23	BTPN	-	3.422.392	67.071.383	1.308.699
24	BVIC	-	1.228.681	16.319.469	2.895.627
25	INPC	-	528.654	20.214.239	1.497.500
26	MAYA	-	-	32.745.384	2.066.051
27	MCOR	93.773	554.194	8.759.679	-
28	MEGA	4.306.463	-	49.074.560	9.488.321
29	NISP	2.148.567	-	83.311.744	16.105.838
30	PNBN	1.491.728	21.183.364	138.889.496	1.926.537
31	SDRA	-	209.701	13.427.952	249.984
<b>TOTAL</b>		<b>27.865.770</b>	<b>151.095.049</b>	<b>3.647.770.253</b>	<b>349.000.119</b>

Sumber data : Laporan posisi keuangan emiten sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 (diolah penulis)

Jumlah Kategori Liabilitas Keuangan yang Disajikan Emiten Sub Sektor  
Perbankan 2012-2014

No	Entitas	Liabilitas Keuangan	
		Tahun 2012 (dalam jutaan rupiah)	
		FVTPL	Biaya Perolehan Diamortisasi
1	AGRO	-	3.610.587
2	BABP	210.185	6.674.907
3	BACA	-	4.988.835
4	BAEK	2.768	22.158.616
5	BBCA	48.474	381.093.884
6	BBKP	-	59.553.703
7	BBNI	454.647	284.680.067
8	BBNP	113	7.507.905
9	BBRI	4.786.121	471.641.415
10	BBTN	-	100.350.009
11	BCIC	80	13.779.445
12	BDMD	84.288	120.211.028
13	BEKS	-	6.833.740
14	BJBR	-	61.684.975
15	BKSW	2.534	3.669.440
16	BMRI	113.257	492.440.656
17	BNBA	-	2.915.804
18	BNGA	160.485	172.108.780
19	BNII	137.887	102.451.514
20	BNLI	10.956	116.197.344
21	BSIM	-	12.646.876
22	BSWD	317	2.136.536
23	BTPN	-	50.627.968
24	BVIC	-	12.796.828
25	INPC	-	18.462.710
26	MAYA	10	15.170.886
27	MCOR	-	5.664.798
28	MEGA	1.424	58.465.350
29	NISP	92.533	65.629.628
30	PBNB	1.415	129.965.287
31	SDRA	40	6.980.707
<b>TOTAL</b>		<b>6.107.534</b>	<b>2.813.100.228</b>

No	Entitas	Liabilitas Keuangan	
		2013 (dalam jutaan rupiah)	
		FVTPL	Biaya Perolehan Diamortisasi
1	AGRO	-	4.235.740
2	BABP	1.009	7.350.443
3	BACA	-	6.204.055
4	BAEK	2.418	25.459.947
5	BBCA	113.516	420.960.043
6	BBKP	-	62.590.859
7	BBNI	1.181.732	330.841.359
8	BBNP	100	8.905.144
9	BBRI	3.679.684	532.567.091
10	BBTN	-	118.379.958
11	BCIC	1.606	12.931.731
12	BDMD	458.850	146.877.421
13	BEKS	-	8.183.623
14	BJBR	-	60.769.680
15	BKSW	141.678	9.150.853
16	BMRI	226.168	567.936.481
17	BNBA	-	3.425.372
18	BNGA	917.273	189.287.638
19	BNII	794.458	124.692.146
20	BNLI	248.387	149.036.152
21	BSIM	-	13.943.406
22	BSWD	4.026	3.105.763
23	BTPN	-	58.984.598
24	BVIC	-	17.450.236
25	INPC	580	18.375.775
26	MAYA	14	21.378.957
27	MCOR	-	6.809.104
28	MEGA	646	59.833.106
29	NISP	1.489.353	80.619.638
30	PNBN	2.085	143.041.523
31	SDRA	-	7.585.191
<b>TOTAL</b>		<b>9.263.583</b>	<b>3.220.913.033</b>

No	Entitas	Liabilitas Keuangan	
		2014 (dalam jutaan rupiah)	
		FVTPL	Biaya Perolehan Diamortisasi
1	AGRO	-	5.423.575
2	BABP	112	8.137.586
3	BACA	-	8.248.013
4	BAEK	8.867	26.370.607
5	BBCA	14.702	461.942.804
6	BBKP	1.425	71.567.372
7	BBNI	661.609	335.614.050
8	BBNP	-	8.305.255
9	BBRI	6.525.688	688.705.340
10	BBTN	-	131.213.631
11	BCIC	126	11.372.762
12	BDMD	129.261	156.549.689
13	BEKS	-	8.327.403
14	BJBR	-	63.756.471
15	BKSW	1.371	18.155.742
16	BMRI	157.055	661.550.535
17	BNBA	-	4.496.256
18	BNGA	631.921	201.378.464
19	BNII	224.098	125.819.617
20	BNLI	107.485	165.748.916
21	BSIM	63	16.366.263
22	BSWD	3.411	4.583.585
23	BTPN	-	59.874.088
24	BVIC	-	18.351.285
25	INPC	634	20.516.507
26	MAYA	10	32.995.209
27	MCOR	-	8.418.540
28	MEGA	2.149	59.138.530
29	NISP	594.499	83.445.199
30	PNBN	199	147.802.310
31	SDRA	-	12.316.055
<b>TOTAL</b>		<b>9.064.685</b>	<b>3.626.491.659</b>

Sumber data : Laporan posisi keuangan emiten sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014

*Impairment Assets* yang Disajikan pada Laporan Keuangan Emiten Sub Sektor  
Perbankan 2012-2014

No	Entitas	<i>Impairment Assets</i>				
		2012 (dalam jutaan Rp)				
		FVTPL	HTM	L/R	AFS	<i>Not Specific</i>
1	AGRO	-	-	93.295	-	-
2	BABP	-	2.065	106.013	-	-
3	BACA	-	-	18.331	-	-
4	BAEK	-	-	140.894	-	-
5	BBCA	-	466.455	4.158.894	163.043	-
6	BBKP	-	-	971.916	-	-
7	BBNI	-	-	7.032.747	15.571	-
8	BBNP	-	-	60.229	-	-
9	BBRI	536	-	14.915.036	-	760
10	BBTN	-	3.751	988.514	5.018	-
11	BCIC	-	-	1.038.469	-	703.538
12	BDMD	-	20.781	2.246.957	-	-
13	BEKS	-	-	236.065	-	-
14	BJBR	-	-	685.691	4.264	-
15	BKSW	-	-	14.633	-	-
16	BMRI	-	-	15.357.476	3.044	281.513
17	BNBA	-	752	15.723	-	-
18	BNGA	-	-	4.215.477	-	42.928
19	BNII	-	-	1.129.632	-	259.907
20	BNLI	42	-	1.366.413	1	-
21	BSIM	-	-	92.248	-	127
22	BSWD	-	-	13.241	-	2.449
23	BTPN	-	-	384.190	-	-
24	BVIC	-	-	243.144	-	3.765
25	INPC	-	-	10.546	-	-
26	MAYA	-	-	137.187	-	-
27	MCOR	-	-	32.586	-	-
28	MEGA	-	-	360.010	-	-
29	NISP	-	-	1.076.851	-	1.988
30	PNBN	-	165.807	1.362.420	-	-
31	SDRA	-	-	56.867	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>578</b>	<b>659.611</b>	<b>58.561.695</b>	<b>190.941</b>	<b>1.296.975</b>

No	Entitas	<i>Impairment Assets</i>				
		2013 (dalam jutaan Rp)				
		FVTPL	HTM	L/R	AFS	<i>Not Specific</i>
1	AGRO	-	-	99.337	-	-
2	BABP	-	1.704.619	138.061	-	-
3	BACA	-	-	8.630	-	-
4	BAEK	-	-	179.664	-	-
5	BBCA	-	539.426	5.785.117	207.631	-
6	BBKP	-	-	832.979	-	-
7	BBNI	-	14.435	6.981.421	-	-
8	BBNP	-	-	78.073	-	-
9	BBRI	-	-	15.418.173	-	772
10	BBTN	-	3.721	1.139.265	5.037	-
11	BCIC	-	-	1.659.462	-	888.410
12	BDMD	-	21.122	3.231.127	-	-
13	BEKS	-	-	.236.065	-	-
14	BJBR	-	-	1.082.057	7.569	-
15	BKSW	-	-	10.860	-	-
16	BMRI	-	-	18.281.669	3.224	317.066
17	BNBA	-	2.057	6.376	-	-
18	BNGA	-	-	4.548.022	-	41.053
19	BNII	-	-	1.299.303	-	234.249
20	BNLI	-	-	1.424.752	-	213
21	BSIM	-	-	56.333	-	248
22	BSWD	-	-	22.503	-	-
23	BTPN	-	-	487.652	-	-
24	BVIC	-	-	232.552	-	474
25	INPC	-	-	79.141	-	-
26	MAYA	-	-	115.454	-	-
27	MCOR	-	-	22.590	-	-
28	MEGA	-	-	394.448	-	-
29	NISP	-	-	1.471.924	-	5.552
30	PNBN	-	81.274	1.839.079	-	-
31	SDRA	-	-	78.493	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>2.366.654</b>	<b>67.240.582</b>	<b>223.461</b>	<b>1.488.037</b>

No	Entitas	Impairment Assets				
		2014 (dalam jutaan Rp)				
		FVTPL	HTM	L/R	AFS	Not Specific
1	AGRO	-	-	100.904	-	-
2	BABP	-	-	128.402	-	-
3	BACA	-	-	7.897	-	-
4	BAEK	-	-	320.916	-	-
5	BBCA	-	557.066	7.306.137	214.639	-
6	BBKP	-	-	919.968	-	-
7	BBNI	-	-	7.069.385	-	-
8	BBNP	-	-	79.485	-	-
9	BBRI	-	-	16.162.795	-	-
10	BBTN	-	4.232	1.578.146	5.170	-
11	BCIC	-	-	1.277.094	-	904.105
12	BDMD	-	21.442	3.926.028	-	-
13	BEKS	-	-	159.101	-	-
14	BJBR	-	-	1.691.200	-	4.236
15	BKSW	-	-	12.461	-	-
16	BMRI	-	3.182	19.752.662	-	301.779
17	BNBA	-	4.746	6.876	-	-
18	BNGA	-	-	6.140.898	-	39.037
19	BNII	517	-	1.427.153	-	239.775
20	BNLI	-	-	2.033.579	-	-
21	BSIM	-	-	75.078	-	124
22	BSWD	-	-	27.717	-	-
23	BTPN	-	-	511.965	-	-
24	BVIC	-	-	184.784	-	443
25	INPC	-	-	132.337	-	-
26	MAYA	-	-	60.519	-	-
27	MCOR	-	-	23.612	-	-
28	MEGA	-	-	476.991	-	-
29	NISP	-	-	1.471.924	-	5.552
30	PNBN	-	73.031	2.077.111	-	-
31	SDRA	-	-	174.613	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>517</b>	<b>663.699</b>	<b>75.317.738</b>	<b>219.809</b>	<b>1.495.051</b>

Sumber data : Laporan posisi keuangan emiten sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014

Aset lain-lain dalam Kategori Pinjaman yang Diberikan pada Laporan Keuangan  
Entitas Perbankan Periode 2012-2014

Kode Perusahaan	Aset Lain-Lain yang termasuk dalam Aset Keuangan kategori <i>Loan and Receivable</i>
AGRO	Piutang bunga dan piutang lain-lain
BABP	Pendapatan yang masih akan diterima, tagihan bunga dan setoran jaminan
BACA	Uang muka dan lain-lain
BAEK	<i>Non financial assets</i>
BBCA	<i>Non financial assets</i>
BBKP	Bunga yang masih akan diterima, tagihan terkait dengan transaksi kartu kredit dan ATM dan pendapatan yang masih akan diterima
BBNI	Piutang bunga dan piutang terkait transaksi ATM dan kartu kredit, piutang lain-lain dan piutang premi asuransi.
BBNP	Setoran jaminan dan pendapatan yang masih akan diterima
BBRI	Piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah
BBTN	Tagihan kepada pihak ketiga
BCIC	<i>Non financial assets</i>
BDMD	Setoran jaminan, tagihan terkait dengan transaksi kartu kredit dan ATM, piutang bunga
BEKS	Pendapatan yang masih akan diterima, piutang transaksi nasabah, penjualan efek-efek yg masih harus diterima, tagihan terkait dengan kartu ATM dan tagihan kepada pemegang polis
BJBR	Setoran jaminan
BKSW	Aset lain-lain yang termasuk dalam aset keuangan
BMRI	Pendapatan yang masih akan diterima, piutang transaksi nasabah, penjualan efek-efek yang masih harus diterima, tagihan terkait dengan ATM dan kartu kredit, tagihan kepada pemegang polis dan tagihan atas obligasi pemerintah
BNBA	<i>Non financial assets</i>
BNGA	Tagihan terkait dengan transaksi kartu kredit dan ATM
BNII	Piutang bunga dan tagihan ATM
BNLI	Tagihan lainnya
BSIM	Setoran jaminan

BSWD	Tagihan sehubungan dengan penyelesaian Bank Indover, tagihan komisi asuransi dan tagihan sehubungan ATM bersama
BTPN	Tagihan klaim asuransi, piutang joint financing dan lain-lain, uang muka dan aset terbengkalai
BVIC	<i>Non financial assets</i>
INPC	Setoran jaminan dan tagihan penjualan agunan yang diambil alih
MAYA	<i>Non financial assets</i>
MCOR	Uang jaminan
MEGA	Piutang bunga, aset yang diblokir, piutang sewa, bunga yang masih akan diterima dan setoran jaminan aset yang diblokir
NISP	Tagihan transaksi, piutang bunga, piutang penjualan efek yang masih harus diterima, tagihan transaksi ATM dan lain-lain
PNBN	Pendapatan yang masih harus diterima, piutang lain-lain, dan piutang premi
SDRA	Tagihan klaim asuransi

Sumber data: diolah oleh penulis

**Liabilitas lain-lain dalam Kategori Biaya Perolehan Diamortisasi pada Laporan  
Keuangan Entitas Perbankan Periode 2012-2014**

<b>Kode Perusahaan</b>	<b>Liabilitas Lain-Lain yang termasuk dalam Liabilitas Keuangan</b>
AGRO	Bunga yang masih harus dibayar dan setoran jaminan
BABP	Bunga yang masih harus dibayar dan setoran jaminan
BACA	Bunga yang masih harus dibayar dan setoran jaminan
BAEK	Uang jaminan dan lain-lain
BBCA	<i>Non Financial Assets</i>
BBKP	Bunga dan beban yang masih harus dibayar
BBNI	Utang kepada pemegang polis, setoran jaminan, nota kredit dalam penyelesaian dan utang reasuransi
BBNP	Bunga yang masih harus dibayar
BBRI	Utang bunga dan setoran jaminan
BBTN	Setoran jaminan dan dana jaminan pengembang
BCIC	<i>Non Financial Liabilities</i>
BDMD	Baban yang masih harus dibayar, utang bunga, setoran jaminan, pembelian efek-efek yang masih harus dibayar dan utang reasuransi
BEKS	Setoran jaminan, beban yang masih harus dibayar, hutang klaim, pembelian efek yang masih harus dibayar, utang transaksi nasabah dan liabilitas terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit
BJBR	Setoran jaminan
BKSW	<i>Non Spesific</i>
BMRI	Utang transaksi nasabah, pembelian efek-efek yang masih harus dibayar, utang klaim, liabilitas terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit dan liabilitas transaksi UPAS
BNBA	<i>Non Financial Liabilities</i>
BNGA	Bunga yang masih harus dibayar dan setoran jaminan
BNII	Beban dan bunga yang masih harus dibayar
BNLI	<i>Non Spesific</i>
BSIM	Liabilitas premi penjaminan Pemerintah, setoran jaminan L/C dan bank garansi
BSWD	Bunga yang masih harus dibayar dan setoran jaminan
BTPN	Utang premi asuransi kredit, transaksi ATM, utang kepada pihak ketiga dan lainnya
BVIC	Beban dan bunga yang masih harus dibayar dan lain-lain
INPC	Beban dan bunga yang masih harus dibayar dan lain-lain
MAYA	Pendapatan bunga ditangguhkan, liabilitas ATM dan liabilitas kepada pihak ketiga
MCOR	Setoran jaminan dan lain-lain

MEGA	Bunga yang masih akan diterima, setoran jaminan dan aset yang diblokir
NISP	Setoran jaminan, kewajiban transaksi, utang pembelian efek-efek yang masih harus dibayar dan lain-lain
PNBN	Bunga yang masih harus dibayar dan setoran jaminan
SDRA	<i>Non Financial Liabilities</i>

Sumber data: Catatan atas laporan keuangan 31 sampel emiten sub sektor perbankan periode 2012-2014 (diolah penulis)

Pengukuran Aset Keuangan Setelah Pengakuan Awal Entitas Perbankan Periode  
2012-2014

KODE	Aset Keuangan			
	FVTPL	HTM	L/R	AFS
AGRO	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BABP	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BACA	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi (L/R)		Nilai wajar
BAEK	-	-		-
BBCA	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BBKP	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BBNI	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BBNP	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi (L/R)		-
BBRI	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BBTN	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BCIC	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BDMD	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BEKS	-	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BJBR	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BKSW	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BMRI	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BNBA	-	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BNGA	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BNII	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi (L/R)		Nilai wajar
BNLI	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BSIM	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BSWD	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		-
BTPN	-	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
BVIC	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
INPC	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		Nilai wajar
MAYA	-	Biaya Perolehan Diamortisasi (L/R)		Nilai wajar
MCOR	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi		-
MEGA	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi (L/R)		Nilai wajar
NISP	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi (L/R)		Nilai wajar

<b>PNBC</b>	<b>Nilai wajar</b>	<b>Biaya Perolehan Diamortisasi</b>	<b>Nilai wajar</b>
<b>SDRA</b>	<b>-</b>	<b>Biaya Perolehan Diamortisasi</b>	<b>Nilai wajar</b>

Sumber data: Catatan atas laporan keuangan 31 sampel emiten sub sektor perbankan periode 2012-2014 (diolah penulis)

Lampiran 10

Pengukuran Liabilitas Keuangan Setelah Pengakuan Awal Entitas Perbankan Periode  
2012-2014

KODE	Liabilitas Keuangan	
	FVTPL	Liabilitas Keuangan Lainnya
AGRO	-	Biaya Perolehan Diamortisasi
BABP	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
BACA	-	Biaya Perolehan Diamortisasi
BAEK	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
BBCA	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
BBKP	-	Biaya Perolehan Diamortisasi
BBNI	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
BBNP	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
BBRI	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
BBTN	-	Biaya Perolehan Diamortisasi
BCIC	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
BDMD	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
BEKS	-	Biaya Perolehan Diamortisasi
BJBR	-	Biaya Perolehan Diamortisasi
BKSW	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
BMRI	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
BNBA	-	Biaya Perolehan Diamortisasi
BNGA	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
BNII	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
BNLI	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
BSIM	-	Biaya Perolehan Diamortisasi
BSWD	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
BTPN	-	Biaya Perolehan Diamortisasi
BVIC	-	Biaya Perolehan Diamortisasi
INPC	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
MAYA	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
MCOR	-	Biaya Perolehan Diamortisasi

MEGA	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
NISP	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
PNBN	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi
SDRA	Nilai wajar	Biaya Perolehan Diamortisasi

Sumber data: Catatan atas laporan keuangan 31 sampel emiten sub sektor perbankan periode 2012-2014 (diolah penulis)